

Ekonomi Pembangunan Islam

Penulis:

Rusydi Fauzan

Muhammad Zulkarnain

Yudisthira Ardana

Tri Wahyu Rejekiningsih

Ickhsanto Wahyudi

Alamsyah Agit

Annisa Ilmi Faried

Ana Fitriyatul Bilgies

Banatul Hayati

Arif Pujiyono



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Ekonomi Pembangunan Islam

Penulis :

**Rusydi Fauzan
Muhammad Zulkarnain
Yudisthira Ardana
Tri Wahyu Rejekiningsih
Ickhsanto Wahyudi
Alamsyah Agit
Annisa Ilmi Faried
Ana Fitriyatul Bilgies
Banatul Hayati
Arif Pujiyono**

ISBN :

Editor : Febby Irfayunita, S.Sy., M.E.

Penyunting: Yuliatr M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka, S.Pd.

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, September 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Ekoomi Pembangunan Islam dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang Ekonomi Pembangunan Islam Sebagai Disiplin Ilmu, Teori Ekonomi Pembangunan Pendekatan Konvensional, Alat Ukur Pembangunan Ekonomi Islam, Kemiskinan Perspektif Islam, Indikator Kemiskinan Dalam Islam, Disparitas Dalam Pembangunan Ekonomi, Sektor Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam, Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Islam, Permasalahan Pembangunan Ekonomi Di Negara Islam,

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, September 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB 1

EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM SEBAGAI DISIPLIN ILMU.....	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Definisi Ekonomi Pembangunan Islam.....	3
1.3. Tujuan Ekonomi Pembangunan Islam	4
1.4. Manfaat Ekonomi Pembangunan Islam.....	8
1.5. Penutup.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB 2

TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN PENDEKATAN KONVENSIONAL	25
2.1. Pendahuluan	25
2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domah.....	26
2.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow	27
2.4. Teori Pertumbuhan Endogen	30
2.5. Teori Pertumbuhan Baru	34
DAFTAR PUSTAKA	37

BAB 3

TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN PENDEKATAN ISLAM	Error! Bookmark not defined.
---	-------------------------------------

3.1.	Pendahuluan	38
3.2.	Model Pembangunan Ibnu Khaldun.....	39
3.3.	Model Pembangunan As- Syatibi.....	45
3.4.	Orientasi Pembangunan Dalam Islam	49
3.5.	Tujuan Pembangunan Dalam Islam	53
DAFTAR PUSTAKA		56
BAB 4		
ALAT UKUR PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM		57
4.1.	Pendahuluan	57
4.2.	Indikator Dalam Pembangunan Menurut Islam.....	58
4.3.	Kesimpulan	78
DAFTAR PUSTAKA		80
BAB 5		
KEMISKINAN PERSPEKTIF ISLAM		82
5.1.	Pendahuluan	82
5.2.	Pengertian Kemiskinan dalam Islam	84
5.3.	Penyebab Kemiskinan Menurut Islam	87
5.4.	Solusi Mengatasi Kemiskinan	90
5.5.	Penerapan Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah	90
5.6.	PENUTUP	96
DAFTAR PUSTAKA		98
BAB 6		
INDIKATOR KEMISKINAN DALAM ISLAM		100
6.1.	Kemiskinan	100
6.2.	Indikator Kemiskinan	106
6.3.	Menghadapi Kemiskinan	112

DAFTAR PUSTAKA.....	118
 BAB 7	
DISPARITAS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI	121
7.1. Pendahuluan	121
7.2. Gagasan Disparitas Pembangunan Ekonomi.....	123
7.3. Hubungan Pembangunan Ekonomi Dengan Disparitas	125
DAFTAR PUSTAKA.....	131
 BAB 8	
SEKTOR EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM	134
8.1. Pendahuluan	134
8.2. Sejarah dan Perkembangan Ekonomi Islam.....	137
8.3. Kesimpulan.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	153
 BAB 9	
ZAKAT SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ISLAM	154
9.1. Arti Penting Pembiayaan Pembangunan	154
9.2. Sumber Pembiayaan Pembangunan Konvensional	155
9.3. Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Islam	157
9.4. Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional dan Kendala Pembiayaan.....	166
DAFTAR PUSTAKA.....	172
 BAB 10	

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA ISLAM	173
10.1. Pendahuluan	173
10.2. Definisi dan Karakteristik Negara Islam	173
10.3. Permasalahan Ekonomi Pembangunan di Negara Islam	178
10.4 Solusi Ekonomi Islam dalam Mengatasi Permasalahan Ekonomi Pembangunan di Negara Islam	181
10.5 Penutup.....	194
DAFTAR PUSTAKA.....	195

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Dimensi, Kategori, dan Sub Kategori Ekonomi Islam	60
Tabel 4.2 Proksi Indikator E12.....	62
Tabel 4.3 Bobot Kontribusi Komponen Indeks Zakat Nasional	75
Tabel 5.1 Penyebab Kemiskinan	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model pembangunan Ibnu Khaldun.....	30
Gambar 3.2 Model Pembangunan Maqasyid Syariah	46
Gambar 3.3 Satu Kesatuan dimensi Maqasyid Syariah	49
Gambar 8.1 Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat Tahun 2014-2022.....	124
Gambar 8.2 Masalah Ketimpangan Ekonomi	127

BAB 1

EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM SEBAGAI DISIPLIN ILMU

Oleh: Rusydi Fauzan

1.1. Pendahuluan

Di dunia yang semakin saling terhubung, persinggungan antara ekonomi, ketahanan, dan keberlanjutan mendapatkan perhatian yang signifikan. Ketika mempertimbangkan persinggungan ini melalui lensa prinsip-prinsip Islam, sebuah kerangka kerja yang kaya yang dikenal sebagai Ekonomi Pembangunan Islam muncul. Kerangka kerja ini menggabungkan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi, pembangunan ketahanan, dan praktik-praktik berkelanjutan, yang dipandu oleh etika dan nilai-nilai Islam. Artikel ini mengeksplorasi korelasi dan sinergi antara Ekonomi Pembangunan Islam, ketahanan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan, dengan menyoroti prinsip-prinsip yang sama dan manfaat bersama.

Ekonomi Pembangunan Islam mengambil prinsip-prinsipnya dari ajaran Islam, yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Ekonomi Pembangunan Islam mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan perilaku etis, mempromosikan kesejahteraan individu, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip-prinsip redistribusi kekayaan, praktik bisnis yang beretika, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab merupakan intinya, yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang memprioritaskan martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Ketahanan ekonomi mencakup kemampuan ekonomi untuk bertahan dari guncangan dan tantangan sambil mempertahankan stabilitas dan kesejahteraan. Dalam konteks prinsip-prinsip Islam, ketahanan ekonomi dicapai melalui kegiatan ekonomi yang terdiversifikasi, praktik keuangan yang etis, dan penghindaran utang yang berlebihan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip moderasi, menghindari pemborosan, dan memupuk kemandirian, ekonomi Islam membangun ekonomi yang mampu beradaptasi dengan keadaan yang berubah tanpa mengorbankan integritas etika.

Pembangunan berkelanjutan, sebuah keharusan global, selaras dengan ajaran Islam. Konsep amanah (kepercayaan) memandu pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dengan menekankan kesetaraan antargenerasi. Prinsip-prinsip Islam menganjurkan pertumbuhan yang seimbang yang melindungi lingkungan, mendorong konsumsi yang bertanggung jawab, dan menghormati kesejahteraan generasi mendatang. Mekanisme zakat dan sedekah memainkan peran penting dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, yang merupakan elemen kunci dari pembangunan berkelanjutan.

Korelasi antara Ekonomi Pembangunan Islam, ketahanan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan menunjukkan integrasi yang harmonis antara pertimbangan etika, ekonomi, dan lingkungan. Dipandu oleh nilai-nilai Islam, kerangka kerja ini menawarkan pendekatan holistik untuk mengatasi tantangan global kontemporer. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip kesetaraan, ketahanan, dan keberlanjutan, masyarakat dapat membangun ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan yang selaras dengan ajaran Islam sekaligus berkontribusi pada kebaikan global yang lebih besar. Korelasi ini tidak hanya menggarisbawahi kekayaan ekonomi Islam, tetapi juga menggarisbawahi potensinya untuk membentuk dunia yang lebih seimbang dan sejahtera.

2 Ekonomi Pembangunan Syariah

1.2. Definisi Ekonomi Pembangunan Islam

Ekonomi Pembangunan Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada pembangunan ekonomi negara dan masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan norma-norma etika Islam. Ini adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan teori ekonomi, studi pembangunan, dan ajaran Islam untuk mengusulkan strategi dan kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil yang selaras dengan etika dan tujuan Islam.

Aspek-aspek utama dari Ekonomi Pembangunan Islam meliputi:

1. **Pembangunan Ekonomi dalam Kerangka Islam.**

Ekonomi Pembangunan Islam berupaya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan perilaku etis.

2. **Pengentasan Kemiskinan.**

Tujuan utama dari Ekonomi Pembangunan Islam adalah pengentasan kemiskinan. Strategi dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi bermanfaat bagi semua anggota masyarakat, terutama yang kurang beruntung dan terpinggirkan.

3. **Redistribusi Kekayaan.**

Konsep Zakat dan Sedekah merupakan bagian integral dari Ekonomi Pembangunan Islam. Mekanisme ini membantu mendistribusikan kembali kekayaan dan mengatasi ketidaksetaraan pendapatan.

4. **Praktik Bisnis yang Etis.**

Ekonomi Pembangunan Islam mempromosikan perilaku etis dalam kegiatan ekonomi. Hal ini termasuk melarang praktik-praktik seperti riba, eksploitasi, dan ketidakjujuran.

5. Pembangunan Berkelanjutan.

Keberlanjutan lingkungan ditekankan, karena pembangunan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan atau membahayakan kesejahteraan generasi mendatang.

6. Program Kesejahteraan Sosial.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti penekanan pada dukungan masyarakat, mendorong terciptanya program-program kesejahteraan sosial untuk memastikan bahwa populasi yang rentan diperhatikan.

7. Keuangan Islam.

Ekonomi Pembangunan Islam sering kali bersinggungan dengan keuangan Islam, yang menawarkan instrumen dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Keuangan Islam dapat berperan dalam mendanai proyek-proyek pembangunan sambil menghindari transaksi berbasis bunga.

8. Pemerataan Distribusi Sumber Daya.

Pembangunan ekonomi diupayakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa sumber daya dan peluang didistribusikan secara adil di antara semua anggota masyarakat.

9. Kewirausahaan dan Inovasi

Ekonomi Pembangunan Islam mendorong kewirausahaan dan inovasi sebagai pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, selama hal tersebut sejalan dengan pedoman etika Islam.

1.3. Tujuan Ekonomi Pembangunan Islam

Berikut adalah beberapa tujuan utama dari Ekonomi Pembangunan Islam yaitu:

1. *Poverty Alleviation.*

Ekonomi pembangunan Islam berdampak pada pengentasan kemiskinan dengan mempromosikan mekanisme seperti Zakat dan Sadaqah yang

mendistribusikan kekayaan dan sumber daya kepada yang membutuhkan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan. Selain itu, praktik bisnis yang beretika dan penekanan pada kesejahteraan sosial berkontribusi pada sistem ekonomi yang lebih inklusif yang dapat mengatasi akar penyebab kemiskinan.

2. *Wealth Redistribution.*

Ekonomi pembangunan Islam berdampak pada redistribusi kekayaan dengan mengadvokasi pelaksanaan Zakat dan Sadaqah sebagai bentuk distribusi kekayaan yang wajib, memastikan bahwa sumber daya mengalir ke segmen masyarakat yang terpinggirkan. Pendekatan ini membantu mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan mendorong lingkungan ekonomi yang lebih adil dan merata.

3. *Ethical Economic Practices.*

Ekonomi pembangunan Islam mendorong praktik ekonomi yang beretika dengan menekankan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam bertransaksi, serta mencegah praktik-praktik seperti riba dan eksploitasi. Landasan etika ini memandu kegiatan ekonomi, menumbuhkan lingkungan ekonomi yang bertanggung jawab dan sadar sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

4. *Equitable Resource Distribution.*

Ekonomi pembangunan Islam berdampak pada distribusi sumber daya yang adil dengan mengadvokasi kebijakan dan praktik yang memastikan sumber daya dan peluang didistribusikan secara adil di antara semua anggota masyarakat, mengurangi kesenjangan dan mempromosikan keadilan sosial. Konsep-konsep seperti Zakat dan Sedekah berperan dalam mendistribusikan kembali kekayaan, dan praktik-praktik bisnis yang

beretika berkontribusi pada alokasi sumber daya yang lebih adil.

5. *Sustainable Development.*

Ekonomi pembangunan Islam berdampak pada pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, mencegah pemborosan, dan mempromosikan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Pendekatan ini menyelaraskan kemajuan ekonomi dengan kesejahteraan jangka panjang generasi sekarang dan yang akan datang, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang perlindungan dan kelestarian lingkungan.

6. *Social Welfare Enhancement.*

Ekonomi pembangunan Islam berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat yang rentan melalui mekanisme seperti Zakat dan Sedekah, yang memberikan dukungan finansial kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, penekanan pada praktik bisnis yang beretika, pengentasan kemiskinan, dan pelibatan masyarakat menumbuhkan masyarakat yang lebih inklusif dan peduli, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

7. *Community Empowerment.*

Ekonomi pembangunan Islam memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat dengan mempromosikan kegiatan ekonomi kooperatif, kewirausahaan yang beretika, dan inisiatif lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, kemandirian, dan partisipasi aktif dalam masyarakat, yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi dan sosial.

8. *Cultural Preservation.*

Ekonomi pembangunan Islam berdampak pada pelestarian budaya dengan menghormati dan mengintegrasikan norma-norma dan nilai-nilai budaya ke dalam strategi ekonomi, mendorong keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian identitas lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa upaya pembangunan peka terhadap budaya, menjaga kekayaan dan keragaman masyarakat sambil mendorong kemajuan ekonomi mereka.

9. *Human Capital Development.*

Ekonomi pembangunan Islam berdampak pada pengembangan sumber daya manusia dengan menekankan pendidikan, peningkatan keterampilan, dan akuisisi pengetahuan sebagai bagian integral dari kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini berinvestasi pada potensi manusia, yang mengarah pada tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil yang berkontribusi pada pembangunan dan kemakmuran yang berkelanjutan.

10. *Balanced Economic Growth.*

Ekonomi pembangunan Islam berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan mendorong kegiatan ekonomi yang memprioritaskan kesejahteraan material dan spiritual, menghindari materialisme yang berlebihan sambil mempromosikan kemajuan ekonomi. Pendekatan ini mendorong pembangunan holistik yang mempertimbangkan kebutuhan individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan inklusif.

1.4. Manfaat Ekonomi Pembangunan Islam

Berikut adalah beberapa manfaat pembangunan Ekonomi Pembangunan Islam:

1. *Ethical economic behavior.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi perilaku ekonomi yang beretika dengan mempromosikan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam bertransaksi, serta menumbuhkan lingkungan yang penuh dengan kepercayaan dan integritas. Penekanan pada perilaku etis ini meningkatkan kepercayaan pasar, mendorong kewirausahaan yang bertanggung jawab, dan berkontribusi pada ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan, yang bermanfaat bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan (Fauzan, Hafidah, *et al.*, 2023), (Nugraha *et al.*, 2023), (Fauzan, Hakim, *et al.*, 2023), dan (Samsuddin *et al.*, 2023).

2. *Community empowerment.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dengan menekankan pada kegiatan ekonomi koperasi, inisiatif lokal, dan program kesejahteraan sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini menumbuhkan kohesi komunitas, kemandirian, dan tanggung jawab bersama, yang menghasilkan peningkatan partisipasi ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif (Rachmat, Harto, *et al.*, 2023), (Kunda *et al.*, 2023), (Ernayani *et al.*, 2022), dan (Bilgies *et al.*, 2023).

3. *Environmental sustainability.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi kelestarian lingkungan dengan menganjurkan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, menghindari pemborosan, dan mempromosikan praktik bisnis etis yang menghormati lingkungan. Pendekatan ini berkontribusi

pada ekosistem yang lebih sehat, mengurangi degradasi lingkungan, dan stabilitas ekonomi jangka panjang, menciptakan ekonomi yang lebih baik yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian sumber daya alam (Sarjana *et al.*, 2022), (Fauzan, Rizki, *et al.*, 2023), (Muniarty *et al.*, 2023), dan (Fauzan, Febrian, *et al.*, 2023).

4. *Responsible entrepreneurship.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi kewirausahaan yang bertanggung jawab dengan mendorong perilaku etis, tanggung jawab sosial, dan praktik bisnis berkelanjutan yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di atas keuntungan semata. Pendekatan ini mendorong lingkungan bisnis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pengembangan masyarakat, dan perbaikan masyarakat secara keseluruhan, sejalan dengan nilai-nilai Islam dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan sejahtera (Fauzan, Ekasari, *et al.*, 2023), (Mulyati *et al.*, 2023), (Fauzan, Nurhayati and Novia, 2020), dan (Seto, Fauzan, *et al.*, 2023).

5. *Stronger community cohesion.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi kohesi masyarakat yang lebih kuat dengan mempromosikan dukungan timbal balik, kerja sama, dan tanggung jawab bersama di antara anggota masyarakat, menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas sosial. Struktur masyarakat yang kohesif ini berkontribusi pada peningkatan interaksi ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, yang pada akhirnya mengarah pada ekonomi yang lebih baik yang bermanfaat bagi semua anggota masyarakat (Murdana *et al.*, 2023), (Fauzan, Siagian, *et al.*, 2023), (Fauzan, Supryanita and Rahmatika, 2021), dan (Fauzan, Daga, *et al.*, 2023).

6. *Reduced income inequality.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi pengurangan ketimpangan pendapatan dengan menganjurkan mekanisme redistribusi kekayaan seperti Zakat dan Sedekah, yang menyasar mereka yang kurang beruntung dan terpinggirkan, sehingga mendorong distribusi sumber daya dan peluang yang lebih adil. Pendekatan ini menciptakan ekonomi yang lebih seimbang dan adil, di mana kesenjangan pendapatan diminimalkan, yang mengarah pada peningkatan stabilitas sosial dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan (Putri *et al.*, 2023), (Sudirjo *et al.*, 2023), (Fauzan and Jayanti, 2020), dan (Fauzan, Lotte, *et al.*, 2023).

7. *Ethical financial practices.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi praktik-praktik keuangan yang beretika dengan mempromosikan transaksi bebas bunga, pembagian keuntungan dan risiko, dan transparansi dalam transaksi keuangan, sehingga menumbuhkan lingkungan yang adil dan saling percaya. Pendekatan ini menumbuhkan sistem keuangan yang lebih stabil dan bertanggung jawab, mengurangi risiko krisis keuangan, meningkatkan kepercayaan investor, dan berkontribusi pada ekonomi yang lebih sehat yang dibangun di atas fondasi etika (Fauzan, Putri, *et al.*, 2023), (Afriansyah *et al.*, 2023), (Seto, Yulianti, *et al.*, 2023), dan (Fauzan, Setiawan, *et al.*, 2023).

8. *Inclusive economic participation.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi partisipasi ekonomi inklusif dengan mengadvokasi akses yang adil terhadap peluang ekonomi, sumber daya, dan pendidikan, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Pendekatan ini memberdayakan individu dan kelompok yang terpinggirkan, membina tenaga kerja yang beragam dan terampil, mendorong inovasi, dan

pada akhirnya menghasilkan ekonomi yang lebih dinamis dan kuat yang mendapat manfaat dari bakat semua anggotanya (Firdausijah *et al.*, 2023), (Fauzan, Diwyarthi, *et al.*, 2023), (Fauzan and Rahmadani, 2018), dan (Mustanir *et al.*, 2023).

9. *Long-term economic stability.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi stabilitas ekonomi jangka panjang dengan menekankan manajemen keuangan yang bertanggung jawab, menghindari utang yang berlebihan, dan mempromosikan praktik bisnis yang beretika, yang secara kolektif berkontribusi pada fondasi ekonomi yang tangguh. Pendekatan ini mengurangi volatilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran dari waktu ke waktu (Lestari *et al.*, 2022), (Ridwan *et al.*, 2023) (Rafid *et al.*, 2023), dan (Fauzan, Muhtadi, *et al.*, 2023).

10. *Enhanced public services.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi peningkatan layanan publik dengan menekankan tanggung jawab sosial anggota masyarakat yang lebih kaya melalui mekanisme seperti Zakat dan Sedekah, yang mendukung penyediaan layanan publik yang penting bagi mereka yang kurang beruntung. Pendekatan ini mengarah pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang berkontribusi pada populasi yang lebih sehat dan lebih produktif, dan pada akhirnya menciptakan ekonomi yang lebih baik dengan berkurangnya kesenjangan sosial (Prasetyorini *et al.*, 2023), (Amruddin *et al.*, 2023), (Yusuf *et al.*, 2023), dan (Ristiyana *et al.*, 2023).

11. *Support for small businesses.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi dukungan terhadap usaha kecil dengan mendorong kewirausahaan

yang bertanggung jawab, perilaku bisnis yang beretika, dan praktik perdagangan yang adil, menumbuhkan lingkungan di mana usaha kecil dapat berkembang tanpa dibayang-bayangi oleh perusahaan yang lebih besar. Pendekatan ini menstimulasi ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja, dan berkontribusi pada ekonomi yang terdiversifikasi dan tangguh, yang pada akhirnya mengarah pada lanskap ekonomi yang lebih baik (Handayani *et al.*, 2023), (Fauzan and Sari, 2018), (Wijaya, Hasriani, *et al.*, 2023), dan (Kurniawan and Fauzan, 2023).

12. *Enhanced social mobility.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi peningkatan mobilitas sosial dengan mempromosikan akses yang adil terhadap pendidikan, pengembangan keterampilan, dan peluang ekonomi, yang memungkinkan individu untuk naik di atas latar belakang sosial-ekonomi mereka. Pendekatan ini menumbuhkan masyarakat yang lebih meritokratis di mana bakat dan usaha dihargai, berkontribusi pada tenaga kerja yang terampil dan berdaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi, yang pada akhirnya mengarah pada ekonomi yang lebih baik untuk semua (Fauzan, Alaydrus, *et al.*, 2023), (Hendarsyah *et al.*, 2023), (Fauzan, 2014), dan (Fadli *et al.*, 2023).

13. *Ethical investment practices.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi praktik investasi yang etis dengan mendorong investasi pada usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari industri seperti perjudian, alkohol, dan transaksi riba. Pendekatan ini mendorong investasi yang bertanggung jawab dan bermanfaat secara sosial, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga integritas etika, dan pada akhirnya menciptakan ekonomi yang lebih baik yang mendukung kesejahteraan

finansial dan moral (Rachmat, Jauhar, *et al.*, 2023), (Arifin *et al.*, 2023), (Fauzan, A'yun, *et al.*, 2023), dan (A *et al.*, 2023)..

14. Improved quality of life.

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi peningkatan kualitas hidup dengan mendorong pemerataan sumber daya, keadilan sosial, dan akses terhadap layanan-layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan, serta membina lingkungan di mana individu dan masyarakat dapat berkembang. Pendekatan ini meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, mengurangi kesenjangan, dan berkontribusi pada standar hidup yang lebih tinggi, menciptakan ekonomi yang lebih baik dengan fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat (Rambe *et al.*, 2023), (Purba *et al.*, 2023), (Sari *et al.*, 2023), dan (Fauzan, Simarmata, *et al.*, 2023).

15. Sustainable job creation.

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dengan menekankan praktik bisnis yang beretika, manajemen sumber daya yang bertanggung jawab, dan dukungan untuk usaha kecil, yang secara kolektif berkontribusi pada pasar kerja yang terdiversifikasi dan tangguh. Pendekatan ini menghasilkan kesempatan kerja yang stabil, mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang tidak stabil, dan mendorong stabilitas ekonomi, yang pada akhirnya menciptakan ekonomi yang lebih baik dengan prospek pekerjaan yang berkelanjutan (Fauzan, Januarsi, *et al.*, 2023), (Rachmat, Fauzan, *et al.*, 2023), (Zainal *et al.*, 2023), dan (Limbong *et al.*, 2023).

16. Reduced social tensions.

Ekonomi pembangunan Islam berpengaruh pada berkurangnya ketegangan sosial dengan mendorong distribusi sumber daya yang adil, mempromosikan

keadilan sosial, dan meningkatkan kohesi masyarakat melalui tanggung jawab bersama dan mekanisme dukungan. Pendekatan ini mengatasi kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif yang berdampak positif pada stabilitas sosial dan berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik (Fauzan, Wishanesta, *et al.*, 2023), (Fauzan, 2019), (Rachmat, Widiana, *et al.*, 2023), dan (Hanani *et al.*, 2023)..

17. Inclusive technological progress.

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi kemajuan teknologi yang inklusif dengan mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis, memastikan bahwa kemajuan tersebut dapat diakses dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat. Pendekatan ini memfasilitasi penyebaran pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan inovasi, yang mengarah pada tenaga kerja yang diberdayakan secara teknologi dan ekonomi yang lebih baik yang mengintegrasikan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan bersama (Nanny Mayasari *et al.*, 2023), (Nanny; Mayasari *et al.*, 2023), dan (Zaman *et al.*, 2023)..

18. Fair trade practices.

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi praktik perdagangan yang adil dengan mempromosikan transparansi, kejujuran, dan perilaku etis dalam transaksi bisnis, menumbuhkan lingkungan di mana produsen dan konsumen diperlakukan secara adil. Pendekatan ini memastikan bahwa interaksi ekonomi didasarkan pada saling menguntungkan, berkontribusi pada pasar yang lebih dapat dipercaya dan efisien, dan pada akhirnya menciptakan ekonomi yang lebih baik yang memprioritaskan hubungan perdagangan yang beretika (Widiana *et al.*, 2023), (Wahdiniawati *et al.*, 2023), (Fauzan and Sari, 2016), dan (Lasmiatun *et al.*, 2023)..

19. *Higher social trust.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi kepercayaan sosial yang lebih tinggi dengan mendorong perilaku etis, praktik keuangan yang bertanggung jawab, dan mekanisme dukungan masyarakat, yang secara kolektif berkontribusi pada iklim kepercayaan dan kerja sama. Pendekatan ini meningkatkan hubungan bisnis, mengurangi biaya transaksi, dan mendorong lingkungan yang kondusif untuk interaksi ekonomi, menciptakan ekonomi yang lebih baik dengan kohesi sosial yang lebih baik dan rasa saling ketergantungan (Santoso *et al.*, 2023), (Purnamasari *et al.*, 2023), dan (Jasri *et al.*, 2023)..

20. *Economic resilience.*

Ekonomi pembangunan Islam mempengaruhi ketahanan ekonomi dengan menekankan manajemen keuangan yang bertanggung jawab, menghindari utang yang berlebihan, dan diversifikasi kegiatan ekonomi, yang berkontribusi pada fondasi ekonomi yang kuat dan stabil. Pendekatan ini meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bertahan terhadap guncangan ekonomi, beradaptasi dengan perubahan keadaan, dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menciptakan ekonomi yang lebih baik yang tangguh dan siap menghadapi tantangan (Wijaya, Sudirjo, *et al.*, 2023), (Wicaksono *et al.*, 2023), dan (Afdhal *et al.*, 2023).

1.5. **Penutup**

Ekonomi pembangunan Islam mewakili pendekatan holistik terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berakar kuat pada nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini merangkum sebuah visi di mana kemajuan ekonomi tidak dikejar dengan mengorbankan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, atau pertimbangan etika. Sebaliknya,

ekonomi pembangunan Islam membayangkan sebuah kerangka kerja ekonomi di mana pembangunan bersifat inklusif, adil, dan dipandu oleh prinsip-prinsip Islam, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ekonomi pembangunan Islam menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dan berprinsip untuk mencapai kemakmuran ekonomi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Ekonomi pembangunan Islam membayangkan sebuah sistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memperhatikan kesejahteraan semua individu dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi, negara-negara memiliki kesempatan untuk menciptakan ekonomi yang tidak hanya kuat secara finansial tetapi juga berlandaskan etika, yang berkontribusi pada lanskap ekonomi global yang lebih adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- A, C.H.S. *et al.* (2023) 'Shopeefood Application During Covid-19 For Promotion And Service Quality On Consumer Purchase Decisions', 5(2), pp. 184–193.
- Afdhal *et al.* (2023) *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Afriansyah *et al.* (2023) *Perencanaan Agribisnis Pertanian Berkelanjutan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Amruddin *et al.* (2023) *Manajemen SDM di Era Society 5.0*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Arifin, M.S. *et al.* (2023) *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Bilgies, A.F. *et al.* (2023) *Manajemen Keuangan Islam*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Ernayani, R. *et al.* (2022) 'The Influence of Sales and Operational Costs on Net Income in Cirebon Printing Companies', *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 4(2020), pp. 81–86.
- Fadli, Z. *et al.* (2023) *Manajemen Pemasaran Digital*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R. (2014) 'Penilaian Kinerja Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard. Studi Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi', *jurnal ekonomi*, 16(2), pp. 50–60.
- Fauzan, R. (2019) 'Ammil ZakaT Institution Development Strategy in Reducing Student Drop Out Rate. Case Study LAZIS STIE Haji Agus Salim', *THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCIAL STUDIES 2019*, 1, pp. 83–85.
- Fauzan, R., Hakim, M.Z., *et al.* (2023) *Auditing*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Hafidah, A., *et al.* (2023) *Ekonomi Manajerial*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., A'yun, K., *et al.* (2023) *Islamic Marketing*. Padang:

Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Rizki, M., *et al.* (2023) *Koperasi*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Muhtadi, R., *et al.* (2023) *Makroekonomika Syariah*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Setiawan, Z., *et al.* (2023) *Manajemen Risiko*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Siagian, A.O., *et al.* (2023) *Manajemen Keuangan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Januarsi, Y., *et al.* (2023) *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Ekasari, R., *et al.* (2023) *Manajemen Konflik*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Lotte, L.N.A., *et al.* (2023) *Manajemen Pemasaran*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Wishanesta, I.K.D., *et al.* (2023) *Manajemen Perbankan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Febrian, W.D., *et al.* (2023) *Manajemen Perpajakan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Diwyarthi, N.D.M.S., *et al.* (2023) *Manajemen Sumber Daya Manusia (Pengantar Di Era Modern)*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Daga, R., *et al.* (2023) *Produk dan Merek*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Alaydrus, A.Z.A., *et al.* (2023) *Studi Kelayakan Agribisnis*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Simarmata, N., *et al.* (2023) *Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Putri, R.D., *et al.* (2023) *Wawasan Bisnis*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R. and Jayanti, A. (2020) 'Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model Pada Usaha Sanjai Nitta Bukittinggi', *Jurnal BONANZA: Manajemen dan Bisnis*, 1(1), pp. 1-12.

- Fauzan, R., Nurhayati, N. and Novia, I. (2020) 'Pengambilan Keputusan Strategis dalam Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Pendekatan Activity Based Costing. Studi Kasus UMKM Tia Konveksi', *Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), pp. 35–46.
- Fauzan, R. and Rahmadani, S. (2018) 'Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model. Studi Kasus Perkebunan Kopi Green Sago Kabupaten 50 Kota', *jurnal ekonomi*, 21(1), pp. 21–33.
- Fauzan, R. and Sari, A.M. (2016) 'Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus di Cafe Texas Juice Cabang Tengah Jua Kota Bukittinggi)', *jurnal ekonomi*, 20(2), pp. 147–156.
- Fauzan, R. and Sari, R.P. (2018) 'Strategi Pengembangan Taman Marga Satwa dengan Menggunakan SWOT dan QSPM Model. Studi Kasus Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi', *jurnal ekonomi*, 21(2), pp. 120–131.
- Fauzan, R., Supryanita, R. and Rahmatika, R. (2021) 'Analisa Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Daya Saing pada Bisnis Kafe di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kafe Teras Kota)', *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1).
- Firdausijah, R.T. *et al.* (2023) *Manajemen Sektor Publik*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Hanani, T. *et al.* (2023) *Akuntansi Perbankan Syariah (Konsep Dasar)*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Handayani, S. *et al.* (2023) *Akuntansi Biaya*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Hao, X. *et al.* (2023) 'The role of digitalization on green economic growth: Does industrial structure optimization and green innovation matter?', *Journal of Environmental Management*, 325, p. 116504. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116504>.
- Hendarsyah, D. *et al.* (2023) *Sistem Informasi Manajemen*.

Padang: Global Eksekutif Teknologi.

- Jakobsen, O. and Storsletten, V.M.L. (2019) 'Beyond the Green Shift—Ecological Economics BT - Borderology: Cross-disciplinary Insights from the Border Zone: Along the Green Belt', in J.S. Methi et al. (eds). Cham: Springer International Publishing, pp. 173–183. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-319-99392-8_13.
- Jasri et al. (2023) *Ekonomi Syariah*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Kunda, A. et al. (2023) *Pengantar Bisnis: Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran Dan Operasional*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Kurniawan, B. and Fauzan, R. (2023) 'Strategi Mempertahankan Pendapatan Petani Kelapa Sawit pada Masa Replanting Kelapa Sawit Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2 SE-Articles), pp. 210–228. Available at: <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v3i2.77>.
- Lasmiatun, K. et al. (2023) *Manajemen Dan Analisis Data*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Lestari, S.P. et al. (2022) *Manajemen Operasional*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Limbong, D. et al. (2023) *Dasar-Dasar Akuntansi Manajemen*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Lin, B. and Zhou, Y. (2022) 'Measuring the green economic growth in China: Influencing factors and policy perspectives', *Energy*, 241, p. 122518. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.122518>.
- Mayasari, Nanny; et al. (2023) *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA 4.0*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Mayasari, Nanny et al. (2023) *Manajemen Pelayanan Publik Era 5.0*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Menzel, T. and Teubner, T. (2021) 'Green energy platform
- 20 **Ekonomi Pembangunan Syariah**

economics – understanding platformization and sustainabilization in the energy sektor’, *International Journal of Energy Sektor Management*, 15(3), pp. 456–475. Available at: <https://doi.org/10.1108/IJESM-05-2020-0022>.

Mohsin, M. *et al.* (2022) ‘The role of technological progress and renewable energy deployment in green economic growth’, *Renewable Energy*, 190, pp. 777–787. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.03.076>.

Muliyati *et al.* (2023) *Komunikasi Bisnis*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Muniarty, P. *et al.* (2023) *Perancangan dan Pengembangan Produk*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Murdana, I.M. *et al.* (2023) *Ekonomi Pariwisata*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Mustanir, A. *et al.* (2023) *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Nugraha, D.B. *et al.* (2023) *Sistem Informasi Akuntansi*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Prasetyorini, P. *et al.* (2023) *Ekonomi Kreatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Purba, S. *et al.* (2023) *Manajemen Sumber Daya Manusia. Konsep dan Teori*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Purnamasari, S. *et al.* (2023) *Manajemen Keuangan Islam*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Putri, Z.E. *et al.* (2023) *Manajemen Destinasi Wisata*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Rachmat, Z., Widiana, I.N.W., *et al.* (2023) *Kewirausahaan (Suatu Pengantar)*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Rachmat, Z., Harto, B., *et al.* (2023) *Manajemen Pemasaran Perusahaan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Rachmat, Z., Fauzan, R., *et al.* (2023) *Manajemen Syariah*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

- Rachmat, Z., Jauhar, N., *et al.* (2023) *Strategi Pemasaran*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Rafid, M. *et al.* (2023) 'Social Media Application For Coffee Shop Development In Bandung City', 5(2), pp. 194–202.
- Rambe, M.T. *et al.* (2023) *Manajemen Strategis*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Ridwan, M. *et al.* (2023) *Manajemen Ziswaf*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Ristiyana, R. *et al.* (2023) *METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS: DI LENGKAPI DENGAN ANALISIS REGRESI-SPSS DAN SEM-PLS*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Samsuddin, H. *et al.* (2023) 'Employee Performance and the Effects of Compensation , Motivation , and Job Satisfaction', 8(1), pp. 436–447.
- Santoso, L.W. *et al.* (2023) *Manajemen Sains*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Sari, Y.P. *et al.* (2023) *Manajemen Perkantoran*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Sarjana, S. *et al.* (2022) *Manajemen Pemasaran*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Seto, A.A., Yulianti, M.L., *et al.* (2023) *Analisis Laporan Keuangan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Seto, A.A., Fauzan, R., *et al.* (2023) *Teori Portofolio & Analisis Investasi*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Song, X., Zhou, Y. and Jia, W. (2019) 'How do Economic Openness and R&D Investment Affect Green Economic Growth?—Evidence from China', *Resources, Conservation and Recycling*, 146, pp. 405–415. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.03.050>.
- Sudirjo, F. *et al.* (2023) *Riset Pemasaran*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Teotónio, I., Silva, C.M. and Cruz, C.O. (2021) 'Economics of green roofs and green walls: A literature review', *Sustainable Cities and Society*, 69, p. 102781. Available at:

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102781>.

- Wahdiniawati, S.A. *et al.* (2023) *ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Wicaksono, G. *et al.* (2023) *Akuntansi Perusahaan Manufaktur*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Widiana, I.N.W. *et al.* (2023) *Perilaku Dan Budaya Organisasi*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Wijaya, K., Hasriani, *et al.* (2023) *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Wijaya, K., Sudirjo, F., *et al.* (2023) *Manajemen Pemasaran Lanjutan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Yuan, H. *et al.* (2020) 'How does manufacturing agglomeration affect green economic efficiency?', *Energy Economics*, 92, p. 104944. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104944>.
- Yusuf, M. *et al.* (2023) 'Tokopedia Marketplace , The Effect Of Digital Marketing And Service Quality On Purchase Decisions', 8(1), pp. 448–457.
- Zainal, H. *et al.* (2023) 'Analysis Of Public Services In The Village Of Husein Sastranegara', 8(1), pp. 321–328.
- Zaman, N. *et al.* (2023) *Ekonomi Pertanian*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Zhang, D. *et al.* (2021) 'Public spending and green economic growth in BRI region: Mediating role of green finance', *Energy Policy*, 153, p. 112256. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112256>.
- Zhao, L. *et al.* (2022) 'Enhancing green economic recovery through green bonds financing and energy efficiency investments', *Economic Analysis and Policy*, 76, pp. 488–501. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.08.0>

19.

Zhao, X., Ma, X., *et al.* (2022) 'Green economic growth and its inherent driving factors in Chinese cities: Based on the Metafrontier-global-SBM super-efficiency DEA model', *Gondwana Research*, 106, pp. 315–328. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gr.2022.01.013>.

Zhao, X., Mahendru, M., *et al.* (2022) 'Impacts of environmental regulations on green economic growth in China: New guidelines regarding renewable energy and energy efficiency', *Renewable Energy*, 187, pp. 728–742. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.01.076>.

BAB 2

TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN PENDEKATAN KONVENSIONAL

Oleh Muhammad Zulkarnain

2.1. Pendahuluan

Teori ekonomi pembangunan adalah bidang studi yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan perubahan struktural dalam suatu negara. Pendekatan konvensional dalam teori ekonomi pembangunan sering kali berfokus pada pemahaman hubungan antara investasi, modal manusia, teknologi, perdagangan, dan kebijakan publik dalam mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Barro & Xavier I. Sala-i-Martin, 2003).

Beberapa teori ekonomi pembangunan yang dikenal dalam pendekatan konvensional adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar: Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori ini berpendapat bahwa investasi yang tinggi dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui efek penggandaan atau multiplier effect (Domar, 1946; Harrod, 1939).
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow: Teori ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang tergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Teori ini memperhatikan peran akumulasi modal dan inovasi teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Solow, 1956).

3. Teori Pertumbuhan Endogen: Teori ini berpendapat bahwa faktor-faktor dalam sistem ekonomi, seperti investasi dalam penelitian dan pengembangan, inovasi, dan pendidikan, dapat secara endogen mendorong pertumbuhan ekonomi jangka Panjang (Lucas, 1988; Romer, 1986).
4. Teori Pertumbuhan Baru: Teori ini menekankan peran pengetahuan, inovasi, dan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini juga menyoroti pentingnya kegiatan riset dan pengembangan serta investasi dalam manusia untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan (Aghion & Howitt, 1992; Romer, 1990).

Penting untuk dicatat bahwa referensi yang diberikan merupakan karya-karya yang memperkenalkan atau mengembangkan teori-teori tersebut. Terdapat banyak literatur dan penelitian lain yang membahas teori ekonomi pembangunan konvensional dengan pendekatan yang berbeda dan dapat menjadi referensi tambahan dalam mempelajari topik ini secara lebih mendalam.

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Sir Roy Harrod dan Evsey Domar pada tahun 1930-an dan 1940-an. Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai teori Harrod-Domar (Domar, 1946; Harrod, 1939) :

1. Dasar Teori: Teori Harrod-Domar berangkat dari asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada tingkat investasi. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan akumulasi modal, yang kemudian memicu pertumbuhan output dan lapangan kerja.

2. Efek Penggandaan: Teori ini mengemukakan konsep efek penggandaan (multiplier effect), yaitu bahwa setiap peningkatan dalam investasi akan menciptakan peningkatan yang lebih besar dalam output dan pendapatan nasional. Dalam teori Harrod-Domar, efek penggandaan terjadi karena peningkatan investasi akan mendorong peningkatan permintaan agregat, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan produksi dan lapangan kerja.
3. Ketergantungan pada Tingkat Tabungan: Teori ini menyatakan bahwa tingkat investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan tergantung pada tingkat tabungan dalam perekonomian. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin besar investasi yang dapat dilakukan, dan oleh karena itu, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai.
4. Stabilitas dan Ketidakstabilan: Teori Harrod-Domar juga mengidentifikasi adanya ketidakstabilan dalam pertumbuhan ekonomi. Jika investasi yang dilakukan tidak sejalan dengan tingkat tabungan atau terjadi fluktuasi dalam permintaan agregat, maka dapat terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan output dan lapangan kerja. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi.

2.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow

Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow, yang juga dikenal sebagai model pertumbuhan neoklasik atau model Solow-Swan, dikembangkan oleh ekonom Robert Solow pada tahun 1956. Teori ini merupakan salah satu pendekatan konvensional dalam teori ekonomi pembangunan yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang suatu negara.

Pada dasarnya, teori pertumbuhan ekonomi Solow mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yaitu (Solow, 1956):

1. Akumulasi modal: Model Solow menekankan pentingnya akumulasi modal atau investasi dalam bentuk modal fisik (seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi mengarah pada peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas tenaga kerja.
2. Pertumbuhan populasi: Faktor pertumbuhan populasi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan populasi yang cepat dapat meningkatkan tenaga kerja yang tersedia, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, Solow menyatakan bahwa dampak pertumbuhan populasi pada pertumbuhan ekonomi cenderung berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
3. Kemajuan teknologi: Kemajuan teknologi adalah faktor penting dalam teori Solow. Perubahan teknologi dan inovasi yang memungkinkan produksi yang lebih efisien dan peningkatan produktivitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemajuan teknologi dapat berupa perbaikan metode produksi, pengenalan teknologi baru, atau peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja.

Model Solow mengasumsikan bahwa faktor produksi lainnya, seperti tenaga kerja dan modal, mengalami pengembalian yang berkurang. Artinya, peningkatan faktor produksi tersebut pada akhirnya tidak akan memberikan kontribusi yang sama besar terhadap pertumbuhan ekonomi seperti pada awalnya.

Teori pertumbuhan ekonomi Solow memberikan kerangka kerja yang sederhana untuk memahami faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan jangka panjang suatu negara. Namun, model ini juga memiliki keterbatasan, seperti ketidakmampuannya untuk menjelaskan secara rinci perubahan

teknologi atau faktor-faktor institusional yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow, yang juga dikenal sebagai Model Pertumbuhan Neoklasik atau Model Solow-Swan, merupakan salah satu pendekatan konvensional dalam teori ekonomi pembangunan. Teori ini dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow berfokus pada faktor-faktor produksi dan teknologi sebagai penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pendekatan Solow dan Swan mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh tiga faktor utama (Solow, 1956; Swan, 1956):

1. Pertumbuhan tenaga kerja: Pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Pertambahan jumlah penduduk dan tingkat partisipasi tenaga kerja berperan dalam menentukan pertumbuhan tenaga kerja.
2. Akumulasi modal: Akumulasi modal, termasuk investasi dalam bentuk infrastruktur, mesin, dan peralatan, merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Solow, tingkat investasi yang tinggi akan menghasilkan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
3. Kemajuan teknologi: Perubahan teknologi adalah faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perkembangan teknologi memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dalam produksi barang dan jasa, serta mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas.

Dalam model Solow dan Swan, tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan mencapai tingkat yang disebut sebagai "steady state" atau "keseimbangan jangka panjang". Di tingkat steady state, tingkat pertumbuhan ekonomi akan stabil

karena laju pertumbuhan tenaga kerja dan akumulasi modal sejalan dengan tingkat pertumbuhan teknologi.

Pendekatan Solow dan Swan telah menjadi kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, teori ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti ketidakmampuannya menjelaskan sumber-sumber perubahan teknologi, ketimpangan ekonomi, dan peran institusi dalam pertumbuhan ekonomi

2.4. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori Pertumbuhan Endogen adalah pendekatan dalam teori ekonomi pembangunan yang menekankan peran faktor-faktor internal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini berbeda dengan pendekatan konvensional seperti teori Harrod-Domar atau teori Solow, yang memandang pertumbuhan ekonomi sebagai hasil eksternal dari faktor-faktor seperti investasi atau kemajuan teknologi.

Dalam teori pertumbuhan endogen, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai hasil dari interaksi antara akumulasi modal, inovasi teknologi, penelitian dan pengembangan, dan investasi dalam modal manusia. Beberapa teori pertumbuhan endogen yang terkenal adalah sebagai berikut:

1. Model Pertumbuhan Romer: Teori pertumbuhan endogen ini dikembangkan oleh Paul Romer pada tahun 1986. Model ini menekankan pentingnya inovasi dan penelitian dan pengembangan (R&D) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Romer berargumen bahwa investasi dalam R&D dapat menghasilkan peningkatan dalam pengetahuan dan teknologi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Romer, 1986).

2. Model Pertumbuhan Endogen dengan Modal Manusia: Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan keterampilan manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam model ini, modal manusia dianggap sebagai bentuk modal yang penting untuk menciptakan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Lucas, 1988).
3. Model Pertumbuhan Endogen dengan Eksternalitas Positif: Teori ini mengasumsikan adanya eksternalitas positif, yaitu efek positif yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi terhadap pihak lain atau sektor lain dalam perekonomian. Eksternalitas positif dapat berupa transfer pengetahuan, spillover teknologi, atau efek jaringan yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Aghion & Howitt, 1992)

Teori pertumbuhan endogen mengakui peran penting inovasi, penelitian dan pengembangan, investasi dalam modal manusia, serta faktor-faktor internal lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendekatan ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana faktor-faktor endogen dalam sistem ekonomi dapat menciptakan pertumbuhan secara berkelanjutan.

Penting untuk dicatat bahwa teori pertumbuhan endogen terus berkembang dan memiliki banyak variasi dan penelitian yang melibatkan kontribusi dari berbagai ekonom. Referensi yang diberikan merupakan contoh dari beberapa karya yang relevan dalam teori ini.

Teori Pertumbuhan Endogen adalah pendekatan dalam teori ekonomi pembangunan yang menekankan peran faktor-faktor dalam sistem ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari faktor eksternal seperti investasi,

populasi, atau teknologi yang berkembang secara independen. Beberapa teori pertumbuhan endogen yang dikenal termasuk:

1. Teori Pertumbuhan dengan Akumulasi Modal Manusia: Teori ini menyoroti pentingnya akumulasi modal manusia (pendidikan, pelatihan, keterampilan) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam manusia dianggap sebagai faktor penting dalam menghasilkan inovasi, produktivitas yang lebih tinggi, dan pertumbuhan jangka panjang (Lucas, 1988; Romer, 1990).
2. Teori Pertumbuhan dengan Inovasi Teknologi: Teori ini menekankan peran inovasi teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi dan penemuan baru dianggap sebagai faktor utama dalam menciptakan perubahan struktural dan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang (Aghion & Howitt, 1992; Romer, 1990).
3. Teori Pertumbuhan dengan Institusi dan Kebijakan: Teori ini menekankan peran institusi ekonomi dan kebijakan publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Institusi yang baik, seperti perlindungan hukum yang kuat, kestabilan politik, dan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi dan inovasi, diyakini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan jangka panjang (Acemoglu et al., 2005; North, 1990).

Teori Pertumbuhan Endogen adalah pendekatan dalam teori ekonomi pembangunan yang mengemukakan bahwa faktor-faktor internal dalam sistem ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendekatan ini bertentangan dengan pandangan konvensional yang menganggap pertumbuhan ekonomi tergantung pada faktor eksternal seperti investasi dan teknologi dari luar.

Dalam teori pertumbuhan endogen, terdapat beberapa faktor internal yang diyakini menjadi pendorong pertumbuhan

ekonomi. Beberapa konsep dan faktor utama dalam teori ini meliputi (Aghion & Howitt, 1992; Lucas, 1988; Romer, 1986):

1. Investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D): Teori pertumbuhan endogen menekankan pentingnya investasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi dan kemajuan teknologi. Investasi ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan penciptaan barang dan layanan baru.
2. Modal manusia: Konsep modal manusia dalam teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peningkatan kapabilitas dan pengetahuan tenaga kerja dianggap sebagai sumber daya penting dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Externalitas positif: Teori pertumbuhan endogen menyoroti adanya externalitas positif, yaitu dampak positif dari kegiatan ekonomi yang dapat berpindah ke sektor lain atau masyarakat secara keseluruhan. Contohnya adalah penyebaran pengetahuan dan teknologi dari sektor tertentu ke sektor lain melalui mekanisme saling belajar atau transfer teknologi. Externalitas positif ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi secara endogen.

Beberapa kontributor utama dalam pengembangan teori pertumbuhan endogen termasuk Paul Romer, Robert Lucas, dan Philippe Aghion. Mereka mengembangkan model-model matematis yang menunjukkan bagaimana faktor-faktor endogen, seperti investasi dalam R&D dan modal manusia, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2.5. Teori Pertumbuhan Baru

Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory) adalah pendekatan dalam teori ekonomi pembangunan yang menekankan peran inovasi, pengetahuan, dan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini merupakan pengembangan dari teori pertumbuhan endogen dan mencoba menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Beberapa konsep kunci dalam teori pertumbuhan baru antara lain:

1. Pengetahuan sebagai faktor produksi: Teori pertumbuhan baru menganggap pengetahuan sebagai faktor produksi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pengetahuan ini dapat bersifat eksplisit (tertulis) atau tacit (tidak tertulis) dan dapat diperoleh melalui penelitian dan pengembangan, pengalaman, pendidikan, dan transfer teknologi.
2. Inovasi dan teknologi: Teori ini menekankan pentingnya inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi dapat berupa penemuan baru, pengembangan produk atau proses baru, atau penerapan teknologi yang lebih efisien. Inovasi ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
3. Spillover pengetahuan dan efek jaringan: Teori pertumbuhan baru mengakui adanya spillover pengetahuan, yaitu transfer pengetahuan dan teknologi dari satu entitas ekonomi ke entitas ekonomi lainnya. Hal ini dapat terjadi melalui kerja sama antara perusahaan, interaksi dalam jaringan industri, atau melalui sektor penelitian dan pengembangan yang bersifat umum. Spillover pengetahuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
4. Investasi dalam modal manusia: Teori ini juga menekankan pentingnya investasi dalam modal manusia, seperti pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Modal

manusia yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan kapabilitas inovasi dan penyerapan teknologi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

5. Pengetahuan sebagai faktor produksi: Teori pertumbuhan baru menganggap pengetahuan sebagai faktor produksi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pengetahuan ini dapat bersifat eksplisit (tertulis) atau tacit (tidak tertulis) dan dapat diperoleh melalui penelitian dan pengembangan, pengalaman, pendidikan, dan transfer teknologi.
6. Inovasi dan teknologi: Teori ini menekankan pentingnya inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi dapat berupa penemuan baru, pengembangan produk atau proses baru, atau penerapan teknologi yang lebih efisien. Inovasi ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
7. Spillover pengetahuan dan efek jaringan: Teori pertumbuhan baru mengakui adanya spillover pengetahuan, yaitu transfer pengetahuan dan teknologi dari satu entitas ekonomi ke entitas ekonomi lainnya. Hal ini dapat terjadi melalui kerja sama antara perusahaan, interaksi dalam jaringan industri, atau melalui sektor penelitian dan pengembangan yang bersifat umum. Spillover pengetahuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Investasi dalam modal manusia: Teori ini juga menekankan pentingnya investasi dalam modal manusia, seperti pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Modal manusia yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan kapabilitas inovasi dan penyerapan teknologi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

1. Pengetahuan sebagai sumber pertumbuhan: Teori pertumbuhan baru menganggap pengetahuan sebagai faktor produksi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pengetahuan dapat berupa pengetahuan teknis,

pengetahuan tentang pasar, pengetahuan organisasi, atau pengetahuan sosial. Inovasi dan penyebaran pengetahuan dianggap sebagai mesin utama di balik pertumbuhan jangka panjang.

2. Inovasi dan spillover pengetahuan: Inovasi, baik dalam bentuk penemuan baru, teknologi, atau praktik bisnis baru, dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan baru juga menekankan pentingnya spillover pengetahuan, yaitu penyebaran pengetahuan dari satu entitas ekonomi ke entitas lainnya, yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan secara keseluruhan.
3. Investasi dalam riset dan pengembangan (R&D): Teori ini menyoroti pentingnya investasi dalam kegiatan riset dan pengembangan untuk mendorong inovasi dan peningkatan pengetahuan. Investasi ini dapat dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga akademik. Hasil dari investasi R&D ini dapat berupa penemuan teknologi baru, proses produksi yang lebih efisien, atau pemahaman yang lebih baik tentang pasar.
4. Efek jaringan: Teori pertumbuhan baru juga menekankan peran efek jaringan dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah pengguna atau penerima manfaat dari suatu inovasi meningkat, efek jaringan positif terjadi, di mana nilai inovasi tersebut meningkat lebih lanjut. Contohnya adalah adopsi luas telepon seluler atau internet, di mana semakin banyak orang yang menggunakannya semakin bermanfaat bagi semua pengguna.

Beberapa kontributor utama dalam teori pertumbuhan baru antara lain Paul Romer, Robert Lucas Jr., dan Philippe Aghion. Karya-karya mereka, seperti model pertumbuhan dengan inovasi endogen dan model pertumbuhan dengan efek jaringan, telah berperan penting dalam memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Chapter 6 Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. *Handbook of Economic Growth*, 1(SUPPL. PART A), 385–472. [https://doi.org/10.1016/S1574-0684\(05\)01006-3](https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01006-3)
- Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A Model of Growth Through Creative Destruction. *Econometrica*, 60(2), 323. <https://doi.org/10.2307/2951599>
- Barro, R. J., & Xavier I. Sala-i-Martin. (2003). *Economic Growth* (2nd Ed.). The MIT Press.
- Domar, E. D. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. *Econometrica*, 14(2), 137–147. <https://doi.org/10.2307/1905364>
- Harrod, R. F. (1939). An essay in dynamic theory. *The Economic Journal*, 49(193), 14–33. <https://doi.org/10.2307/2225181>
- Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037. www.jstor.org/stable/1833190
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/10.3386/w3210>
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Swan, T. W. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. *Economic Record*, 32(2), 334–361. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x>

BAB 3

TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN PENDEKATAN ISLAM

Oleh Yudhistira Ardana

3.1. Pendahuluan

Teori Pembangunan Pendekatan Islam menjadi sebuah manifestasi dari pemahaman dan penerapan ajaran Islam dalam mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini diilhami oleh prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Muslim, serta Hadis Nabi Muhammad sebagai teladan hidup yang patut diteladani. Dalam pendekatan ini, Islam tidak hanya dipahami sebagai agama ritual dan ibadah semata, tetapi sebagai suatu sistem nilai yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal kemajuan dan pembangunan. Ajaran Islam mengajarkan tentang keselarasan antara manusia dengan penciptaannya, alam sekitar, dan sesama makhluk lainnya.

Prinsip tauhid, keyakinan akan keesaan Allah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, menjadi landasan utama Teori Pembangunan Pendekatan Islam. Konsep ini mengingatkan manusia untuk bersikap bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam yang telah diberikan, dengan menjaga keseimbangan dan keadilan agar tidak merugikan generasi mendatang. Dalam Teori Pembangunan Pendekatan Islam juga terdapat nilai-nilai keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi politik yang tinggi. Zakat, infaq, dan wakaf sebagai prinsip ekonomi Islam menggarisbawahi

pentingnya berbagi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, prinsip syura menekankan pada pentingnya keterlibatan aktif seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Dengan demikian, Teori Pembangunan Pendekatan Islam bukanlah sekadar teori kosong, melainkan sebuah rencana aksi yang konkret untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan di tengah-tengah dinamika masyarakat modern. Melalui penafsiran kreatif dan aplikasi nilai-nilai keIslaman yang abadi, pendekatan ini berusaha untuk memberikan solusi atas tantangan-tantangan global yang dihadapi umat manusia pada era kontemporer. Di tengah perubahan zaman yang cepat dan kompleks, Teori Pembangunan Pendekatan Islam tetap relevan dan menjadi pilihan bagi mereka yang percaya bahwa keadilan sosial, kelestarian alam, dan kesejahteraan bersama adalah tujuan utama yang harus diupayakan bersama.

3.2. Model Pembangunan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun sering disebut sebagai “bapak” ekonomi Islam. Ide-idenya yang luar biasa telah membuat perbedaan besar di akar ekonomi Islam. Dia tidak hanya sangat berpengetahuan di satu bidang, tetapi juga memiliki banyak kekayaan intelektual di banyak bidang lainnya. Idennya luas dan berlaku untuk banyak situasi yang berbeda, termasuk bidang ekonomi pembangunan. Karya ilmiahnya tidak hanya berdasarkan teori; itu juga terinspirasi dari apa yang dia lihat dan lakukan di dunia nyata. Jadi, ide-ide yang dimunculkan Ibnu Khaldun masih sangat penting hingga saat ini

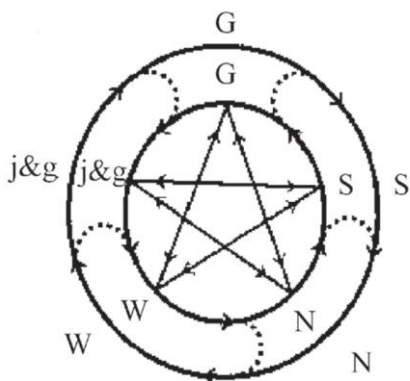
1. Model Pembangunan yang Dinamis dan Lintas Disiplin

Ibnu Khaldun membuat model yang mencoba menjelaskan bagaimana pembangunan, ekonomi, dan peradaban naik turun secara bersamaan. Ini juga memecahkan pertanyaan penting tentang hal-hal yang terjadi dalam sistem kehidupan sosial. Model ini

menunjukkan hal ini dengan melihat hal-hal berbeda yang mempengaruhi pertumbuhan dan bagaimana mereka saling bergantung satu sama lain.

Secara keseluruhan, model Ibnu Khaldun dapat dijelaskan melalui "*eight wise principles*" yang juga dikenal sebagai kalimat hikammiyah. Prinsip-prinsip bijaksana ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Model Pembangunan Ibnu Khaldun



Sumber: Chapra, 2001

Secara matematis, model ini dapat dibangun sebagai berikut:

$$G = f(S, N, W, j \text{ dan } g)$$

- G* : Negara (*the state*)
- S* : Institusi (*institutions*)
- N* : Sumber daya insani (*Human Beings*)
- W* : Kekayaan (*Wealth*)
- j* : Keadilan (*justice*)
- g* : Pembangunan (*development*)

Pemikiran Ibnu Khaldun memunculkan model matematika yang sangat dinamis, seperti tampak pada gambar di atas dan kalimat hikamiyah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, suatu studi pengembangan dapat dimulai dari sudut pandang yang berbeda dengan karakteristik yang saling bergantung satu sama lain. Model Ibnu Khaldun juga memperhitungkan faktor-faktor dari berbagai bidang, seperti moral, psikologi, politik, sosial, ekonomi, dan demografi, yang semuanya berperan dalam kemunduran atau kemajuan suatu peradaban dan saling terkait satu sama lain

2. Determinan Pembangunan Berdasarkan Model Ibnu Khaldun

a. Negara (*The State*)

Dalam ajaran Islam, peran utama negara dalam bidang ekonomi adalah untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dialami oleh rakyat, mempermudah akses seluruh lapisan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi, dan menciptakan kemakmuran. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pemimpin negara harus memiliki sifat-sifat kebaikan sesuai dengan tuntutan agama dan politik. Negara diharapkan bersikap toleran, moderat dan adil, serta menghindari kecurangan, kelicikan dan kepalsuan.

Dalam ajaran Islam, negara memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian. Fakta ini dapat ditemukan dalam sejarah pemerintahan Rasulullah dan masa kekhalifahan. Pada masa tersebut, negara terlibat secara aktif dalam semua aspek kehidupan, termasuk perekonomian. Konsep negara yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah sebuah negara yang menegakkan syariah dan berfungsi sebagai alat

untuk memajukan kesejahteraan dan pembangunan manusia.

Menurut Umer Chapra (2001), bentuk kekuasaan negara dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: 1) Kekuasaan alamiah atau normal (*tabi'i*), di mana setiap individu diperbolehkan untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan mengejar kesenangan hawa nafsu tanpa campur tangan dari negara, konsep ini juga sering disebut sebagai *laissez-faire*; 2) Kekuasaan politik rasional (*siyasah aqliyah*), di mana negara memungkinkan setiap individu memenuhi kepentingan pribadi dan duniawinya dengan mencegah kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip rasional. Model ini juga dikenal sebagai *welfare state* sekuler; 3) Kekuasaan berdasarkan moral (*siyasah diniyyah* atau *khalifah*), di mana negara memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan syariah. Model ini dikenal sebagai *welfare state* Islami atau *khilafah*.

b. Institusi (*Institutions*)

Institusi atau yang lebih dikenal dengan syariah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menanamkan nilai-nilai kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan rasa kebersamaan. Nilai-nilai ini berkontribusi pada proses pembangunan, penciptaan keadilan, pemahaman bersama, kerja sama, perdamaian, dan harmoni sosial. Selain itu, syariah juga berfungsi sebagai pengawas tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat.

Melalui pengaruh moderatnya, syariah mengarahkan penggunaan sumber daya secara bijaksana, sehingga berperan dalam mencapai

keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya. Syariah merujuk pada nilai-nilai dan lembaga atau aturan perilaku yang mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah perilaku sosial yang menyimpang. Aturan-aturan ini dapat bersifat formal maupun informal, tertulis atau tidak tertulis.

c. Sumber Daya Insani (*Human Beings*)

Kemajuan dan kemunduran suatu peradaban sangat bergantung pada tingkat kesejahteraan dan kesengsaraan masyarakat. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peran manusia dalam analisis ini. Dalam pandangannya, kesejahteraan dan kesengsaraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang memiliki hubungan sebab akibat dalam jangka waktu yang panjang.

Peran manusia sangatlah sentral dalam perjalanan peradaban. Manusia berfungsi sebagai tujuan dan sarana pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, upaya kesejahteraan ditujukan untuk manusia. Ketika kesejahteraan telah tercapai, manusia akan mampu berkontribusi secara efektif dan kreatif. Sementara itu, sebagai sarana pembangunan, manusia menjadi subjek yang aktif dalam proses membangun. Manusia merupakan elemen penting yang membentuk struktur pemerintahan, keluarga, dan masyarakat.

Potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi secara besar oleh jumlah dan kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, upaya untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia harus menjadi fokus penting, karena perkembangan manusia memiliki dampak signifikan dalam mengurangi tingkat

kemiskinan. Selain itu, pengeluaran sosial juga memberikan manfaat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, pengaruh sumber daya manusia terhadap tingkat kemiskinan terlihat lebih besar dibandingkan dengan pengaruh pengeluaran sosial terhadap tingkat kemiskinan.

d. Kekayaan (*Wealth*)

Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya peran investasi dan menyatakan bahwa "kekayaan tidak tumbuh ketika ditimbun dan disimpan. Ia akan tumbuh dan berkembang ketika diinvestasikan untuk kepentingan masyarakat, diberikan kepada yang berhak, dan untuk mengatasi kesulitan." Beberapa faktor katalisator dalam pertumbuhan ekonomi termasuk pajak yang rendah, keamanan dan perlindungan hak milik, serta lingkungan fisik yang sehat. Peningkatan pendapatan akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak dan memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk kesejahteraan rakyat, yang pada gilirannya menciptakan peluang ekonomi dan pembangunan yang lebih baik.

Sebaliknya, penurunan pendapatan akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak dan menyulitkan pemerintah dalam membiayai program pembangunan dan kesejahteraan. Negara mungkin akan terpaksa membebankan pajak yang lebih tinggi dan mencoba mengontrol sumber daya kekayaan. Penurunan pendapatan juga berdampak pada penurunan penerimaan pajak, mengurangi kemampuan negara untuk membiayai program pembangunan dan kesejahteraan. Akibatnya, pembangunan akan menurun secara signifikan, dan

kekuatan-kekuatan yang merusak dapat mempercepat keruntuhan dinasti penguasa

e. Pembangunan (*Development*) dan Keadilan (*Justice*)

Jika manusia menjadi fokus analisis, maka ada serangkaian sebab dan akibat yang menunjukkan hubungan erat antara pembangunan dan keadilan. Pembangunan sangat penting karena masyarakat memiliki kecenderungan alamiah untuk maju dan tidak ingin stagnan. Mereka harus mempertahankan pertumbuhan atau berisiko mengalami kemunduran. Menurut Ibnu Khaldun, pembangunan tidak hanya terkait dengan ekspansi ekonomi. Perkembangan mencakup semua faktor yang berkontribusi pada kemajuan manusia, di mana setiap variabel memperkaya yang lain dan berdampak pada kesejahteraan manusia dan kesenangan sejati.

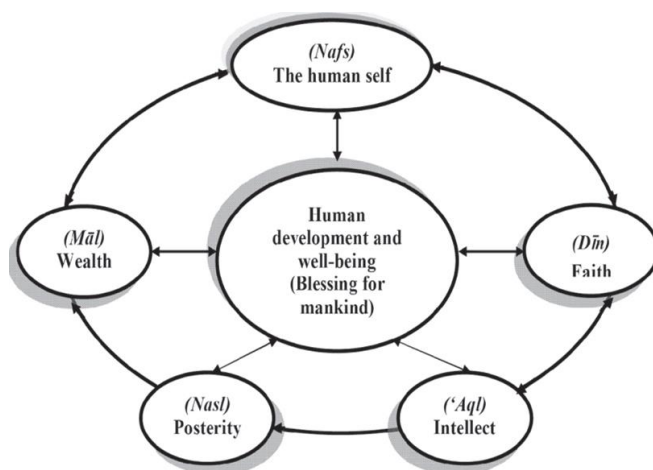
Tanpa keadilan, tidak akan ada pembangunan. Namun, konsep keadilan yang dimaksud lebih luas dan inklusif, mencakup semua aspek keberadaan manusia dan bukan hanya aspek ekonomi. Tercapainya keadilan menyeluruh ini juga sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. Keadilan ini dicapai melalui persaudaraan dan persamaan sosial, perlindungan hak milik dan penghormatan terhadap martabat orang lain, pemenuhan kewajiban politik dan sosial ekonomi secara jujur, pembayaran upah yang adil bagi mereka yang bekerja, dan pencegahan segala bentuk kezaliman terhadap siapa pun.

3.3. Model Pembangunan As- Syatibi

Model ekonomi pembangunan Islam yang kedua dikenal sebagai model pembangunan As Syatibi. Model ini pada dasarnya berakar dari konsep maqashid syariah, yang

merupakan tujuan dari ekonomi Islam. Dalam model ini, ekonomi pembangunan diturunkan dari komponen tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini berbeda dengan Teori Ibnu Khaldun yang lebih cenderung menggunakan elemen-elemen pembangunan yang mempengaruhi sistem masyarakat. Dengan demikian, analisis pembangunan dalam model As Syatibi lebih berfokus pada apa yang ingin dicapai melalui pembangunan, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Gambar. 3.2
Model Pembangunan Maqashid Syariah



Sumber: Chapra, 2008

Dua tokoh ilmuwan yang dikenal sebagai pendukung model dengan pendekatan ini adalah Al-Ghazali dan Umer Chapra. Dalam model ini, pusat dari analisis pembangunan adalah kesejahteraan manusia (human beings) dengan fokus untuk melindungi lima aspek maqashid syariah, yaitu:

1. Agama

Agama atau kepercayaan memiliki peran dalam membentuk sistem nilai yang mendukung kehidupan, yang pada tahap selanjutnya akan membentuk

kebudayaan. Sebagai contoh, keyakinan terhadap adanya Tuhan sebagai penguasa semesta akan berdampak pada kehidupan dan menghasilkan nilai bahwa semua yang ada di bumi dan dimiliki manusia sebenarnya adalah kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan manusia mendapat pengawasan dari Tuhan dan harus bertanggung jawab. Dalam Islam, kepercayaan ini dijelaskan melalui ajaran tauhid, yang mengajarkan keyakinan pada eksistensi Tuhan dan kepercayaan bahwa Tuhan menurunkan aturan-aturan melalui para Rasul-Nya dan kitab-kitab suci-Nya.

2. Jiwa

Tujuan utama penciptaan manusia oleh Tuhan di dunia ini adalah untuk menjadi khalifah. Tugas pokok seorang khalifah adalah untuk memakmurkan bumi, dan dalam konteks ini, memakmurkan berarti melakukan pembangunan. Di sisi lain, pembangunan sangat tergantung pada kualitas manusia itu sendiri, sesuai dengan pandangan Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa "kebangkitan dan keruntuhan suatu peradaban tergantung pada kualitas manusia." Oleh karena itu, pembangunan yang berlandaskan pada prinsip maqashid syariah seharusnya memiliki fokus utama pada keselamatan hidup manusia dan memastikan tersedianya kebutuhan dasar hidup. Esensi maqashid syariah tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik yang diukur dengan PDB atau pendapatan per kapita, tetapi lebih menekankan pada peningkatan kualitas hidup manusia.

3. Akal

Perlindungan terhadap akal merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Secara hakiki, manusia tidak memiliki kemampuan alami untuk bertahan hidup seperti hewan lainnya. Manusia tidak diberkahi dengan kecepatan lari seperti macan atau taring kuat untuk berburu. Sebaliknya, manusia hanya

dianugerahi akal sebagai sarana untuk bertahan hidup. Inilah alasan mengapa syariah harus menjaga dan melindungi akal manusia. Menjaga akal dalam konteks ini berarti mengembangkan potensi akal manusia, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pendidikan yang berkualitas.

4. Keturunan

Bagi makhluk hidup, menjalani proses reproduksi merupakan hal alami yang penting untuk memastikan kelangsungan generasinya. Proses ini menghasilkan generasi baru yang menggantikan generasi sebelumnya atau menambah jumlah populasi dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pembangunan, keturunan ini memainkan peran yang sangat vital, terutama dalam memastikan berlangsungnya pembangunan berkelanjutan.

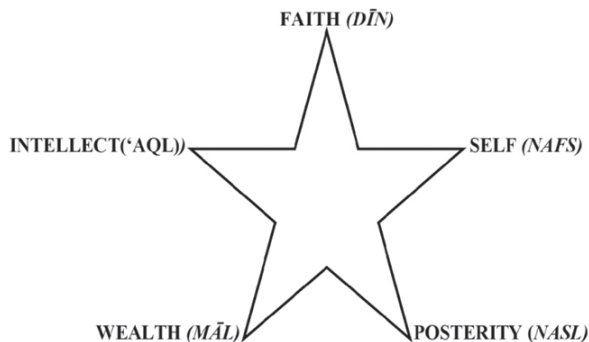
5. Harta

Seperti dalam pandangan pendekatan konvensional, tujuan utama pembangunan dalam Islam juga termasuk menjamin ketersediaan harta sebagai salah satu kebutuhan dasar. Namun, dalam perspektif Islam, harta bukanlah segalanya. Islam menganjurkan untuk memperoleh harta dengan mengikuti aturan dan batasan syariah yang berlaku.

Chapra menggambarkan hubungan lima aspek maqashid syariah dengan pusat pembangunan dan kesejahteraan manusia dalam suatu model (gambar 3.2). Pada gambar tersebut, terlihat bahwa pembangunan manusia dan kesejahteraan umum dipengaruhi oleh dimensi maqashid syariah, di mana kelima dimensi ini saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Pembangunan manusia dan kesejahteraan diwakili oleh lima komponen maqashid syariah. Model ini menunjukkan bahwa pembangunan dan kesejahteraan dipengaruhi oleh sejauh mana lima komponen maqashid

syariah dapat terpenuhi. Selain itu, model ini juga menggambarkan bahwa kelima komponen tersebut saling mempengaruhi atau bersifat saling terkait (interdependen). Lebih rinci, Chapra menggambarkan bagaimana kelima dimensi maqashid syariah tersebut saling terkait dan membentuk kesatuan yang utuh. seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.3.

Gambar 3.3
Satu Kesatuan Dimensi Maqashid Syariah



Sumber: Chapra (2008)

3.4. Orientasi Pembangunan Dalam Islam

Pembangunan dalam Islam memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 1) Berorientasi pada Kesejahteraan Manusia (People Oriented), 2) Berorientasi pada Kemaslahatan Umum (Maslahah Oriented), dan 3) Berorientasi pada Kesuksesan Dunia dan Akhirat (Falah Oriented). Setiap tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. *People-oriented (people-centred)*

Fokus utama dari ekonomi pembangunan Islam adalah pembangunan yang berorientasi pada kepentingan manusia (people-centered). Dari model pembangunan Islam yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa pusat dari seluruh proses pembangunan adalah manusia. Dalam konteks pembangunan, manusia

bertindak sebagai pelaku dan penerima manfaat sekaligus. Aspek material seperti infrastruktur tidak menjadi orientasi utama, tetapi tetap penting dalam pembangunan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk kebaikan manusia itu sendiri, sehingga infrastruktur yang sering dianggap sebagai fokus utama dalam pendekatan konvensional, dalam pandangan Islam dijadikan sebagai perantara untuk mencapai orientasi utama, yaitu membangun kesejahteraan manusia. Pembangunan infrastruktur yang baik diartikan sebagai pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan manusia.

Ditegaskan dalam paradigma pembangunan Ibnu Khaldun bahwa manusia merupakan titik fokus analisis pembangunan. Berkembang atau matinya suatu peradaban sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Elemen lain dari paradigma Ibnu Khaldun, seperti institusi, negara, dan penegakan keadilan, secara langsung dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Saling ketergantungan antara faktor-faktor tersebut dalam paradigma dinamis Ibnu Khaldun menunjukkan pentingnya manusia. Konsep pembangunan berbasis maqasid syariah juga menekankan sifat humanis baik tujuan syariah maupun tujuan pembangunan dalam Islam. Mencermati seluruh dimensi maqashid, tampak bahwa semua itu merepresentasikan konsep kesejahteraan manusia secara utuh.

Dimensi maqasid syariah membahas tidak hanya aspek material untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga non-material, seperti kesehatan fisik dan mental, hubungan yang harmonis dalam keluarga dan masyarakat, dan kedamaian batin dan spiritual. Pendekatan untuk mencapai kesejahteraan manusia ini

jauh lebih komprehensif daripada fokus materi murni. Apalagi dalam konsep maqasid, semua dimensi sangat erat kaitannya dengan manusia, sehingga orientasi pembangunan berdasarkan maqasid syariah adalah individu manusia.

2. *Maslahah – Oriented*

Orientasi kedua dalam ekonomi pembangunan Islam adalah *Maslahah*, yang merupakan kelanjutan dari orientasi pertama. Setelah memastikan bahwa pembangunan dalam Islam harus berfokus pada manusia, langkah selanjutnya adalah memastikan manfaat dari pembangunan tersebut tidak hanya untuk sejumlah orang, tetapi harus mencakup kesejahteraan umum (*maslahat*) dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. *Maslahah* dapat diartikan sebagai pencapaian kebaikan dan menghindari keburukan (*mudharat*). Secara khusus, dapat diartikan sebagai kepentingan umum atau kesejahteraan bersama (*maslahatul ummah*).

Dengan memahami pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada *maslahah* adalah pembangunan yang berdasarkan pada kebaikan dan kepentingan bersama. Selanjutnya, pembangunan yang dimaksud dalam Islam tidak hanya menguntungkan sekelompok orang, tetapi juga harus memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Konsep ini sejalan dengan salah satu determinan dalam model Ibnu Khaldun, yaitu keadilan. Selain itu, ketika membahas konsep *maslahah* dalam ekonomi Islam, penting juga untuk memahami konsep *berkah*. *Kemaslahatan* tersebut haruslah memberikan kebaikan yang berkelanjutan atau berlapis-lapis (*ziyadatul khair*). Dengan demikian, orientasi ekonomi pembangunan Islam adalah menciptakan kebaikan bersama yang juga menghasilkan berbagai kebaikan di masa depan.

Orientasi ini juga menjadi pemandu dalam ekonomi pembangunan Islam untuk menghindari ketimpangan dan kemiskinan. Meskipun terjadi peningkatan secara keseluruhan dalam kualitas hidup (pendapatan/PDB), namun peningkatan ketimpangan antar manusia bukanlah proses pembangunan yang sesuai dengan orientasi dalam Islam. Dalam model pembangunan Islam, keadilan memainkan peran penting. Keadilan membantu mencegah timbulnya konflik dan perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Orientasi ini juga mendorong sistem ekonomi pembangunan Islam untuk lebih mengutamakan upaya pengentasan kemiskinan sebelum melakukan pembangunan pada aspek lainnya.

3. *Falah-oriented*

Orientasi berikutnya dalam ekonomi pembangunan Islam adalah *falah*. Secara harfiah, *falah* dapat diartikan sebagai kemenangan. Namun, dalam konteks ini, kemenangan merujuk pada kemenangan sejati, yaitu kemenangan baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Berdasarkan prinsip ini, orientasi pembangunan dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek dunia semata, melainkan juga sangat mempertimbangkan aspek akhirat atau keridaan Allah Swt.

Pembangunan tidak boleh semata-mata bermanfaat bagi manusia, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Orientasi *falah* mendorong proses pembangunan yang mendukung prinsip-prinsip *sustainable development* dan *environmental-friendly development*. Dalam Islam, pembangunan bukan hanya tentang keberlanjutan di dunia semata, melainkan juga di akhirat. Etika yang terbentuk dalam proses pembangunan tidak hanya

mencakup etika kebaikan universal, tetapi juga etika yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.

Jika dipertimbangkan dalam konteks model ekonomi Islam, orientasi ini merupakan manifestasi dari prinsip perlindungan agama dan keturunan dalam maqashid syariah. Pembangunan berkelanjutan mencerminkan perlindungan terhadap keturunan, sementara kesesuaian dengan syariat mencerminkan perlindungan terhadap agama. Dalam pemahaman yang lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa orientasi pembangunan juga berkontribusi pada pemeliharaan dan pengembangan agama. Dalam ekonomi pembangunan Islam, agama tidak hanya berperan sebagai panduan, tetapi juga dapat menjadi objek dari pembangunan itu sendiri, sehingga kedua peran tersebut dapat berjalan bersamaan.

3.5. Tujuan Pembangunan Dalam Islam

Setelah memahami orientasi ekonomi pembangunan Islam, kita akan menggabungkan tujuan dari pembangunan ekonomi menurut Islam. Pengklasifikasian ini didasarkan pada model pembangunan sesuai maqashid al syariah dan orientasi ekonomi pembangunan Islam yang telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat empat tujuan utama dalam ekonomi pembangunan Islam.

1. Menjamin kebutuhan dasar manusia

Semua manusia memiliki kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup, seperti yang sudah menjadi pengetahuan umum. Kebutuhan dasar ini, juga dikenal sebagai kebutuhan primer atau mendasar, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, tujuan dari proses pembangunan Islam harus memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan tersebut. Dalam konteks model pembangunan berdasarkan maqashid syariah,

terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut merupakan perlindungan harta. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa tujuan ini saling bergantung dengan tujuan maqashid syariah lainnya dan tidak berdiri sendiri.

Hubungan ini juga tercermin dalam model dimensi kesatuan yang diajukan Chapra. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar merupakan syarat yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk pembangunan dalam Islam. Paradigma ini juga menjadi lebih umum dalam model pembangunan modern. Saat ini, pembangunan lebih menekankan pada penggabungan tujuan material dengan aspek kesejahteraan manusia lainnya.

2. Meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia

Sesuai dengan orientasi pembangunan Islam yang menekankan pada peningkatan kualitas manusia, tujuan kedua ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan kemampuan dan martabat manusia. Setelah memenuhi tuntutan mendasar, prioritas selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan tambahan dan penunjang lainnya. Namun, memenuhi kebutuhan dasar tidak berarti harus dikejar secara berlebihan. Dalam paradigma ekonomi Islam, kebutuhan dasar harus dipenuhi secara ideal dan seimbang, karena dalam model pembangunan ekonomi Islam, semua dimensi maqasid syariah saling bergantung dan saling mendukung.

3. Menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang

Dalam ajaran Islam, ditekankan bahwa tujuan pembangunan tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga jangka menengah dan jangka panjang. Prinsip ekonomi pembangunan Islam menekankan bahwa pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dalam satu periode tertentu, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan

nilai ekonomi di masa depan. Tujuan ekonomi pembangunan Islam sejalan dengan paradigma pembangunan kontemporer, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, tujuan pembangunan ekonomi Islam yang ketiga ini juga sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang melindungi keturunan.

4. Menumbuhkan dan menjamin spiritualitas

Orientasi ekonomi pembangunan Islam yang mencakup dimensi dunia akhirat menyebabkan salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi dalam Islam adalah memastikan pertumbuhan dan pemeliharaan spiritualitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi agama. Dalam pandangan Islam, agama berperan sebagai panduan dan objek pembangunan, yang membantu melindungi kepentingan manusia. Memenuhi kebutuhan untuk berpraktik agama dianggap sebagai hak asasi yang penting.

Tujuan ini juga terkait dengan subjective well-being (kesejahteraan subjektif), di mana pemenuhan nilai-nilai suci (sacred values) dari agama dianggap sebagai sumber kebahagiaan dan ukuran kesuksesan tindakan. Dengan demikian, pemenuhan ketaatan terhadap syariat dalam kehidupan dianggap sebagai faktor penting dalam menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Tujuan pembangunan dalam Islam adalah menciptakan kebebasan dan kebahagiaan bagi manusia, di mana pemenuhan kebutuhan spiritual menjadi salah satu aspek utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2014). Introduction to Islamic economics: Theory and application. John Wiley & Sons.
- Beik, I., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah (ed. Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2009). Ethics and economics: An Islamic perspective. *Islamic Economic Studies*, Vol. 16(1), pp 1-24.
- Chapra, M. U. (2008). Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world? *The Journal of Socio- Economics*, Vol. 37(2), pp 836-863.
- Chapra, M. U. (1993). *Islam and Economic Development*. IRTI-IDB. Islamabad, Pakistan.
- Huda, N., Rifaldi, I., Alhifni, A., El Hasan, S. S., Afrianti, S., & Noer, T. F. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kahf, M. (1991). *The Economic Role of State in Islam*. CERT Publication. Kuala Lumpur.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). *Islam and the path to human and economic development*. Springer.

BAB 4

ALAT UKUR PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

Oleh Tri Wahyu Rejekiningsih

4.1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi perspektif Islam meliputi material dan spiritual, untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial, budaya dan yang lain. Pembangunan di sisi material dan spiritual diintegrasikan pada pembangunan ekonomi. Konsep Islam sebagai agama yang menyeluruh, sehingga pembangunan dalam Islam harus memiliki dampak yang menyeluruh.

Pembangunan menurut Islam apabila pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya manusia dengan mendasarkan kepada nilai-nilai akhlak al-karimah sebagaimana Allah SWT telah tetapkan. Nilai akhlak al-karimah ini menjadi pembeda antara konsep pembangunan Islam dengan pembangunan konvensional.

Dalam mengukur suatu pembangunan ekonomi akan terkait dengan masalah perubahan yang ada di masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: sosial, kelembagaan, dan perilaku masyarakat. Semua perubahan tersebut menjadi indikator penting dalam pembangunan ekonomi. Ekonomi Islam, sebagaimana ekonomi konvensional, yang melihat pembangunan adalah suatu proses komprehensif dari semua aspek dalam kehidupan. Oleh karena itu, Indikator dalam pembangunan ekonomi Islam diturunkan dari *maqashid syariah, sebagai tujuan* pembangunan.

Indikator pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam dikembangkan dengan menambahkan aspek spritualitas pada indikator pembangunan ekonomi konvensional, yaitu aspek materialitas dan fisik. Fokus pembangunan ekonomi dengan prinsip Islam adalah pada aspek spiritualitas. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran terhadap aspek spiritualitas dalam pembangunan ekonomi Islam.

Dalam menganalisis tingkat pembangunan ekonomi Islam di suatu negara, diperlukan indikator yang terukur. Terdapat beberapa manfaat atas indikator pembangunan ini, yaitu: *pertama*, dapat diketahui tingkat perkembangan perekonomian negara. *Kedua*, dapat melakukan analisis ekonomi untuk menentukan kebijakan. *Ketiga*, dapat dipakai untuk memperbandingkan tingkat pembangunan antar negara. *Keempat*, untuk mendefinisikan variasi pembangunan di masing-masing negara.

4.2. Indikator Dalam Pembangunan Menurut Islam

4.2.1 Indeks KeIslaman Ekonomi (*Economic Islamicity Index, EI2*)

Kajian tentang indeks ke-Islaman ekonomi (*economic Islamicity index*) dilatarbelakangi oleh kondisi polarisasi diantara para ekonom barat akibat dari penelitian-penelitian yang menghubungkan agama dengan ekonomi. Ada perbedaan diantara ekonom dalam melihat agama, yaitu sebagai variabel dependen atau variabel independen. Apabila agama menjadi variabel dependen, artinya pembangunan ekonomi mempengaruhi tingkat kehidupan beragama. Sebaliknya jika agama menjadi variabel independen, artinya tingkat kehidupan beragama mempengaruhi pembangunan dan yang lain.

Indeks KeIslaman Ekonomi (EI2) yang telah diperluas oleh (Rehman & Askari, 2010a) dari indeks keIslaman (*Islamicity Index*). EI2 mengukur tingkat

kesesuaian antara pencapaian indikator-indikator pembangunan dengan prinsip ekonomi Islam. Indikator-indikator EI2 diturunkan dari sistem ekonomi Islam dengan tujuan utama, yaitu:

1. Keadilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
2. Kemakmuran berbasis luas dengan ketersediaan lapangan kerja,
3. Praktik ekonomi dengan keuangan Islam.

Ketiga tujuan utama tersebut kemudian dikembangkan menjadi prinsip dasar ekonomi yang berjumlah 12, yaitu:

1. Ada kesempatan dan kebebasan berekonomi,
2. Keadilan yang meliputi semua sektor ekonomi,
3. Perlindungan terhadap pekerja termasuk kemudahan memperoleh pekerjaan dan kesetaraan dalam bekerja,
4. Anggaran pendidikan yang tinggi, dan ada kesetaraan dalam memperoleh pendidikan,
5. Mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok manusia, dengan mengurangi kemewahan konsumsi,
6. Pemerataan atas kekayaan dan pendapatan,
7. Perpajakan yang berkeadilan sosial,
8. Tabungan dimanfaatkan untuk menambah investasi,
9. Kejujuran, dan kepercayaan menjadi dasar berinteraksi dalam ekonomi,
10. Keuangan syariah I: sistem keuangan dengan meniadakan spekulasi,
11. Keuangan syariah II: sistem keuangan dengan meniadakan tingkat bunga,
12. Perdagangan, bantuan luar negeri, dan pelestarian lingkungan, serta kewaspadaan negara mengawasi pasar.

Perhitungan EI2 menggunakan 12 prinsip dasar ekonomi Islam tersebut, yang dinamai dimensi (A-L). Dari dimensi yang ada menunjukkan kategori ini dibagi menjadi beberapa sub-kategori. Sub-kategori ini merupakan indikator yang ingin dicapai dalam pembangunan dengan prinsip Islam.

Tabel 4.1.
Dimensi, Kategori, dan Sub Kategori Ekonomi Islam

Dimensi	Kategori	Sub Kategori
A	Ada kesempatan dan kebebasan berekonomi.	a. Kesamaan gender. b. Tanpa ada diskriminasi. c. Struktur pasar tenaga kerja. d. Kemudahan berbisnis. e. Kebebasan berekonomi. f. Kebebasan pasar.
B	Keadilan yang meliputi semua sektor ekonomi.	a. Hak properti dan kontrak.
C	Perlindungan terhadap pekerja termasuk kemudahan memperoleh pekerjaan dan kesetaraan dalam bekerja.	a. Kesamaan akses dan ketersediaan pekerjaan.
D	Anggaran pendidikan yang tinggi, dan ada kesetaraan dalam memperoleh pendidikan.	a. Tingkat pendidikan. b. Anggaran pendidikan. c. Kesamaan memperoleh pendidikan. d. Pendidikan yang tepat guna.
E	Mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok manusia, dengan mengurangi kemewahan konsumsi.	a. Tingkat kemiskinan. b. Ketersediaan pelayanan kesehatan. c. Besaran sumbangan.
F	Pemerataan atas kekayaan dan	Belum ada proksi yang sesuai, sementara

	pendapatan.	menggunakan Gini rasio.
G	Perpajakan yang berkeadilan sosial.	a. Keleluasaan sektor fiskal. b. Besaran pajak. c. Sistem perpajakan. d. Kemandirian pemerintah.
H	Tabungan dimanfaatkan untuk menambah investasi.	a. Pengeluaran ekonomi yang berkualitas. b. Jumlah tabungan.
I	Kejujuran, dan kepercayaan menjadi dasar berinteraksi dalam ekonomi.	a. Keterbukaan internasional. b. Nilai korupsi.
J	Keuangan syariah I: sistem keuangan dengan meniadakan spekulasi.	a. Keleluasaan berinvestasi. b. Perbankan. c. Peluang di pasar keuangan. d. Arus investasi, portofolio, dan modal.
K	Keuangan syariah II: sistem keuangan dengan meniadakan tingkat bunga.	a. Ketiadaan tingkat bunga.
L	Perdagangan, bantuan luar negeri, dan pelestarian lingkungan, serta kewaspadaan negara mengawasi pasar.	a. Kondisi ekonomi makro. b. Keberhasilan pembangunan ekonomi. c. Globalisasi dalam perdagangan. d. Tingkat kesejahteraan.

Sumber: (Rehman & Askari, 2010a)

Untuk perhitungan EI2, masing-masing dimensi dan sub-kategori diberikan bobot yang sama. Dari setiap Sub-kategori tersebut kemudian diturunkan ada sekitar 113 proksi dari indikator pembangunan

ekonomi menurut perspektif Islam. Selanjutnya proksi indikator tersebut mewakili variabel terukur untuk EI2, yang berasal dari database ekonomi dan sosial. Proksi indikator ini dikatakan masih belum merupakan indikator yang ideal, sehingga masih terbuka untuk dilakukan penyempurnaan.

Tabel 4.2. Proksi Indikator EI2

Dimensi	Kategori	Sub Kategori	Proksi
A	Ada kesempatan dan kebebasan berekonomi.	Kesamaan gender.	1. Tingkat Aktivitas Ekonomi Perempuan (% usia 15 tahun ke atas).
			2. Indeks Peringkat Ukuran Pemberdayaan Gender.
		Tanpa ada diskriminasi.	3. Indeks Penghapusan Segala bentuk diskriminasi rasial.
	Struktur pasar tenaga kerja.		4. Indeks Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
			5. Indeks Kebebasan Ekonomi Dunia tentang Dampak Upah Minimum.
			6. Indeks Praktik Perekrutan dan Pemecatan.
			7. Indeks Kebebasan Ekonomi Dunia bagi Angkatan Kerja dengan Upah Ditetapkan

	Melalui Perundingan Bersama.
	8. Indeks Tunjangan Pengangguran.
	9. Indeks Kebebasan Tenaga Kerja Dunia.
Kemudahan berbisnis.	10. Peringkat Memulai Bisnis.
	11. Peringkat Menangani Lisensi.
	12. Pemeringkatan Mempekerjakan Pekerja.
	13. Pemeringkatan Pendaftaran Properti.
	14. Peringkat Mendapatkan Kredit.
	15. Peringkat Melindungi Investor yang Membayar Pajak.
	16. Pemeringkatan Perdagangan Lintas Batas.
	17. Pemeringkatan Penegakan Kontrak.
	18. Peringkat Penutupan Bisnis.
Kebebasan berekonomi.	19. Indeks Pengendalian Harga Dunia.
	20. Indeks Beban

		Kebebasan pasar.	Regulasi. 21. Indeks Waktu Birokrasi Pemerintah. 22. Indeks Kebebasan dalam Memulai Bisnis Baru. 23. Indeks Kebebasan untuk Pembayaran Tidak Teratur. 24. Indeks Kebebasan Bisnis. 25. Indeks Kebebasan Moneter. 26. Indeks Perlindungan Kekayaan Intelektual.
B	Keadilan yang meliputi semua sektor ekonomi.	Hak properti dan kontrak.	27. Indeks Kebebasan Hak Milik.
C	Perlindungan terhadap pekerja termasuk kemudahan memperoleh pekerjaan dan kesetaraan dalam bekerja.	Kesamaan akses dan ketersediaan pekerjaan.	28. Indikator Pengangguran (% Dari Total Angkatan Kerja). 29. Indikator Angkatan Kerja Perempuan (% dari Total Angkatan Kerja).
D	Anggaran pendidikan	Tingkat pendidikan.	30. Indeks Pendidikan. 31. Indeks

	yang tinggi, dan ada kesetaraan dalam memperoleh pendidikan.	Anggaran pendidikan.	Pengeluaran Publik untuk Pendidikan (% dari PDB).
			32. Indeks Pengeluaran Publik untuk Pendidikan (% dari Total Belanja Pemerintah).
		Kesamaan memperoleh pendidikan.	33. Indikator Rasio Anak Perempuan dan Laki-Laki di Pendidikan Dasar dan Menengah (%).
		Pendidikan yang tepat guna.	34. Indikator Angka Melek Huruf, Jumlah Orang Dewasa (% Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas).
E	Mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok manusia, dengan mengurangi kemewahan konsumsi.	Tingkat kemiskinan.	35. Indikator Prevalensi Malnutrisi, Tinggi Badan Menurut Usia (% Anak Di Bawah 5 Tahun) + Indikator Prevalensi Gizi Buruk, Berat Badan Menurut Umur (% Anak Balita 5 Tahun).
		Ketersediaan pelayanan kesehatan.	36. Indeks Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun).
			37. Indeks Pengeluaran Kesehatan Per Kapita (PPP US\$).

Besaran
sumbangan.

- 38.** Indeks Dokter (Per 100.000 Orang) dari PBB + Indeks Dokter (Per 100.000 Orang) dari Bank Dunia.
- 39.** Indeks Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan (% PDB).
- 40.** Indeks Pengeluaran Kesehatan Masyarakat (% dari PDB).
- 41.** Indeks Kasus Tuberkulosis - Prevalensi (Per 100.000 Orang).
- 42.** Indikator Pengeluaran Kesehatan Per Kapita (US\$ Saat Ini).
- 43.** Indikator Pengeluaran Swasta untuk Kesehatan, (% PDB).
- 44.** Indikator Pengeluaran Publik untuk Kesehatan, (% PDB).
- 45.** Indikator Pengeluaran Total untuk Kesehatan, (% PDB).
- 46.** Indikator Bantuan (% Pengeluaran
-

Pemerintah Pusat).			
F	Pemerataan atas kekayaan dan pendapatan.	Belum ada proksi	Sementara menggunakan Gini rasio.
G	Perpajakan yang berkeadilan sosial.	Keleluasaan sektor fiskal. Besaran pajak. Sistem perpajakan.	47. Indeks Kebebasan Fiskal 48. Indeks Tarif Pajak Penghasilan Marginal Tertinggi (dan Ambang Batas Penghasilan di Tempat Penerapan). 49. Indeks Tarif Pajak Penghasilan dan Penghasilan Marginal Tertinggi (dan Ambang Batas Penghasilan di mana Tarif Pajak Penghasilan Marginal Tertinggi Berlaku). 50. Indikator Tarif Pajak Marginal Tertinggi, Tarif Korporasi (%). 51. Indikator Tarif Pajak Marginal Tertinggi dari Perorangan (atas Pendapatan yang Melebihi, US\$). 52. Indikator Tarif Pajak Marginal Tertinggi dari Tarif Perorangan (%). 53. Indikator Pajak Lainnya (%)

			Pendapatan). 54. Indikator Pajak Pendapatan, Laba dan Perolehan Modal (% Pendapatan). 55. Indikator Pajak Pendapatan, Laba dan Perolehan Modal (% dari Total Pajak). 56. Indikator Total Hutang Pajak Badan Usaha (% Laba Kotor). 57. Indikator Pendapatan Pajak (% PDB) + Indikator Belanja Nasional Bruto (% PDB). 58. Indeks Kebebasan Ekonomi dari Pemerintah.
H	Tabungan dimanfaatkan untuk menambah investasi.	Pengeluaran ekonomi yang berkualitas.	59. Indeks Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Umum sebagai % dari Total Konsumsi. 60. Indeks Perusahaan Pemerintah dan Investasi sebagai % dari Total Investasi. 61. Indikator Penghematan yang Disesuaikan: Penipisan Energi (% dari GNI).

			62. Indikator Investasi Swasta di Bidang Energi (US\$ Saat Ini). 63. Indikator Investasi Swasta di Telekomunikasi (US\$ Saat Ini). 64. Indikator Investasi Swasta di Bidang Transportasi (US\$ saat ini). 65. Indikator Investasi Swasta di Bidang Air Minum dan Sanitasi (US\$ saat ini). 66. Indikator Subsidi dan Transfer Lainnya (% dari Biaya). 67. Indikator Transfer dan Subsidi sebagai % dari PDB. 68. Indikator Subsidi dan Transfer Lainnya (LCU Saat Ini). 69. Indikator Tabungan yang Disesuaikan: Tabungan Nasional Bersih (% dari GNI).
	Jumlah tabungan.		
I	Kejujuran, dan kepercayaan menjadi dasar	Keterbukaan internasional.	70. Indeks Persepsi Korupsi Internasional (CPI).

	berinteraksi dalam ekonomi.	Nilai korupsi.	71. Indeks Kebebasan dari Korupsi.
J	Keuangan syariah I: sistem keuangan dengan meniadakan spekulasi.	Keleluasaan berinvestasi. Perbankan.	72. Indeks Kebebasan Investasi. 73. Indeks Kebebasan Finansial. 74. Indeks Kebebasan Memiliki Rekening Bank Mata Uang Asing di Dalam Negeri dan Luar negeri. 75. Indeks Perbedaan Antara <i>official</i> Nilai Tukar dan Nilai Pasar Gelap. 76. Indeks Kepemilikan Asing/Pembatasan Investasi. 77. Indeks Pembatasan Kebebasan Ekonomi. 78. Kebebasan Warga Negara untuk Melakukan Pertukaran di Pasar Modal dengan Orang Asing. 79. Indeks Kepemilikan bank. 80. Indeks Persaingan Kebebasan Ekonomi. 81. Indeks Perpanjangan Kredit.

	82. Indeks Pengendalian Suku Bunga/Suku Bunga Riil Negatif.
	83. Indeks Infrastruktur Informasi Keuangan.
	84. Indikator Kekuatan Penghasilan Berulang, %.
	85. Indikator Modal Bank terhadap Aset (%).
Peluang di pasar keuangan.	86. Indeks Risiko Pasar Keuangan Negara.
Arus investasi, portofolio, dan modal.	87. Indikator Kredit Domestik kepada Sektor Swasta (% PDB).
	88. Indikator Investasi Asing Langsung, Arus Masuk Bersih (% dari PDB).
	89. Indikator Investasi Asing Langsung, Arus Keluar Bersih (% dari PDB).
	90. Indikator Arus Modal Swasta Bruto (% dari PDB).
	91. Indikator Investasi Portofolio, Tidak Termasuk LCFAR (BOP, US\$ Saat Ini).
	92. Indikator Investasi Portofolio, Obligasi

			(PPG + PNG) (NFL, US\$ Saat Ini).
			93. Indikator Investasi Portofolio, Ekuitas (DRS, US\$ Saat Ini).
			94. Indikator Total Nilai Saham yang Diperdagangkan (% PDB).
K	Keuangan syariah II: sistem keuangan dengan meniadakan tingkat bunga.	Ketiadaan tingkat bunga.	95. Data Pendapatan/Aset Non- Bunga, (%).
L	Perdagangan, bantuan luar negeri, dan pelestarian lingkungan, serta kewaspadaan negara mengawasi pasar.	Kondisi ekonomi makro.	96. Indeks Pertumbuhan Uang. 97. Indeks Deviasi Standar Inflasi. 98. Indeks Tingkat Inflasi (Tahun Terakhir). 99. Indikator Total Pembayaran Utang (% Ekspor Barang, Jasa dan Pendapatan). 100. Indikator Pelayanan Utang Multilateral (% Publik dan Pembayaran Hutang Publik yang Dijamin). 101. Indikator Hutang Jangka Panjang (DOD, US\$

	Saat Ini).
Keberhasilan pembangunan ekonomi.	102. Indeks Pembangunan Manusia (HDI).
Globalisasi dalam perdagangan.	103. Indeks Pajak Perdagangan Internasional
	104. Indeks Tingkat Tarif Rata-Rata.
	105. Indeks Tarif Standar Deviasi
	106. Indeks Hambatan Perdagangan Non-Tarif.
	107. Indeks Kepatuhan biaya impor dan ekspor
	108. Indeks Ukuran Sektor Perdagangan Relatif terhadap yang Diharapkan.
	109. Indikator Permohonan Paten, Bukan Penduduk.
	110. Indikator Permohonan Paten, Penduduk.
	111. Indikator Pajak Perdagangan Internasional (% Pendapatan).
	112. Indikator Perkembangan PDB (%) Tahunan.
Tingkat kesejahteraan.	113. PDB Per Kapita (Dalam \$).

Perbandingan atas capaian Indeks keIslaman Ekonomi di beberapa kelompok negara dapat memperkaya wawasan terkait dengan pembangunan. Berdasarkan Hasil penelitian (Rehman & Askari, 2010a) dengan pemeringkatan tersebut, menemukan bahwa capaian peringkat kelompok negara OECD ialah 24, kelompok negara berpenghasilan tinggi ialah 60, dan rata-rata 133 untuk negara OKI. Hasil peringkat EI2 yang tinggi di negara-negara industri maju ini sebagaimana Islam menganjurkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pengelolaan ekonomi yang baik, dan hasil akhir dari kinerja ekonomi yang terukur.

4.2.2 Indeks Zakat Nasional

Dalam sistem ekonomi Islam, maka zakat merupakan bagian yang tak terpisahkan. Salah satu indikator pembangunan yang telah dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis Baznas, yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN). Indeks Zakat Nasional ini sebagai ukuran standar untuk pengelolaan zakat nasional atau ukuran kinerja perkembangan zakat nasional.

Dimensi makro dan mikro adalah dimensi Indeks Zakat Nasional. Dimensi makro dijelaskan dengan tiga indikator meliputi: peraturan, alokasi anggaran dari pemerintah untuk zakat, dan Basis data lembaga zakat resmi muzakki dan mustahik. Untuk dimensi mikro dijelaskan menggunakan dua indikator, yaitu kelembagaan dan dampak zakat. IZN dihitung menggunakan metode *multi-stage weighted index*. Angka IZN akan berkisar antara 0,00 – 1,00. Semakin mendekati 0 nilai IZN berarti semakin buruk kinerja perzakatan nasional, dan semakin mendekati 1 nilai IZN semakin bagus kondisi perzakatan.

Tabel 4.3.
Bobot Kontribusi Komponen Indeks Zakat Nasional

Dime- n-si	Bobot Kontr i-busi	Indika- tor	Bobot Kontrib usi	Variabel	Bobot Kontrib usi
Makro (X_1)	0,40	Peraturan (X_{11})	0,30	Peraturan	1,00
		Alokasi APBN (X_{12})	0,40	Alokasi APBN	1,00
		Basis data Lembaga Zakat (X_{13})	0,30	Basis data jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzzaki dan mustahik (X_{131})	0,33
				Rasio muzakki individu (X_{132})	0,33
				Rasio muzzaki badan (X_{133})	0,33
				Pemunguta n (X_{211})	0,30
Mikro	0,60	Institusio nal (X_{21})	0,40	Pengendali an (X_{212})	0,20
				Pembagian (X_{213})	0,30

(X_2)		Pemberita hu-an (X_{214})	0,20
Pengaruh Zakat (X_{22})	0,60	Kemakmuran material dan spiritual (indeks kemakmuran CIBEST) (X_{221})	0,40
		Pendidikan dan kesehatan (mengubah IPM) (X_{222})	0,40
		Swadaya (X_{223})	0,20

Sumber: (BAZNAS, 2020)

Perubahan bobot untuk menghitung nilai IZN dengan mendasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Pusat Kajian Strategis Baznas Nomor 07/SK/PUSKAS-Baznas/II/2020.

$$IZN = 0,40X_1 + 0,60X_2$$

Dimana:

- IZN : indeks zakat nasional
- X_1 : dimensi makro
- X_2 : dimensi mikro

Adapun formulasi indeks dimensi makro ialah:

$$X_1 = 0,30X_{11} + 0,40X_{12} + 0,30X_{13}$$

Dimana:

- X_1 : indeks dimensi makro
- X_{11} : indeks indikator peraturan
- X_{12} : indeks indikator alokasi APBN/APBD

X_{13} : indeks indikator basis data lembaga zakat

Cara perhitungan indeks indikator basis data lembaga zakat ialah sebagai berikut:

$$X_{13} = 0,33X_{131} + 0,33X_{132} + 0,33X_{133}$$

Dimana:

X_{13} : indeks indikator basis data lembaga zakat

X_{131} : indeks variabel jumlah lembaga zakat resmi

X_{132} : Indeks variabel rasio jumlah muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga muslim

X_{133} : indeks variabel rasio jumlah muzaki badan terhadap jumlah badan usaha

Untuk dimensi mikro memiliki formulasi berikut:

$$X_2 = 0,40X_{21} + 0,60X_{22}$$

Dimana:

X_2 : Indeks dimensi mikro

X_{21} : Indeks indikator institusional

X_{22} : Indeks indikator pengaruh zakat

Indeks indikator institusional diformulasikan berikut:

$$X_{21} = 0,30X_{211} + 0,20X_{212} + 0,30X_{213} + 0,20X_{214}$$

Dimana:

X_{21} : indeks indikator institusional

X_{211} : indeks variabel pemungutan

X_{212} : indeks variabel pengendalian

X_{213} : indeks variabel pembagian

X_{214} : indeks variabel pemberitahuan

Indeks indikator pengaruh zakat ada perubahan pembobotan untuk formula perhitungan, menjadi:

$$X_{22} = 0,40X_{221} + 0,40X_{222} + 0,20X_{223}$$

Dimana:

X_{22} : indeks indikator dampak zakat

X_{221} : indeks variabel kemakmuran CIBEST (material dan spiritual)

X_{222} : indeks variabel tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan (dengan mengubah IPM)

X_{223} : indeks variabel Swadaya.

4.3. Kesimpulan

Tujuan ekonomi syariah dalam implementasinya adalah untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tercipta berdasarkan nilai-nilai Islam. Membangun dan menciptakan rasa keadilan yang menyeluruh dan universal di semua kalangan. Tidak berlaku kekangan terhadap individu secara berlebihan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi: tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma'ad (hasil).

Dalam Islam, Negara berperan aktif dengan membuat aturan dan pengawasan ekonomi, untuk memastikan persaingan di pasar berlangsung sempurna, pemerataan informasi dan berkeadilan ekonomi. Islam memberikan kontribusi yang nyata pada pembangunan ekonomi nasional, melalui aplikasi pada sektor keuangan (bank dan non-bank), sumber daya manusia, kehidupan sosial, badan amil zakat, infak & sedekah nasional, dan pemerintah tentunya. Kontribusi ini berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi nasional, sehingga akan terwujud kesejahteraan dan keadilan untuk mencapai *falah*.

Chapra menyediakan bahan pemikiran bagi para ekonom berorientasi sekuler dengan menunjukkan relevansi dan penerapan strategi Islam dalam memberikan alternatif terbaik untuk menangani semua berbagai masalah jangka pendek dan jangka panjang. Chapra berhipotesis bahwa perkembangan material dengan keadilan dan stabilitas tidak mungkin tanpa perkembangan moral. Namun Chapra juga mengatakan bahwa

mengalihkan lokus pengaruh intelektual dari sistem pasar bebas ke sistem Islam bukanlah pekerjaan mudah (Khan, 1994).

Bahwa sebagai ajaran penting Islam tentang apa yang membentuk masyarakat Islam dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam meliputi: penghargaan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, kerja keras, kesempatan yang sama untuk berkembang, tidak adanya korupsi, tidak ada pemborosan dan penimbunan, praktik bisnis yang etis, pasar yang berfungsi dengan baik, otoritas politik yang sah. Pengadopsian dan penerapan sistem ekonomi Islam harus menghasilkan ekonomi yang berkembang. Sayangnya, sebagian besar negara-negara Islam yang mendeklarasikan diri sendiri belum menggunakan kebijakan ekonomi dan keuangan seperti yang dikehendaki ajaran Islam. Oleh karena itu, ajaran-ajaran tersebut harus menjadi dasar untuk menilai pretensi masyarakat terhadap keIslaman (Rehman & Askari, 2010b).

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, M., H. (2013). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies*, Vol. 19 No.2, Life 1, 69-95.
- Dilnawaz A. Siddiqui. (1987). Human Resources Development: A Muslim World Perspective. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 4(2), 11.
- Khan, S. A. (1994). Islam and Economic Development. *American Journal of Islam and Society*, 11(3), 441-443. <https://doi.org/10.35632/ajis.v11i3.2422>
- Necati Aydin. (2017). Islamic versus conventional human development index: empirical evidence from ten Muslim countries. *International Journal of Social Economics*, 2-40.
- Rehman, S. S., & Askari, H. (2010a). An economic Islamicity Index (EI2). *Global Economy Journal*, 10(3). <https://doi.org/10.2202/1524-5861.1680>
- Rehman, S. S., & Askari, H. (2010b). How Islamic are Islamic countries? *Global Economy Journal*, 10(2). <https://doi.org/10.2202/1524-5861.1614>
- Tawfik, O. I., & Osman Bilal, Z. (2020). الاقتصاد الإسلامي: دور عبد الله عز وجل في التنمية الاقتصادية الإسلامية - 24، ع 3 ص: 3122 / ص 4-74 - (2543) ك ه ا تحديدات و الفرص: يطان يابرفي إلى سال مي ئال تموي أمد م مهدي افي بمو و عبد الله قاد رحسين شاشي 2 (3) م عهد . *JKAU: Islamic Econ*, 33(1), 101-116. <https://doi.org/10.4197/Islec>

United Nations. (2015). The Millennium Development Goals Report. *United Nations*, 72. <https://doi.org/978-92-1-101320-7>

Rama, & Yusuf. (2019). Construction of Islamic Human Development Index. *JKAU: Islamic Econ.*, Vol. 32 No. 1, Pp: 43-64 (January 2019), 32(1), 43–64.

BAB 5

KEMISKINAN PERSPEKTIF ISLAM

Oleh Ickhsanto Wahyudi

5.1. Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah global dan fenomena yang harus ditangani di negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Muslim. Data statistik menunjukkan bahwa di Indonesia, puluhan juta orang hidup di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan yang sangat terbatas, bahkan tidak mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari. Angka kemiskinan ini mencerminkan tantangan serius yang harus diatasi. Dalam pandangan Islam, kemiskinan dianggap sebagai ketidakberuntungan yang dapat disebabkan oleh faktor internal seperti malas bekerja atau boros, serta faktor eksternal seperti bencana alam, wabah penyakit, peperangan, dan ketidakadilan sistem distribusi kekayaan. Dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai ujian atau cobaan dari Allah SWT yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Kemiskinan adalah isu sosial yang kompleks dan mengkhawatirkan.

Dalam Al-Quran, kemiskinan dianggap sebagai bentuk ketidakseimbangan atau ketidakadilan sosial yang harus diatasi melalui redistribusi kekayaan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Agama Islam menekankan pentingnya menangani kemiskinan dengan sungguh-sungguh. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman yang jelas tentang kewajiban umat Islam untuk membantu dan memberdayakan fakir miskin. Pemimpin dan penguasa juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya terpenuhi. Kegagalan dalam mengatasi kemiskinan dapat mencerminkan kelemahan kepemimpinan suatu negara.

Dalam usaha mengatasi akar masalah kemiskinan, Islam menawarkan berbagai solusi strategis dan komprehensif. Beberapa di antaranya meliputi penerapan sistem ekonomi dan

keuangan syariah yang adil dan merata, pengelolaan zakat dan wakaf yang produktif, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai, serta reformasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Dengan menerapkan ajaran-ajaran mulia Islam ini, diharapkan kemiskinan dapat diatasi dan kesejahteraan umat dapat meningkat secara signifikan. Farooq (1986) menyarankan bahwa ekonomi Islam dapat menghadapi tantangan kemiskinan melalui penggunaan instrumen seperti zakat, pembangunan ekonomi, dan program pengentasan kemiskinan. Dengan menghidupkan kembali prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mengintegrasikannya dengan tindakan praktis, diyakini bahwa langkah-langkah signifikan dapat diambil dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Ini sejalan dengan pendapat Hudaifah & Ajija (2016) yang membandingkan upaya pengentasan kemiskinan antara negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Asia dan negara-negara berpenduduk mayoritas non-Muslim di Amerika Latin. Kesimpulannya adalah upaya pengentasan kemiskinan di kedua kelompok negara telah menghasilkan hasil yang lebih baik, namun terdapat perbedaan dalam kebijakan dan program strategis yang diterapkan di antara kedua kelompok tersebut. Di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, konsep ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah memainkan peran penting, sementara negara-negara berpenduduk mayoritas non-Muslim cenderung menciptakan strategi yang lebih radikal dan kreatif seperti reforma agraria dan pengembangan industri pariwisata.

Perspektif Islam tentang kemiskinan menawarkan pendekatan holistik, yang menekankan pentingnya keadilan sosial, tanggung jawab individu, dan peran aktif masyarakat dalam memberantas kemiskinan. Dengan bersama-sama berkomitmen dalam menghadapi permasalahan ini, diharapkan kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat. Namun demikian upaya mengentaskan kemiskinan perlu diletakkan dalam

kerangka maqashid syariah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar umat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis persoalan kemiskinan dalam kaitannya dengan konsep maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariah dalam Islam. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat memprihatinkan dan melanggar tercapainya dua tujuan utama syariah, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan harta umat. Ketika sebagian besar umat Islam hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan, hal itu menunjukkan bahwa tujuan syariah untuk menjaga jiwa dan harta belum terpenuhi. Padahal keduanya merupakan kebutuhan dasar manusia agar dapat hidup layak dan bermartabat. Oleh karena itu, upaya mengentaskan kemiskinan menjadi keniscayaan demi mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kerangka maqashid syariah.

5.2. Pengertian Kemiskinan dalam Islam

Kemiskinan dalam Islam adalah keadaan seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti bencana alam, konflik, penyakit, dan ketimpangan ekonomi. Dalam ajaran Islam, kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial yang harus diselesaikan. Al-Qur'an dan Hadits banyak mengajarkan tentang pentingnya membantu orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Allah SWT dalam Al-Qur'an berbicara tentang kemiskinan dengan menggunakan berbagai istilah seperti *al-maskanah*, *du'afa*, dan *gharimin*.

Al-Quran menjelaskan isu kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam beberapa surah, seperti surah al-Mudatsir, surah al-Haqqah, surah adz-Dzariat, surah al-An'am, dan surah ar-Rum. Surah-surah ini mengingatkan kita tentang pentingnya peduli terhadap kaum dhuafa dan mengatasi masalah ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Allah SWT menegaskan kewajiban zakat dan mengingatkan kita untuk membantu orang-orang miskin dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Dari surah-

surah ini, kita diajak untuk merenung dan berbuat baik, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.

Hadis mengenai *al-faqr* menyoroti makna yang luas, mencakup kekurangan materi dan non-materi dalam perspektif Nabi. Al-faqr dan al-miskin memiliki konotasi yang sama, yaitu mereka yang tidak memiliki cukup materi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi berbeda dalam faktor penyebabnya, dimana faqr terkait dengan kelemahan fisik dan miskin lebih terkait dengan faktor struktural dan kultural. Islam menyediakan solusi beragam untuk mengatasi kemiskinan, melalui dorongan berusaha, perbaikan sistem ekonomi dengan larangan riba, dan memberikan bantuan instant seperti zakat, infak, dan sedekah, dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Hafid, 2011).

Secara bahasa, kemiskinan berarti ketiadaan harta, kekurangan, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dalam perspektif Islam, kemiskinan tidak hanya terkait dengan kondisi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek mental dan spiritual seseorang. Seorang individu mungkin memiliki kekayaan materi, namun tetap miskin dalam iman dan akhlaknya. Di sisi lain, orang yang memiliki keterbatasan harta bisa kaya dalam iman dan takwa

Menurut Sadeq (1997), dalam sumber-sumber Islam terdapat dua tingkat kemiskinan yang tersirat. Pertama, ada kemiskinan kronis yang sering disebut sebagai '*hardcore poverty*', yang tercermin dalam konsep 'faqir' dan 'miskin' dalam terminologi Islam. Kedua, ada kemiskinan rendah yang dapat disebut sebagai 'kemiskinan umum', yang tercermin dalam nisab zakat. Meskipun terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai konsep 'faqir' dan 'miskin', keduanya tetap merujuk pada kondisi kemiskinan. '*Faqir*' mengacu pada seseorang yang tidak memiliki rumah atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun tanggungannya.

Sedangkan 'miskin' mengacu pada kondisi yang serupa, tetapi mungkin dalam kondisi sedikit lebih baik daripada '*faqir*'. Kedua konsep tersebut menggambarkan tingkat kemiskinan yang ada dalam perspektif Islam dan menjadi dasar dalam menentukan upaya pengentasan kemiskinan melalui prinsip-prinsip zakat dan penanggulangan sosial lainnya.

Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kemiskinan sebenarnya bukanlah karena sedikitnya harta, melainkan lebih kepada kemiskinan jiwa. Artinya, seseorang yang memiliki sifat serakah, tamak, dengki, iri hati, sombong, dan angkuh, meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah, sebenarnya mengalami kemiskinan yang sejati. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa menyakiti perasaan si penerima. Allah mengingatkan kita untuk tidak mencari pujian atau kesan abai atas pemberian kita. Pahala bagi orang yang memberikan infak di jalan Allah akan ada di sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak perlu merasa khawatir atau bersedih hati.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa setiap individu yang mendapatkan perlindungan dan solidaritas dari masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mengatasi kemiskinan serta kesulitan hidup. Selain itu, ia juga bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam agar agama Allah SWT tegak dan dakwah kebenaran tersebar di seluruh dunia. Semua tindakan ini harus dilakukan tanpa mengharap imbalan atau prestasi atas pembayaran zakat. Konsep memberi dan berbagi dalam Islam memiliki makna mendalam dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, peduli, dan kompetitif (Adam, 2020).

Menurut Afzalurrahman, negara Islam bertanggung jawab menyediakan jaminan sosial dan kesempatan kerja bagi warganya agar terhindar dari kemiskinan (Aravik *et al.*, 2022). Menurut Chapra (1992), riba dan spekulasi dalam sistem ekonomi konvensional turut memperburuk kesenjangan sosial dan kemiskinan. Menurut Abbas Mirakhor, kemiskinan hanya bisa diatasi dengan membangun sistem redistribusi kekayaan yang adil melalui instrumen zakat dan wakaf (Aravik, Hamzani

and Khasanah, 2021). Menurut Akram Khan, kemiskinan juga harus ditangani dengan program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha (Majid, 2011).

Penulisan ini mengkaji perspektif Islam terhadap kemiskinan dan mengusulkan solusi-solusi Islami untuk mencapai kesejahteraan umat. Studi ini menggunakan metode penelitian studi literatur dan analisis kontekstual untuk menggali ajaran-ajaran Islam terkait kemiskinan dan menganalisis konteks sosial dan ekonomi terkini yang berkaitan dengan isu ini. Pendekatan studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber primer seperti Al-Quran dan Hadis Nabi, serta sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan makalah terkait. Data kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi konsep-konsep Islam tentang kemiskinan, peran zakat, infak-sedekah, dan prinsip ekonomi syariah dalam mengatasi masalah ini.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis kontekstual untuk memahami situasi kemiskinan di negara-negara Muslim terkini. Data ekonomi, sosial, dan kebijakan diidentifikasi dan dianalisis untuk menggambarkan konteks yang mempengaruhi kemiskinan dan tantangan yang dihadapi dalam mencari solusi yang relevan dan berdaya guna. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pandangan Islam tentang kemiskinan dan kontribusi solusi Islami dalam mengatasi permasalahan ini.

Studi ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat upaya mengakhiri kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

5.3. Penyebab Kemiskinan Menurut Islam

Menurut pandangan Islam, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kesalahan individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sistemik dan kebijakan yang tidak adil. Beberapa penyebab kemiskinan dalam perspektif Islam meliputi:

Tabel. 5.1
Penyebab Kemiskinan

No	Penyebab Kemiskinan	Penjelasan
1	Ketidakadilan distribusi sumber daya alam dan kekayaan negara	Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan sumber daya alam secara adil, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Jika distribusi ini tidak adil, maka kemiskinan dapat terjadi.
2	Korupsi pejabat negara	Praktik korupsi oleh pejabat negara menyebabkan pengalihan dana dan sumber daya yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang atau bahkan tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan
3	Riba dan sistem ekonomi non-syariah	Dalam Islam, riba dianggap haram dan merugikan masyarakat. Sistem ekonomi yang tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah bisa berpotensi menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi.
4	Kemalasan dan kurangnya etos kerja	Kurangnya semangat kerja dan rasa tanggung jawab dalam mencari nafkah dapat menyebabkan individu terjebak dalam kemiskinan.
5	Bencana alam dan wabah penyakit	Bencana alam dan wabah penyakit dapat merusak infrastruktur, menghancurkan mata pencaharian, dan meningkatkan tingkat

		pengangguran, sehingga berdampak negatif pada kondisi ekonomi masyarakat.
6	Lemahnya peran negara dan institusi zakat	Institusi zakat memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan, namun jika lemah atau tidak berfungsi dengan baik, maka potensi zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan tidak dapat dimaksimalkan.
7	Perilaku konsumtif dan boros	Kebiasaan konsumtif dan boros dapat menyebabkan individu menghabiskan pendapatan tanpa berpikir untuk menabung atau berinvestasi, yang akhirnya dapat menyebabkan kondisi keuangan yang buruk.

Islam menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak, dan jika hak ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakadilan dan kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mengatasi penyebab-penyebab kemiskinan ini dengan adil dan berkeadilan. Kemiskinan dalam pandangan Islam tidak hanya disebabkan oleh kesalahan individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sistemik dan kebijakan yang tidak adil.

Penyebab-penyebab ini harus diatasi untuk mencapai tujuan-tujuan Maqashid Syariah, seperti kesejahteraan umat, keadilan sosial, dan perlindungan nyawa dan harta benda. Dengan mengatasi penyebab kemiskinan, nilai-nilai Islam dapat

membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, peduli, dan berdaya saing sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

5.4. Solusi Mengatasi Kemiskinan

Islam menawarkan berbagai solusi strategis untuk mengatasi kemiskinan secara komprehensif. Solusi-solusi tersebut mencakup beragam aspek, seperti penerapan sistem ekonomi syariah, optimalisasi pengelolaan zakat, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, serta peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan umat. Dengan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam ini, diharapkan masalah kemiskinan dapat diminimalisir dan kesejahteraan umat dapat meningkat.

5.5. Penerapan Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah

Penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah yang menghindari riba dan transaksi haram sangat penting guna menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan mensejahterakan masyarakat. Selain itu, penegakan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan negara juga diperlukan agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya, tanpa ada kesenjangan yang ekstrem. Optimalisasi zakat, infak dan sedekah melalui lembaga pengelola seperti baitul maal dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif jika didistribusikan dengan tepat sasaran. Di sisi lain, pengembangan wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi umat melalui UMKM juga penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Tidak kalah penting, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan perlu dilakukan agar daya saing dan kesempatan kerja meningkat. Terakhir, gaya hidup sederhana dan menghindari sikap boros juga perlu diterapkan agar masyarakat lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dan terhindar dari jeratan utang.

Penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah yang menghindari riba dan transaksi haram sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) untuk menjaga harta (*hifzh al-mal*) agar terhindar dari praktik bathil dan mendatangkan maslahat bagi umat. Dengan sistem ekonomi syariah yang adil, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan sosial yang ekstrem sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

5.5.1. Distribusi Ekonomi

Pemerintah perlu memastikan bahwa pendapatan dan kekayaan negara didistribusikan secara adil dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Tidak boleh terjadi ketimpangan ekonomi yang ekstrem di mana sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi sistem perpajakan yang progresif, di mana tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi seiring dengan peningkatan pendapatan seseorang. Selain itu, subsidi dan bantuan sosial juga perlu direalisasikan dengan tepat sasaran agar benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat kurang mampu. Dengan penegakan keadilan distribusi yang baik, diharapkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan dapat dikurangi sehingga kesejahteraan seluruh rakyat meningkat.

Pemerataan dan keadilan distribusi pendapatan serta kekayaan negara merupakan manifestasi dari tujuan syariah untuk menegakkan keadilan (*'adl*). Dengan prinsip ini, negara memastikan seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati hasil kekayaan negara secara adil, bukan hanya segelintir elite politik dan ekonomi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan sosial yang menjadi akar penyebab kemiskinan.

5.5.2. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki potensi yang besar untuk membantu mengentaskan

kemiskinan jika dikelola dan didistribusikan dengan baik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengumpulan ZIS melalui lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS. Selain itu, pendistribusiannya harus tepat sasaran kepada mustahik yang berhak menerima. Data penerima ZIS perlu dikelola dengan baik agar bantuan tidak salah alamat. ZIS juga sebaiknya didayagunakan untuk memberikan modal usaha atau pelatihan ketrampilan, tidak hanya diberikan secara konsumtif. Dengan pengelolaan ZIS yang optimal, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok kurang mampu secara bertahap. ZIS bukan satu-satunya instrument, tetapi berperan penting melengkapi upaya pengentasan kemiskinan lainnya.

Optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah melalui lembaga resmi merupakan implementasi tujuan syariah untuk menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*). Dengan pendistribusian ZIS yang tepat sasaran, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar kaum dhuafa sehingga terhindar dari kelaparan dan kemiskinan ekstrem yang mengancam jiwa. ZIS merupakan instrumen syariah yang ampuh untuk pengentasan kemiskinan.

5.5.3. Wakaf

Wakaf produktif adalah pemanfaatan harta benda wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif. Tujuannya adalah agar harta wakaf tidak hanya menganggur tetapi dapat menghasilkan pendapatan bagi kepentingan umat. Misalnya, tanah wakaf dibangun gedung perkantoran atau ruko untuk disewakan. Hasil sewanya digunakan untuk membiayai pendidikan atau rumah sakit. Contoh lain, dana wakaf diinvestasikan ke sektor pertanian atau peternakan. Dengan wakaf produktif, harta wakaf menjadi berkembang dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi agar pengelolaan dan pengembangan

wakaf produktif dapat berjalan optimal, karena wakaf berpotensi menjadi sumber pembiayaan umat yang mandiri dan berkelanjutan.

Pengembangan wakaf produktif sejalan dengan tujuan syariah untuk mengembangkan harta (*tanmiah al-mal*) menjadi lebih bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Wakaf produktif menciptakan sumber dana umat yang mandiri dan berkelanjutan guna membiayai pengentasan kemiskinan dan pembangunan umat.

5.5.4. Pemberdayaan

Sektor riil seperti industri, perdagangan, dan jasa produktif perlu terus dikembangkan karena berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah ekonomi. Salah satu cara mengembangkan sektor riil adalah dengan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM umumnya padat karya sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan UMKM melalui kemudahan perizinan, akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran produk. UMKM juga perlu terus diberdayakan agar dapat berkembang menjadi usaha menengah dan besar. Dengan pengembangan sektor riil dan UMKM yang berkelanjutan, maka lapangan pekerjaan akan tercipta, masyarakat terdorong berwirausaha, dan pada akhirnya kesejahteraan meningkat.

Pemberdayaan sektor riil dan UMKM merupakan upaya mewujudkan tujuan syariah untuk menciptakan lapangan kerja (*fath al-a'mal*). Dengan sektor riil dan UMKM yang tangguh, pengangguran dapat ditekan dan masyarakat mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang layak, sehingga terbebas dari kemiskinan.

5.5.5. Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan umat sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja. Pemerintah perlu mereformasi sistem pendidikan agar lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Misalnya dengan memperbaiki kurikulum, sarana prasarana sekolah, dan kompetensi pengajar. Selain pendidikan formal, pelatihan vokasi dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri juga perlu dikembangkan. Dengan pendidikan dan ketrampilan yang memadai, angkatan kerja akan lebih kompetitif dan terampil sehingga produktivitas meningkat. Pada akhirnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan karena lebih banyak lapangan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan merupakan kunci penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat.

Peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan umat sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga akal (*hifzh al-aql*). Dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, umat memiliki bekal untuk berusaha dan bersaing di era modern, sehingga terhindar dari kebodohan dan kemiskinan.

5.5.6. Gaya Hidup

Gaya hidup sederhana dan menghindari sikap boros sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan finansial individu dan masyarakat. Seringkali, gaya hidup konsumtif yang boros tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan justru membuat seseorang terjebak dalam lingkaran utang dan kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan bagi masyarakat agar menerapkan perilaku hemat, belanja seperlunya, dan menabung. Kebiasaan ini akan membuat seseorang lebih bijak dalam mengelola keuangan, sehingga utang dan pemborosan dapat dihindari. Dengan demikian,

stabilitas ekonomi individu dan keluarga dapat terjaga. Selain itu, sikap sederhana juga perlu diterapkan dalam gaya hidup sehari-hari, misalnya dalam hal konsumsi, rekreasi, perumahan, dan lainnya. Pola hidup yang sederhana dan hemat jika dilakukan banyak orang akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menghidupkan semangat hidup sederhana dan hemat merupakan manifestasi dari tujuan syariah untuk membentuk akhlak mulia (*tahzib al-akhlaq*). Sikap hemat dan sederhana mencegah perilaku boros dan konsumtif yang dapat menyebabkan kemiskinan. Ini penting demi terciptanya stabilitas ekonomi dan moral umat.

Dengan menerapkan nilai-nilai Islam ini, diharapkan upaya mengatasi kemiskinan dapat berjalan efektif dan kesejahteraan umat dapat meningkat secara signifikan. Semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial, perlu bersama-sama bekerja untuk membasmi kemiskinan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan. Dalam Islam, Allah tidak mengabaikan nasib orang miskin dan tidak membiarkan mereka terlantar. Sebaliknya, Allah telah menetapkan hak tertentu bagi mereka dalam kekayaan orang-orang kaya, yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu memenuhi kebutuhan orang miskin.

Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa zakat hanya untuk orang miskin, orang miskin, pengumpul zakat, orang yang hatinya perlu dilunakkan (*mualaf*), untuk membebaskan budak, untuk membebaskan mereka yang berhutang, untuk kepentingan jalan Allah dan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Ini merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial dalam mengatasi kemiskinan dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan adanya zakat,

diharapkan orang miskin dapat merasa didukung dan dibantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Zakat menjadi instrumen yang menghubungkan orang-orang kaya dengan orang miskin, sehingga terjalinlah ikatan kebersamaan dan saling membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dalam Islam, Allah tidak mengabaikan nasib orang miskin dan tidak membiarkan mereka terlantar.

Sebaliknya, Allah telah menetapkan hak tertentu bagi mereka dalam kekayaan orang-orang kaya, yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu memenuhi kebutuhan orang miskin.

5.6. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai perspektif Islam tentang kemiskinan, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah sosial yang harus diselesaikan, bukan sekedar takdir yang harus diterima. Al-Quran dan Hadits secara tegas mengajarkan pentingnya menolong dan membantu saudara-saudara kita yang miskin dan membutuhkan. Penyebab kemiskinan dalam Islam tidak hanya faktor internal seperti malas bekerja atau boros, tetapi juga faktor-faktor eksternal seperti ketidakadilan distribusi kekayaan dan sumber daya alam, praktik riba dan korupsi, bencana alam, dan kelemahan kebijakan publik.

Oleh karena itu, Islam menawarkan berbagai solusi sistematis dan komprehensif untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan ini, seperti menerapkan sistem ekonomi dan keuangan syariah yang berbasis pada keadilan, mengoptimalkan peran zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan, memberdayakan sektor riil dan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan agar daya saing meningkat.

Upaya mengatasi kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Kemiskinan yang merajalela jelas melanggar tercapainya dua tujuan utama syariah, yaitu perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs) dan perlindungan terhadap harta benda (hifzh al-mal) rakyat. Ketika sebagian besar umat hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan, berarti tujuan syariah untuk menjaga jiwa dan harta belum terpenuhi. Mengentaskan kemiskinan adalah upaya mewujudkan keadilan sosial yang merupakan bagian integral dari maqashid syariah.

Namun demikian, pembahasan dalam tulisan ini masih bersifat teoritis dan normatif belaka, belum didukung data dan fakta empiris yang memadai. Diperlukan penelitian dan kajian lebih lanjut untuk melihat bagaimana implementasi solusi-solusi kemiskinan dalam Islam telah dijalankan di berbagai negara Muslim, termasuk menggunakan perspektif gender agar solusinya lebih tepat sasaran. Dengan demikian, wawasan yang didapatkan akan lebih komprehensif dan dapat diterapkan untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan demi terwujudnya masyarakat Muslim yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai cita-cita maqashid syariah

DAFTAR PUSTAKA

Adam, P. (2020) 'Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), pp. 81–100. Available at: <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>.

Aravik, H. *et al.* (2022) 'Afzalur Rahman's Thinking Contribution To The Islamic Economy From Epistemological Aspects To The Concept of Wages In Islam', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(1), pp. 97–124. Available at: <https://doi.org/10.36908/isbank.v8i1.488>.

Aravik, H., Hamzani, A.I. and Khasanah, N. (2021) 'the Role of the State in the Islamic Economic System: a Review of Abbas Mirakhor's Thought', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), pp. 1–22. Available at: <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.271>.

Chapra, M.U. (1992) *Islam and The Economic System, Review of Islamic Economics*.

Farooq, M.O. (1986) 'The Challenge of Islamic Economics', *American Journal of Islam and Society*, 3(2), pp. 331–334. Available at: <https://doi.org/10.35632/ajis.v3i2.2759>.

Hafid, E. (2011) 'Kemiskinan (Al-Faqr) Dalam Perspektif Hadis', *Jurnal Al-Hikmah Vol.*, XII(1).

Hudaifah, A. and Ajija, S.R. (2016) 'A Comparative Study on Poverty Alleviation Between Moslem and Non Moslem Populated Countries', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(1), pp. 143–164. Available at: <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.3222>.

Majid, M.S.A. (2011) 'Mengentaskan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1(2), pp. 197–205. Available at: <https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss2.art6>.

Sadeq, A.M. (1997) 'Poverty Alleviation: An Islamic Perspective',

Humanomics, 13(3), pp. 110–134. Available at:
<https://doi.org/10.1108/eb018797>

BAB 6

INDIKATOR KEMISKINAN DALAM ISLAM

Oleh Alamsyah Agit

6.1. Kemiskinan

Kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau komunitas tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Kemiskinan menggambarkan kondisi seseorang yang memiliki pendapatan jauh di bawah standar hidup yang dianggap normal atau rata-rata dalam masyarakat mereka. Selain dari segi pendapatan, kemiskinan juga dinilai dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, hal ini menunjukkan kompleksitas dalam konsep kemiskinan, yang melibatkan lebih dari sekadar kurangnya sumber daya finansial. Namun, juga melibatkan kurangnya akses ke peluang dan layanan yang diperlukan untuk mencapai kualitas hidup yang baik dan memenuhi kebutuhan dasar (Yamamori, 2019).

Dalam Islam, kemiskinan dilihat sebagai masalah sosial yang perlu ditangani secara kolektif. Kerangka ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran sosial yang melarang penciptaan kekayaan 'egois' dan menekankan pada kesetaraan sosial, keadilan ekonomi, persaudaraan dan kesatuan, serta keadilan. Rasulullah SAW berusaha untuk memberantas kemiskinan dengan mengelola dana Islam seperti Zakat, Sadaqah, Waqf, dan Qard Al-Hassan, yang merupakan instrumen pengentasan kemiskinan dalam Islam (Aziz and Mohamad, 2016).

Tujuan bisnis sosial Islam adalah untuk mengurangi kemiskinan dan menyelesaikan masalah sosial, yang pada akhirnya akan mengurangi ketidaksetaraan sosial. 'Menyelesaikan masalah sosial' mencakup memastikan fasilitas kesehatan, dukungan medis, dana pendidikan, dan fasilitas perumahan bagi orang miskin. Dalam ajaran Rasulullah SAW, disebutkan bahwa orang kaya tidak dapat tidur dengan nyenyak sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar, menekankan tanggung jawab orang kaya terhadap mereka yang kurang beruntung. Zakat, kontribusi wajib oleh Muslim kaya, tidak dianggap sebagai donasi tetapi sebagai hak orang miskin atas kekayaan Muslim kaya. Dengan demikian dalam Islam, kemiskinan bukan hanya keadaan kekurangan sumber daya, tetapi kondisi yang perlu ditangani melalui upaya kolektif dan tanggung jawab sosial.

Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan perilaku yang tampaknya irasional dan kontraproduktif dalam beberapa bidang kehidupan ekonomi, baik di negara maju maupun berkembang. Hal ini tercermin pada beberapa hal seperti, keluarga yang berpenghasilan rendah cenderung menyimpan terlalu sedikit, berulang kali meminjam dengan suku bunga tinggi, dan menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk rokok, alkohol, dan lotere. Selain itu, individu berpenghasilan rendah, juga cenderung mengurangi layanan kesehatan non-darurat mereka dan meskipun mereka memenuhi syarat untuk program kesejahteraan, tingkat partisipasi mereka rendah.

Ada beberapa pandangan tentang perilaku orang miskin ini. Salah satu pandangan menyarankan bahwa perilaku ini mencerminkan preferensi orang miskin dan harus dilihat sebagai adaptasi rasional terhadap keadaan ekonomi mereka. Pandangan budaya kemiskinan mengusulkan bahwa norma, nilai, dan sikap orang miskin menyimpang dari orang lain dan membentuk preferensi dan perilaku mereka. Pandangan modal manusia menyarankan bahwa perilaku ini mencerminkan

kurangnya kualitas sumber modal manusia yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan, pengalaman kerja, dan literasi keuangan (Bruijn and Antonides, 2022).

6.1.1. Faktor-Faktor Kemiskinan

Dalam kegiatan ekonomi, kemiskinan dapat dijelaskan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang tidak dapat secara penuh berpartisipasi dalam tiga kegiatan utama ekonomi, yakni, produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam hal produksi, seseorang yang tergolong miskin, cenderung memiliki pekerjaan dengan upah dibawah rata-rata, atau bahkan dalam keadaan menganggur. Dalam hal konsumsi, orang yang tergolong miskin, umumnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, dan terkesan serba kekurangan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, terlebih lagi kebutuhan sekunder dan tersier. Selanjutnya, dalam hal distribusi, seorang individu yang tergolong miskin, cenderung memiliki keterbatasan dalam hal distribusi, baik distribusi kekayaan, atau kegiatan-kegiatan distribusi lainnya

Kemiskinan dapat terjadi oleh banyak faktor, baik yang ditimbulkan oleh individu itu sendiri, ataupun yang disebabkan oleh faktor-faktor universal seperti pendidikan, umumnya kondisi kemiskinan dapat terjadi karena kurangnya kualitas sumber daya manusia, hal ini umumnya terjadi akibat kurangnya pendidikan, kualitas kesehatan, dan faktor-faktor lain seperti pengeluaran pemerintah dan kebijakan-kebijakan ekonomi. Untuk dapat mendorong kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan adanya kebijakan yang mengarahkan porsi pengeluaran pemerintah yang mengutamakan pada penguatan indeks pembangunan manusia, dengan demikian pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan

semakin meningkatnya spesialisasi dan kesempatan kerja, dan kewirausahaan (Asrol and Ahmad, 2018).

Sebagai sebuah masalah dan isu yang terus terjadi dalam kegiatan ekonomi, kemiskinan dapat disebabkan oleh banyak faktor, hal ini juga disebabkan oleh faktor yang sangat beragam, melihat kondisi masyarakat, lingkungan, dan aspek geografis dari wilayah tersebut, adapun beberapa faktor yang dinilai dapat menyebabkan kemiskinan, adalah sebagai berikut (Rassanjani, 2018):

1. Kualitas Pendidikan. Kualitas pendidikan menentukan potensi dan peluang dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga kualitas pendidikan yang rendah, cenderung atau umumnya tidak mendapatkan pekerjaan yang layak (kasar) atau pekerjaan dengan upah yang rendah.
2. Kualitas Kesehatan. Kesehatan seorang individu dapat mendorong seseorang untuk dapat bekerja dengan waktu yang lama, seorang individu dengan tingkat kesehatan yang tidak baik, menjadi penghalang seseorang untuk bekerja dalam waktu lama, bahkan menjadi kendala untuk bekerja.
3. Kondisi Perekonomian. Kondisi perekonomian cenderung menyebabkan kemiskinan, dikarenakan kondisi ekonomi dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja, menurunnya kegiatan produksi, dan menjadi penyebab terjadi pengangguran, yang berakhir pada kemiskinan.
4. Kualitas Infrastruktur. Kualitas infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorong peluang ekonomi, dengan kurangnya infrastruktur yang baik, seperti, air, listrik, dan sanitasi, kemungkinan untuk terjadinya kemiskinan juga potensial.
5. Kebijakan Ekonomi. Kebijakan ekonomi, memberikan peluang baik untuk para pedagang, wirausaha, dan berbagai pemilik bisnis, dengan adanya kebijakan yang tepat, maka iklim bisnis dapat ditunjang, sebaliknya,

apabila kebijakan tidak tepat maka iklim bisnis tidak maksimal, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya lapangan kerja, dan berpotensi menyebabkan kemiskinan

6.1.2. Faktor-Faktor Kemiskinan Dalam Islam

Dalam Islam kemiskinan diartikan atau didefinisikan dengan tidak hanya memandang segi material atau kekurangan harta, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan moral. Dalam Islam, kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan di mana seseorang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, kemiskinan juga dapat didefinisikan dalam konteks spiritual, di mana seseorang mungkin merasa miskin dalam hal iman dan amal saleh. Dalam hal ini, kemiskinan dapat dianggap sebagai kekurangan dalam hal kepuasan spiritual dan kedekatan dengan Tuhan.

Selain itu, dalam perspektif Islam, kemiskinan juga dapat dilihat sebagai kondisi sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan. Islam mendorong umatnya untuk berbagi kekayaan mereka melalui zakat, sedekah, dan bentuk pemberian lainnya untuk membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Secara keseluruhan, definisi kemiskinan dalam Islam mencakup aspek material, spiritual, dan sosial, dan menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan (Abbas and Shirazi, 2015).

Berbeda dengan penyebab kemiskinan pada umumnya, dalam persektif Islam, terdapat beberapa faktor yang diasumsikan dapat menjadi penyebab dari kemiskinan, adapun faktor-faktor adalah sebagai berikut (Haneef *et al.*, 2014):

1. Kelemahan struktural dan kurangnya kapasitas yang menjadi aspek utama dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang umumnya direfleksikan dari kurangnya pelatihan bisnis, pendanaan, dan program-program pengembangan sumber daya manusia.
2. Dinamika politik-ekonomi dan sosial-ekonomi menjadi aspek penting dalam menentukan banyak hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti iklim bisnis, iklim perdagangan internasional, iklim investasi, dan jenis-jenis kegiatan ekonomi lainnya, yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak dari segi pekerjaan dan pendapatan, yang mengarah pada kehidupan yang layak.
3. Kondisi ekonomi dunia, kondisi ekonomi global yang tidak stabil dapat melatarbelakangi terjadinya kemiskinan, isu-isu seperti kurangnya lapangan kerja, dapat menyebabkan pengangguran dan kemiskinan, serta bencana-bencana hebat yang mengurangi lapangan kerja, menjadi sebuah penyebab meningkatnya pengangguran.
4. Kurangnya akses akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syarat syariah. Banyak individu cenderung memilih layanan keuangan dengan prinsip syariah, dan menolak layanan keuangan konvensional, sehingga banyaknya lembaga keuangan syariah, dapat menjadi faktor yang dapat menunjang perkembangan bisnis.

Berdasarkan faktor-faktor ini, sekilas, kemiskinan dapat diasumsikan tidak hanya ditimbulkan oleh individu yang bersangkutan, sikap pasrah, dan tidak berusaha memperbaiki kehidupannya, dapat menjadi salah satu faktor, namun, kemiskinan memiliki dimensi yang lebih luas. Kemiskinan dapat disebabkan oleh banyak hal, faktor-faktor tersebut juga dapat ditimbulkan oleh lingkungan, bahkan faktor seperti keturunan, dan

kebiasaan yang dimiliki pendahulunya dapat menjadi sebuah faktor yang membuat individu terjerat dan berada dalam kondisi yang dinilai sebagai kemiskinan.

6.2. Indikator Kemiskinan

Dalam menentukan kategori kemiskinan biasanya didasarkan pada indikator kemiskinan seperti pendapatan dan kekayaan individu. Individu yang pendapatan dan kekayaannya berada di bawah ambang batas tertentu dapat dikategorikan sebagai miskin. Namun, batas atau standar kemiskinan dapat bervariasi tergantung pada negara atau wilayah. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kondisi hidup dan akses terhadap layanan dasar juga menjadi faktor yang berpotensi sebagai penentu kemiskinan pada suatu wilayah atau negara (Benedetti, Crescenzi and Laureti, 2020).

Indikator kemiskinan merupakan komponen pengukuran yang sangat beragam, selain mempertimbangkan aspek seperti indeks pembangunan manusia, terdapat pula faktor-faktor yang dapat disebabkan oleh budaya, kebiasaan, atau bahkan tradisi yang diturunkan dari pendahulu. Lebih jauh, indikator kemiskinan juga sangat bergantung pada kondisi suatu wilayah untuk dapat mendorong atau mengurangi jumlah kemiskinan di suatu wilayah, sebagai contoh, suatu wilayah yang memiliki sumber daya ekonomi yang minim, cenderung akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah, sehingga lapangan kerja pada wilayah tersebut juga sangat terbatas, menjadi sebuah alternatif bagi penduduk di desa tersebut untuk mencari pekerjaan di wilayah lain, meninggalkan wilayah tersebut dalam kondisi yang tidak lagi diperhatikan dan dikembangkan. Seorang individu dikatakan miskin jika mereka mengalami berbagai bentuk deprivasi dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Indikator-indikator ini digunakan dalam Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) global untuk mengukur kemiskinan. Misalnya, dalam dimensi kesehatan, deprivasi dapat diukur melalui indikator seperti kematian anak dan gizi buruk. Dalam dimensi pendidikan, deprivasi dapat diukur melalui indikator seperti jumlah tahun sekolah dan tingkat partisipasi sekolah. Dalam dimensi standar hidup, deprivasi dapat diukur melalui indikator seperti kualitas perumahan, aset, dan akses ke layanan dasar (Alkire and Kanagaratnam, 2021).

Kemiskinan sebagai salah satu isu perekonomian yang memiliki indikator yang sangat beragam, keragaman indikator kemiskinan bahkan dikaitkan dengan negara, ukuran negara dikategorikan menjadi negara maju, berkembang, dan sedang berkembang, hal ini tentu juga memiliki pengaruh akan pengukuran kemiskinan, secara umum terdapat beberapa indikator yang mencerminkan bahwa seorang individu berada di garis kemiskinan, diantaranya adalah sebagai berikut (Pienkhuntod, Amornbunchornvee and Nantharath, 2020):

1. Kesehatan: Indikator ini dapat mencakup akses ke layanan kesehatan, tingkat kebugaran fisik, dan keberadaan penyakit kronis atau kondisi kesehatan lainnya.
2. Standar Hidup: Indikator ini dapat mencakup jenis perumahan, ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta akses ke makanan yang cukup dan bergizi.
3. Pendidikan: Indikator ini biasanya mencakup tingkat pendidikan yang telah dicapai, akses ke pendidikan berkualitas, dan tingkat literasi.
4. Pekerjaan: Indikator ini dapat mencakup status pekerjaan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan.
5. Nilai-nilai Budaya: Mencakup indikator seperti kebiasaan hidup buruk (seperti merokok atau konsumsi alkohol), praktik agama, dan perawatan penyakit kronis.

6. Hak Atas Tanah dan Aset: Indikator ini mencakup kepemilikan tanah dan aset lainnya.
7. Pemberdayaan: Indikator ini mencakup partisipasi dalam kelompok pertanian dan organisasi masyarakat lainnya.
8. Literasi Digital: Indikator ini mencakup akses ke teknologi digital dan kemampuan untuk menggunakannya.

Dalam perspektif lain, diasumsikan bahwa indikator yang paling menentukan kemiskinan pada suatu negara, ada pada tiga komponen utama, yakni pendidikan, kesehatan dan standar hidup seseorang, ketiga hal ini mencerminkan potensi, dan kapabilitas yang dapat dicapai oleh seorang individu, pendidikan menjadi faktor yang dapat menentukan pekerjaan apa dan keahlian apa yang dimiliki seorang individu, kesehatan akan mencerminkan kapabilitas individu untuk bekerja dalam waktu yang lama bahkan, sebanyak apa pekerjaan yang dapat ia selesaikan, dan standar hidup menggambarkan bagaimana individu dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan tingkatan serta kualitas dari barang dan jasa yang dapat mereka gunakan, dengan meninjau kemampuan finansial mereka (Sulkers and Loos, 2022)

Kemiskinan juga sangat identik dengan kondisi lingkungan dan budaya masyarakat, gambaran akan kondisi dapat direfleksikan pada kondisi lingkungan, sumber daya pada suatu wilayah akan menentukan kecenderungan masyarakat untuk bergantung, salah satu contohnya adalah sektor pertanian, sektor ini juga umumnya menjadi profesi yang terus berlanjut, ketika seorang anak lahir dari keluarga petani, apabila tidak memiliki tekad dan keinginan yang kuat, umumnya mereka akan memutuskan untuk menjadi petani. Selain itu adanya diskriminasi, menjadi pembatas yang terkadang menghalangi beberapa ras atau golongan tertentu untuk memperoleh pekerjaan (Goedemé, Decerf and Bosch, 2022).

6.2.1. Kemiskinan Dalam Islam

Kemiskinan dapat meningkat atau berkurang berdasarkan faktor-faktor spiritual. Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan semua makhluk-Nya berkat ilahi. Jika berkat ini digunakan secara optimal pada tempatnya, maka akan mengarah pada pertumbuhan berkat. Namun, jika digunakan dalam arah yang berlawanan, hasilnya akan berlawanan. Kemiskinan dari sudut pandang Islam dapat dipahami dengan baik dengan mengungkapkan efek buruk dari kemiskinan dan menawarkan solusi seperti zakat dan khums untuk menghilangkannya. Selain itu, berdoa untuk kemiskinan dan membenarkan kemiskinan dari Mustahab yang efektif dalam pengembangan rezeki juga menjadi bagian dari penelitian ini. Namun, perlu dicatat bahwa kemiskinan spiritual juga dapat menjadi penyebab jatuhnya martabat manusia. Kemiskinan spiritual ini dapat terjadi ketika manusia melupakan dimensi spiritual dari keberadaannya karena dosa dan kelalaian, yang kemudian akan mengakibatkan kemiskinan spiritual (Azadbakhti and Parvini, 2020).

Dalam perspektif Islam, kemiskinan dapat dianggap sebagai bentuk ujian dan cobaan dari Allah SWT, kemiskinan juga dapat dianggap sebagai bentuk godaan setan yang bertujuan merusak aqidah manusia, Selain itu, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam konteks sosial, kemiskinan dapat berdampak negatif tidak hanya pada kehidupan individu tetapi juga pada kehidupan sosial, termasuk dimensi aqidah (iman), perilaku (moral), pemikiran, peradaban, kebahagiaan rumah tangga dan bahkan kehidupan manusia pada umumnya (Rahman and Siradjuddin, 2020).

Kemiskinan dalam perspektif Islam dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah sikap individu

terhadap kehidupan. Al-Qur'an dan Hadith, sebagai sumber hukum Islam, memberikan instruksi tentang sikap hidup yang baik bagi individu Muslim. Misalnya, Al-Qur'an merekomendasikan untuk bekerja keras, melarang meminta-minta, dan menyarankan hidup sederhana.

Namun, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh interaksi antara individu dalam keluarga sebagai unit sosial, dan interaksi keluarga dengan unit sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat dengan semua bentuk organisasi sosialnya. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan dalam perspektif Islam tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat (Fuad, 2022). Dalam perspektif Islam, penyebab kemiskinan lebih mengarah pada kondisi yang timbul dari kesadaran individual, seperti faktor spiritual.

6.2.2. Indikator Kemiskinan Dalam Islam

Dalam Islam, kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek material tetapi juga aspek spiritual. Rasullullah SAW: "Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati (spiritual) itu sendiri". Ini berarti bahwa kemiskinan sejati adalah kemiskinan spiritual. Meskipun aspek spiritual lebih penting dalam Islam daripada aspek material, Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa kemiskinan atau kelaparan dapat menyebabkan ketidakpercayaan. Dalam Al-Quran, ada dua jenis orang miskin, yaitu orang yang membutuhkan dan pengemis - miskin dan fakir.

Orang yang membutuhkan umumnya tidak dikenal oleh orang lain karena mereka tidak meminta, tetapi mereka mungkin berada dalam keadaan yang lebih sulit daripada pengemis. Selain itu, definisi optimal untuk menggambarkan kemiskinan, atau teknik pengukuran untuk membandingkan kemiskinan antar negara atau

antara bagian yang berbeda dari suatu negara. Namun, dalam konteks Islam, tingkat kemiskinan sering dikaitkan dengan tingkat ketidaksetaraan yang tinggi dan produktivitas yang rendah (Elwardi, 2015).

Sebagaimana kemiskinan merupakan masalah umum, indikator kemiskinan dalam Islam meliputi dua konsep utama, yaitu konsep kebutuhan (dharuriyyah) dan konsep batas pengecualian (nisab) (Salleh, 2017):

1. Konsep Kebutuhan (Dharuriyyah): Ini merujuk pada semua aktivitas dan hal-hal yang penting untuk menjaga lima dasar kehidupan manusia, yaitu agama, fisik, intelek atau pengetahuan, keturunan, dan kekayaan. Seseorang dianggap miskin jika dia tidak memiliki kebutuhan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dasar berdasarkan lima dasar tersebut untuk kehidupan individu dan sosial yang baik.
2. Konsep Batas Pengecualian (Nisab): Nisab merujuk pada jumlah minimum tertentu dari barang atau kekayaan yang harus dimiliki sebelum barang dan kekayaan tersebut dikenakan zakat. Dalam zakat, persyaratan nisab menyiratkan bahwa mereka yang tidak memenuhi persyaratan nisab tidak hanya dibebaskan dari membayar zakat tetapi juga dianggap miskin dan oleh karena itu berhak menerima zakat.

Kedua konsep ini membawah indikator kemiskinan jauh daripada indikator kemiskinan secara umumnya, yang mana dalam Islam, kemiskinan diasumsikan diukur dari beberapa aspek, yakni sebagai berikut (Adnan and Ajija, 2015):

1. Pendapatan: Pendapatan merupakan indikator utama kemiskinan. Jika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, maka orang tersebut dianggap miskin, pendapatan juga menentukan keterlibatan seseorang dalam kegiatan sosial, dalam

konteks Islam, seseorang dengan pendapatan yang tinggi, memiliki kemampuan untuk melakukan donasi, sumbangan, sedekah dan sebagainya.

2. Konsumsi: Kemiskinan juga dapat diukur dengan membandingkan konsumsi rumah tangga per kapita dengan garis kemiskinan. Jika pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan, maka rumah tangga tersebut dianggap miskin. Seseorang dengan pendapatan rendah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan bahkan kekurangan pada waktu-waktu tertentu.
3. Kekurangan akses terhadap sumber daya, kapabilitas, pilihan, keamanan, dan kekuasaan yang diperlukan untuk menikmati standar hidup yang layak dan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial lainnya.

6.3. Menghadapi Kemiskinan

Kemiskinan sebagai salah satu isu terbesar dalam konteks ekonomi, banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, tidak hanya oleh pemerintah, baik akademisi, dan praktisi juga melaksanakan upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Kondisi kemiskinan umumnya terjadi akibat tidak maksimalnya potensi sumber daya pada suatu wilayah, hal ini memerlukan adanya asistensi untuk mengidentifikasi dan menyusun langkah dan strategi untuk memaksimalkan potensi ini. Setiap wilayah memiliki keragaman yang berbeda-beda, jumlah penduduk, sumber daya, kualitas pendidikan, dan banyak faktor lain, dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan kemiskinan juga sangat beragam.

Menghadapi kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yakni (Sulkers and Loos, 2022):

1. Pendidikan: Pendidikan adalah kunci untuk keluar dari siklus kemiskinan. Pendidikan yang baik dapat membuka peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan individu.
2. Peningkatan Kesehatan: Akses ke layanan kesehatan yang berkualitas juga penting. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan.
3. Pembangunan Infrastruktur: Infrastruktur yang baik seperti akses ke air bersih, sanitasi, dan listrik dapat meningkatkan kualitas hidup dan membantu mengurangi kemiskinan.
4. Pemberdayaan Ekonomi: Program-program seperti pelatihan keterampilan, kredit mikro, dan bantuan untuk usaha kecil dapat membantu individu keluar dari kemiskinan.
5. Kebijakan Sosial: Kebijakan sosial yang adil dan inklusif dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan. Ini bisa termasuk kebijakan pajak yang progresif, transfer tunai kepada yang miskin, dan program perlindungan sosial.
6. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Komunitas: Pendekatan ini melibatkan masyarakat setempat dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan. Ini dapat membantu memastikan bahwa program dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas komunitas.
7. Pendekatan Positif Psikologi: Intervensi psikologis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mental individu yang tinggal di daerah miskin juga penting. Penelitian menunjukkan bahwa memiliki pola pikir positif dapat membantu individu menghadapi tantangan dan stres yang datang dengan kemiskinan.

Adapun pendekatan lain yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinan, pendekatan dalam mengalami kemiskinan merefleksikan kondisi masyarakat yang tidak

sepenuhnya mengetahui dan dapat memaksimalkan potensi suatu wilayah, adapun pendekatan yang dapat dilakukan, yakni sebagai berikut (Bruijn and Antonides, 2022):

1. Pendidikan dan Pelatihan: Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dapat membantu individu memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka. Pelatihan juga dapat membantu individu memperoleh keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.
2. Distribusi Pendapatan: Individu yang memiliki kemampuan untuk mendistribusikan sebagian kekayaannya dalam bentuk sedekah dan lain-lain, dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan pendapatan tambahan kepada individu dan keluarga yang membutuhkan. Program ini dapat membantu individu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memberikan mereka lebih banyak keamanan finansial.
3. Meningkatkan Akses ke Layanan Kesehatan: Meningkatkan akses ke layanan kesehatan juga penting dalam mengatasi kemiskinan. Individu yang miskin sering kali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
4. Meningkatkan Literasi Keuangan: Meningkatkan literasi keuangan dapat membantu individu membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan mengelola uang mereka dengan lebih efisien. Ini dapat membantu mereka menghindari hutang dan membangun tabungan untuk masa depan.
5. Mengurangi Ketidakpastian Pendapatan: Mengurangi ketidakpastian pendapatan, dapat membantu mengurangi kemiskinan. Ketidakpastian pendapatan dapat membuat

individu lebih sulit untuk merencanakan dan mengelola keuangan mereka, yang dapat memperburuk kemiskinan.

Banyaknya penelitian dan riset akan kemiskinan, memberikan berbagai referensi dan strategi serta pendekatan yang berbeda-beda dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan, diantaranya menurut Fuad, terdapat beberapa hal yang merupakan strategi yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinan, yakni sebagai berikut (Fuad, 2022):

1. Kebijakan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial: Kebijakan ini berupa program yang mencakup pendidikan, layanan kesehatan, makanan, sanitasi, dan air bersih.
2. Kebijakan Berbasis Pemberdayaan Partisipatif: Kegiatan ini dilakukan dalam kelompok dengan rencana pembangunan berkelanjutan. Penerima manfaat adalah orang miskin.
3. Kebijakan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil: Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Termasuk dalam kategori ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
4. Meningkatkan Kemampuan Dasar Orang Miskin: Melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan, keterampilan bisnis, teknologi, memperluas jaringan, dan informasi pasar.
5. Menghapus Nilai Budaya Negatif: Strategi penanggulangan kemiskinan harus memberantas nilai budaya negatif seperti apati, apolitik, fatalisme, ketidakberdayaan, dan lainnya.

Adapun strategi lain untuk mengatasi kemiskinan, diungkapkan oleh Goedeme et.al, yang mana strategi ini berfokus pada pemberdayaan, dan faktor-faktor yang dapat mendukung proses tersebut, seperti infrastruktur, fasilitas umum, sarana dan prasarana, dan berbagai aspek-aspek lain yang dapat memaksimalkan sumber daya yang ada pada suatu

wilayah, Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut (Goedemé, Decerf and Bosch, 2022):

1. Pendidikan: Pendidikan adalah salah satu alat paling efektif dalam memerangi kemiskinan. Pendidikan yang baik dapat memberikan individu keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan mencapai stabilitas ekonomi.
2. Pekerjaan: Menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan membayar upah yang adil adalah cara penting lainnya untuk mengurangi kemiskinan. Pekerjaan yang baik dapat memberikan individu pendapatan yang stabil dan membantu mereka keluar dari kemiskinan.
3. Kesehatan: Memastikan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas juga penting dalam memerangi kemiskinan. Kesehatan yang baik dapat memungkinkan individu untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan.
4. Kebijakan Sosial: Kebijakan sosial yang adil dan inklusif dapat membantu mengurangi kemiskinan. Ini bisa termasuk program bantuan sosial, kebijakan perumahan yang adil, dan program pendidikan yang merata.
5. Infrastruktur: Membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan menciptakan pekerjaan dan meningkatkan akses ke layanan penting.
6. Pemberdayaan Wanita: Pemberdayaan wanita dan perempuan dapat membantu mengurangi kemiskinan. Ini bisa termasuk memberikan akses ke pendidikan dan peluang kerja, serta melindungi hak-hak perempuan.
7. Perlindungan Lingkungan: Perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga dapat membantu mengurangi kemiskinan, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada pertanian dan sumber daya alam lainnya.
8. Kebijakan Ekonomi: Kebijakan ekonomi yang tepat, dapat mendorong kegiatan ekonomi, kebijakan ekonomi yang

mengarah pada pemberdayaan, akan berfokus pada UMKM dan ekonomi kreatif, yang mana dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan lapangan kerja potensial untuk individu maupun kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, K. and Shirazi, N. (2015) 'The Key Players' Perception On The Role Of Islamic Microfinance In Poverty Alleviation: The Case Of Pakistan', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(2), pp. 244–267. Available at: <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2013-0017>.
- Adnan, M.A. and Ajija, S.R. (2015) 'The Effectiveness Of Baitul Maal Wat Tamwil In Reducing Poverty The Case Of Indonesian Islamic Microfinance Institution', *Humanomics*, 31(2), pp. 160–182. Available at: <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>.
- Alkire, S. and Kanagaratnam, U. (2021) 'Revisions Of The Global Multidimensional Poverty Index: Indicator Options And Their Empirical Assessment', *Oxford Development Studies*, 49(2), pp. 169–183. Available at: <https://doi.org/10.1080/13600818.2020.1854209>.
- Asrol, A. and Ahmad, H. (2018) 'Analysis Of Factors That Affect Poverty In Indonesia', *REVISTA*, 39(45), pp. 14–24.
- Azadbakhti, Z. and Parvini, K. (2020) 'Spiritual Poverty In Islam (1): Its Harms From The Perspective Of The Holy Qur'an And Hadiths', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), pp. 52–62. Available at: <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1885>.
- Aziz, M.N. and Mohamad, O. Bin (2016) 'Islamic Social Business To Alleviate Poverty And Social Inequality', *International Journal of Social Economics*, 43(6), pp.

573–592. Available at: <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2014-0129>.

Benedetti, I., Crescenzi, F. and Laureti, T. (2020) 'Measuring Uncertainty For Poverty Indicators At Regional Level: The Case Of Mediterranean Countries', *Sustainability (Switzerland)*, 12(19). Available at: <https://doi.org/10.3390/su12198159>.

Bruijn, E.J. de and Antonides, G. (2022) 'Poverty And Economic Decision Making: A Review Of Scarcity Theory', *Theory and Decision*, 92(1), pp. 5–37. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11238-021-09802-7>.

Elwardi, D. (2015) *The Role Of Islamic Microfinance In Poverty Alleviation: Lessons From Bangladesh Experience*.

Fuad, A. (2022) 'Poverty Reduction Strategy Based On Family Empowerment In The Perspective Of Islamic Law', *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 2(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.21580/prosperity.2022.2.1.10164>.

Goedemé, T., Decerf, B. and Bosch, K. Van den (2022) 'A New Poverty Indicator For Europe: The Extended Headcount Ratio', *Journal of European Social Policy*, 32(3), pp. 287–301. Available at: <https://doi.org/10.1177/09589287221080414>.

Haneef, M.A. *et al.* (2014) 'Integrated Waqf Based Islamic Microfinance Model (IWIMM) For Poverty Alleviation In OIC Member Countries', *Middle - East Journal of Scientific Research*, 19(2), pp. 286–298. Available at: <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2014.19.2.12565>.

Pienkhuntod, A., Amornbunchornvei, C. and Nantharath, P. (2020) 'Quantitative Analysis Of Poverty Indicators: The Case Of Khon Kaen Province, Thailand', *Journal of*

Asian Finance, Economics and Business, 7(2), pp. 131–141. Available at:
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.131>.

Rahman, A. and Siradjuddin, S. (2020) 'Islamic Economic Concept In Poverty Alleviation', *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study*, 1(2), pp. 67–74. Available at:
<https://doi.org/10.47616/jamrems.v1i2.68>.

Rassanjani, S. (2018) 'Ending Poverty: Factors That Might Influence The Achievement Of Sustainable Development Goals (Sdgs) In Indonesia', *Journal of Public Administration and Governance*, 8(3), pp. 114–128. Available at:
<https://doi.org/10.31227/osf.io/kjfgm>.

Salleh, M.S. (2017) 'Contemporary Vision Of Poverty And Islamic Strategy For Poverty Alleviation', *SAGE Open*, 7(2), pp. 1–8. Available at:
<https://doi.org/10.1177/2158244017697153>.

Sulkers, E. and Loos, J. (2022) 'Life Satisfaction Among The Poorest Of The Poor: A Study In Urban Slum Communities In India', *Psychological Studies*, 67(3), pp. 281–293. Available at:
<https://doi.org/10.1007/s12646-022-00657-8>.

Yamamori, T. (2019) 'The Smithian Ontology Of "Relative Poverty": Revisiting The Debate Between Amartya Sen And Peter Townsend', *Journal of Economic Methodology*, 26(1), pp. 70–80. Available at:
<https://doi.org/10.1080/1350178X.2018.1561081>.

BAB 7

DISPARITAS

DALAM

PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Annisa Ilmi Faried

7.1. Pendahuluan

Ada variasi besar dalam ekonomi nasional dan standar hidup masyarakat dari satu daerah ke daerah lain. Perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat dalam hal-hal seperti pendapatan, pencapaian pendidikan, atau hasil kesehatan. Kesenjangan regional ini memunculkan kesulitan yang berkaitan dengan kesetaraan, seperti fakta bahwa, pertama, mereka berkontribusi terhadap ketidaksetaraan secara keseluruhan di dalam negara dan, kedua, mereka terkait dengan ketidaksetaraan kesempatan, yang dapat dinilai dengan hal-hal seperti mobilitas antargenerasi. Peningkatan taraf hidup masyarakat harus menjadi hasil akhir dari upaya setiap bangsa untuk memajukan pembangunan ekonominya. Untuk mencapai tujuan ini, pembangunan ekonomi yang kuat dan distribusi pendapatan yang adil sangat penting (Sulistiwati, 2012).

Terlepas dari kenyataan bahwa ekonomi Indonesia telah menikmati pertumbuhan yang relatif cepat dan konsisten selama beberapa dekade terakhir, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam tingkat perkembangan ekonomi antara berbagai daerah. Salah satu situasi tersebut tercipta dari pemerataan penduduk, sumber daya alam, dan aktivitas ekonomi lintas wilayah di Indonesia, serta pengaruh jangka panjang dari sistem pembangunan wilayah terpusat yang berfokus pada wilayah hulu hingga hilir.

Pemerintah menanggapi kekhawatiran warga dengan serius melalui perancangan struktur, proses, dan mekanisme

pemerintahan (Gandasari, et al., 2021). Di Indonesia, upaya pemerintah untuk meningkatkan jaringan distribusi negara terus berlanjut (Nainggolan, et al., 2020). Secara umum, perencanaan pembangunan dilakukan dalam waktu yang dialokasikan untuk perumusan strategi untuk mewujudkan ketidakpastian selalu menjadi pusat proses pengembangan (Faried & Sembiring, 2019). Birokrat perencanaan di bidang Pembangunan melakukan proses sosial yang dikenal sebagai "pembangunan," yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui reformasi kelembagaan (Basmar, et al., 2021); (Faried, et al., 2022). Penciptaan strategi adalah proses abadi yang mengalami perubahan periodik dan konstan dengan cara yang secara dinamis terkait dengan pengaturan peradaban (Sudarmanto, et al., 2020).

Salah satu kondisi tersebut dihasilkan oleh pemerataan sumber daya alam antar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan juga mencakup upaya yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat, dan untuk menyalurkan minat mereka ke dalam proses pengambilan keputusan tentang isu-isu yang mempengaruhi mereka dan yang berusaha untuk meningkatkan kekuatan masyarakat, daripada ketergantungan pengabdian yang menghubungkan ledakan dan penerima manfaat (Purba, et al., 2021).

Ada kemungkinan bahwa kesenjangan regional memiliki implikasi negatif terhadap efisiensi ekonomi juga. Ini karena pilihan terbatas untuk orang-orang yang terjebak di tempat yang salah dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan potensi, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan total. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upayanya untuk menerapkan pembangunan yang adil di berbagai wilayahnya adalah konfigurasi fisik negara, yang berbentuk kepulauan. Karena itu, kebijakan otonomi daerah berpotensi mendorong pembangunan yang lebih besar karena kebijakan tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai konsekuensi langsung,

implementasi kebijakan ini akan mengarah pada peningkatan pembangunan. Pertumbuhan industri ini telah menciptakan efek riak, kadang-kadang dikenal sebagai efek pengganda, yang telah menyebar ke industri yang berdekatan (Faried, et al., 2019).

7.2. Gagasan Disparitas Pembangunan Ekonomi

Rencana yang lengkap dan terintegrasi yang mempertimbangkan karakteristik potensial dan sumber daya sektor ini diperlukan untuk setiap kebijakan atau intervensi di sektor ini jika ingin menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan sektor ini. (Faried, et al., 2022). Pengetahuan tentang ekonomi, tanpa diragukan lagi, merupakan komponen penting dari peradaban modern (Faried, et al., 2021). Modernisasi pembangunan suatu negara saat ini dipengaruhi oleh kebutuhan globalisasi dan regionalisasi (Kurniullah, et al., 2021). Kemiskinan dan ketidaksetaraan, termasuk perbedaan antar wilayah dan ketidaksetaraan antar kelompok dan ketidaksetaraan lintas sektor, hampir memicu revolusi sosial karena kecemburuan sosial antar kelompok. Karena keadaan ekonomi, revolusi sosial hampir tersulut. Pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas adalah kunci dari "Trilogi Pembangunan" pemerintah Indonesia, itulah sebabnya prinsip ini sangat menonjol dalam Kerangka Pembangunan Nasional negara ini. Setiap strategi untuk pertumbuhan ekonomi harus menggabungkan ketiga elemen dari "Trilogi Pembangunan": lingkungan yang berubah, prioritas yang bergeser, dan peluang baru (Irawan, 2012).

Ketika ada bukti kesenjangan yang melebar dalam pendapatan dan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah atau kelompok, pemerintah memprioritaskan penanganan masalah keadilan dengan mengalihkan perhatian dari dua faktor lainnya. Ini terjadi ketika ada kesepakatan luas bahwa ekonomi tumbuh, tetapi ada juga tanda-tanda melebarnya ketidaksetaraan. Demikian pula, kualitas ini diberikan bobot lebih ketika ada kebutuhan mendesak untuk stabilitas ekonomi.

Semakin maju suatu daerah, semakin besar kemungkinan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan sumber daya manusia akan berhasil (Marit, et al., 2021).

Ketersediaan sumber daya alam dan struktur populasi adalah dua faktor kunci yang berkontribusi terhadap variasi regional, karena variasi ini, tingkat di mana daerah yang berbeda dapat secara positif mempengaruhi proses pembangunan juga berbeda. Akibatnya, seharusnya tidak mengejutkan bahwa setiap wilayah biasanya berisi daerah maju dan miskin. Perbedaan kekayaan antar daerah ini berakibat pada standar hidup umum di masing-masing wilayah tersebut. Sebagai konsekuensi dari fitur kesenjangan pembangunan yang terjadi di berbagai lokasi ini, pembentukan program pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki dampak

Gambar 8.1
Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat Tahun 2014-2022



Sumber: (Nurhanisah, 2023)

Terlepas dari kenyataan bahwa ekonomi nasional mengalami pertumbuhan negatif selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020, ia terus menunjukkan ketahanannya dan pulih lebih cepat dari yang diharapkan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin kuat setiap saat. Perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik sebesar 5,01% dari tahun ke tahun selama kuartal IV 2022. Kenaikan yang sangat baik sebesar 5,31% (ctc) dicapai untuk ekonomi Indonesia untuk keseluruhan tahun 2022 jika diukur secara setahun penuh. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,2% (ctc), dan sekali lagi mendekati level 5% seperti sebelum pandemi.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2022, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2022 atau qtq, meningkat sebesar 0,36%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2022 lebih tinggi 5,01% dibandingkan triwulan IV tahun sebelumnya. Untuk mencapai kemajuan, sangat penting bahwa pemerintah dan berbagai tingkat pemerintah daerah berkolaborasi dan mencapai kesepakatan (Sartika, et al., 2022) karena negara ini peduli dengan mengendalikan kekuatan ekonominya (Hapsari, et al., 2022). Saling ketergantungan dan pengaruh timbal balik ini akan mengarah pada keseimbangan dinamis dalam ekosistem (Simarmata, et al., 2022). Lihat beberapa cara alternatif untuk mewakili iklim ekonomi saat ini, jika dibandingkan dengan angka-angka dari masa-masa sebelumnya, ini memungkinkan laju ekspansi ekonomi untuk dihitung (Faried, et al., 2023).

7.3. Hubungan Pembangunan Ekonomi Dengan Disparitas

Ada fenomena umum yang akan muncul sebagai akibat dari proses pertumbuhan suatu wilayah: ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan ini memiliki

konsekuensi bagi proses pembangunan daerah dan tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dalam kebanyakan kasus seperti pada ketidakpuasan publik dengan hasil pembangunan dan kecemburuan sosial ekonomi (Ernawati, 2021). Perekonomian memiliki peranan yang krusial dalam suatu daerah karena jika terjadi pembangunan dalam perekonomian maka daerah tersebut juga mengalami pembangunan, yaitu pembangunan kemajuan dalam kesejahteraan rakyatnya. Jika ada perkembangan ekonomi, wilayah tersebut juga mengalami perkembangan.

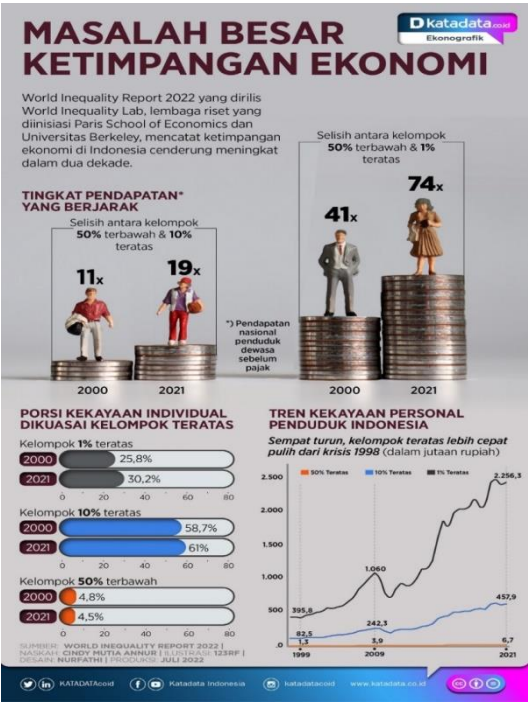
Jika ada pertumbuhan ekonomi, maka daerah tersebut akan menikmati pertumbuhan juga. Dalam ekonomi, setiap saat ada setidaknya tiga aspek fundamental atau nilai-nilai inti yang, di masa depan, akan menjadi kerangka konseptual dan panduan yang berusaha untuk mencerminkan kemajuan signifikan ini. Ini karena para ekonom percaya bahwa elemen-elemen ini diperlukan untuk memahami ekonomi. Menjaga sumber daya ekonomi suatu negara didistribusikan secara merata adalah yang paling penting (Sudarmanto, et al., 2021).

Disparitas mengacu pada distribusi manfaat dan peluang yang tidak adil yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi, dan ini adalah masalah yang dapat diatasi dan dikurangi baik dalam ekonomi pasar maupun ekonomi terencana (Barena, 2019). Disparitas di bidang pembangunan ekonomi. Di lokasi di mana tingkat kepadatan tinggi adalah salah satu elemen yang berkontribusi terhadap perbedaan dalam pembangunan ekonomi, ekonomi kepadatan tinggi cenderung menikmati perkembangan pesat dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan daerah dengan kepadatan rendah, yang biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih lambat.

Bahkan jika isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, implementasi akan gagal jika orang-orang

yang ditugaskan untuk melaksanakannya tidak memiliki sarana untuk melakukannya (Mustanir, et al., 2023). Memainkan peran penting dalam mengatur ekonomi, distribusi kekayaan, dan pengembangan teknologi baru (Baharuddin, et al., 2023). Kapasitas dan kuantitas masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan berbasis masyarakat akan diperlukan agar mereka mampu dan mengalami proses pertumbuhan (Afriansyah, et al., 2023). Istilah struktur ekonomi regional mengacu pada hubungan ekonomi, teknologi, kelembagaan, dan organisasi internal lainnya serta hubungan kuantitatif yang ada antara berbagai unit ekonomi yang membentuk suatu wilayah. Ini adalah salah satu faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan

Gambar 7.2
Masalah Ketimpangan Ekonomi



Sumber: (Annur, 2022)

Menurut temuan survei, tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia telah meningkat selama dua dekade terakhir. Hal ini terlihat dari kesenjangan yang terus meningkat antara jumlah pendapatan nasional dari populasi orang dewasa sebelum pajak dan tingkat pendapatan tersebut. Jika dibandingkan dengan kesenjangan yang ada antara 50% termiskin dan 10% teratas pada tahun 2000, kesenjangan yang ada pada tahun 2021 adalah 19 kali lebih besar. Kesenjangan antara 50% terendah dan 1% teratas adalah 41 kali pada tahun 2000, dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 74 kali pada tahun 2021.

Elit atas, sementara itu, mengontrol persentase kekayaan individu yang tersedia untuk individu. Dalam kategori mereka yang memiliki 1% atau lebih dari total kekayaan rakyat Indonesia, menguasai 30,2% dari total itu. Setelah kelompok 10% teratas, yang mengendalikan 61% dari total kekayaan penduduk negara itu, kelompok yang terdiri dari 50% populasi termiskin memegang 4,5% dari total kekayaan itu. Kekayaan orang Indonesia telah meningkat secara dramatis sejak tahun 1999. Meskipun ada peningkatan ini, disparitas kekayaan pada dasarnya tetap sama

Kondisi demografis berbagai daerah perlu dibedakan satu sama lain. Dalam konteks ini, populasi besar memainkan peran penting karena kemampuan mereka untuk merangsang ekspansi ekonomi. Akar penyebab perbedaan mungkin terletak pada lokasi dengan distribusi listrik yang tidak memadai, tetapi ini bukan satu-satunya penjelasan yang mungkin. Bahkan jika pendapatan individu telah meningkat ke titik yang cukup untuk menutupi tuntutan dasar yang paling sederhana, pendapatan individu masih jauh lebih rendah daripada populasi di sekitar mereka, menunjukkan bahwa individu tersebut masih lebih rendah statusnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa situasi di sekitar individu adalah apa yang menentukan tingkat kemiskinan mereka lebih dari lingkungan individu. Kurangnya rencana pembangunan di semua lapisan masyarakat, yang

mengakibatkan kesenjangan ekonomi, adalah akar penyebab kemiskinan relatif, yang merupakan keadaan kekurangan yang dikenal sebagai "kemiskinan relatif."

Dalam kerangka pembangunan, kemiskinan dan ketidaksetaraan adalah elemen yang tak terhindarkan terkait satu sama lain. Ketimpangan dalam status sosial adalah faktor mendasar yang menyebabkan kemiskinan di suatu negara. Sejumlah kecil orang dapat menikmati sebagian besar pendapatan suatu negara, sedangkan sebagian besar penduduk menerima jumlah minimal atau tidak sama sekali. Orang-orang ini mampu melakukan ini karena orang-orang ini mengendalikan sebagian besar sumber daya ekonomi negara. Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap besarnya ketimpangan memiliki efek negatif, yang dapat dinyatakan sebagai berikut: ketika tingkat kemiskinan meningkat, maka juga akan mengakibatkan peningkatan kesenjangan ekonomi yang sudah ada antar masyarakat.

Dibutuhkan sejumlah besar waktu untuk kemiskinan dan bentuk-bentuk lain dari masalah sosial untuk muncul, membuat ketidaksetaraan sosial menjadi tantangan yang signifikan, terutama di daerah berkembang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketimpangan pembangunan adalah pendahulu munculnya kemiskinan dan bentuk-bentuk masalah sosial lainnya. Akibatnya, realisasi cepat pemerataan pembangunan harus dilakukan untuk menghindari terciptanya ketidakadilan antar daerah.

Mungkin ada berbagai alasan untuk ketidaksetaraan sosial. Pada berbagai titik waktu sepanjang sejarah, sejumlah variabel yang berbeda telah datang bersama-sama untuk membentuk banyak individu. Pada saat ini, kesenjangan kekayaan adalah elemen utama yang berkontribusi terhadap perbedaan sosial; Faktor-faktor lain, seperti kelas sosial dan gelar aristokrat, menjadi semakin tidak relevan (Ding , 2010).

Dengan kata lain, ketidaksetaraan ekonomi adalah akar penyebab kesenjangan sosial, terlepas dari apakah kesenjangan ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, laki-laki dan perempuan, atau daerah pesisir dan pedalaman.

Penyempitan perbedaan sosial dan berkurangnya ketidaksetaraan kekayaan telah berada di garis depan wacana publik selama beberapa tahun pada saat ini. Baik pemerintah negara-negara kaya maupun negara-negara berkembang telah dipaksa untuk memusatkan perhatian mereka pada pengentasan kemiskinan dan promosi alokasi sumber daya sosial yang lebih adil. Orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan di dunia, kesenjangan sosial telah berkembang di banyak negara, dan ini telah menyebabkan semua ini terjadi. Percepatan pembangunan teknologi mengarah pada peningkatan tingkat perkembangan ekonomi daerah yang lebih pesat dan struktur ekonomi daerah yang lebih optimal secara optimal. Budaya dan kepercayaan spiritual akan selalu berdampak pada setiap kegiatan ekonomi.

Untuk secara efektif mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi regional, pertama-tama kita harus menumbuhkan budaya khas daerah yang ada di dalamnya. Akhirnya, struktur regional yang wajar harus mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi terbaik dari sistem secara keseluruhan dengan mendorong aliran bebas, alokasi optimal, dan pengembangan elemen sumber daya regional yang terkoordinasi atas dasar eksplorasi penuh keunggulan dan potensi regional. Keadaan perkembangan ekonomi regional sebagian besar tergantung pada keadaan perkembangan industri-industri top di wilayah tersebut, yang terutama dibedakan oleh kapasitas inovasi yang tinggi. Ada juga batasan tertentu yang terkait dengan model transisi gradien

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, et al., 2023. *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Padang(Sumatera Barat): PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.*
- Annur, C. M., 2022. *Masalah Besar Ketimpangan Ekonomi di Indonesia.* [Online] Available at: <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/62d4e3cf5fb18/masalah-besar-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia>
- Baharuddin, R. A. et al., 2023. *Ilmu Ekonomi.* Makasar: Mitra Ilmu.
- Barena, I. N., 2019. *Apa Itu Pembangunan Ekonomi? Lantas Apa Hubungannya dengan Disparitas?.* [Online] Available at: <https://www.kompasiana.com/indinadabarena/5d7e8cf4097f363cfc1013d4/apa-itu-pembangunan-ekonomi-lantas-apa-hubungannya-dengas-disparitas>
- Basmar, E. et al., 2021. *Ekonomi Pembangunan: Strategi dan Kebijakan.* Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.
- Ding , Y., 2010. *SOCIAL AND ECONOMIC DISPARITIES. ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT*, Volume 1.
- Ernawati, D. P., 2021. *The Effect of Economic Growth and Poverty on Development Disparities in West Java Province. Disparities in West Java Provinc*, 4(2), pp. 3193-3203.
- Faried, A. I. et al., 2023. *Pengantar Ekonomi Pembangunan.* Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.
- Faried, A. I. et al., 2021. *Sosiologi Ekonomi.* Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.

- Faried, A. I. et al., 2022. *Bisnis dan Perekonomian Indonesia*. Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.
- Faried, A. I. & Sembiring, R., 2019. *Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan*. Medan(Sumatera Utara): Indonesia.
- Faried, A. I., Sembiring, R. & Hasanah, U., 2022. *Pembangunan Ekonomi Pertanian Perdesaan Melalui Potensi Integrasi Tanaman Cabe dan Ternak Ayam*. Sumatera Barat: MITRA CENDEKIA MEDIA.
- Faried, A. I., Sembiring, R. & Nasution, L. N., 2019. *Inovasi Trend Kekinian Industri Halal Fashion Semakin Menjamur Di Indonesia*. s.l.:Qiara Media Patner.
- Gandasari, D. et al., 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.
- Hapsari, T. D. et al., 2022. *PENGANTAR EKONOMI MAKRO*. s.l.:PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Irawan, D., 2012. *Konsep Disparitas Pembangunan Ekonomi*. [Online]
Available at:
<https://dedeirawan32.wordpress.com/2012/05/14/konsep-disparitas-pembangunan-ekonomi/#:~:text=ketimpangan%20pembangunan%20dapat%20terjadi%20apa%20bila%20pendapatan%20dan,juga%20berpengaruh%20terhadap%20pembangunan%20ekonomi%20di%20suatu%20daerah>.
- Kurniullah, A. Z. et al., 2021. *Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.
- Marit, E. L. et al., 2021. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.

- Mustanir, A. et al., 2023. *Dinamika Administrasi Publik Indonesia*. Padang(Sumatera Barat): PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Nainggolan, L. E. et al., 2020. *Belajar dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*. Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.
- Nurhanisah, Y., 2023. *Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat*. [Online] Available at: <https://indonesiabaik.id/infografis/ekonomi-indonesia-tumbuh-kuat>
- Purba, B. et al., 2021. *Ekonomi Pembangunan*. Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.
- Sartika, S. H. et al., 2022. *Ekonomi Kreatif*. Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.
- Simarmata, M. M. et al., 2022. *Sistem Manajemen Lingkungan*. Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.
- Sudarmanto, E. et al., 2020. *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sudarmanto, E. et al., 2021. *Teori Ekonomi: Mikro dan Makro*. Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.
- Sulistiawati, R., 2012. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(1), pp. 29-50.

BAB 8

SEKTOR EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

Oleh Ana Fitriyatul Bilgies

8.1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mencapai kemajuan suatu negara. Sebagai salah satu sektor yang paling vital, sektor ekonomi memiliki peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, sektor ekonomi menjadi semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memahami perkembangan terbaru di sektor ekonomi dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi negara.

Sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi menciptakan peluang kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong investasi. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, permintaan untuk barang dan jasa meningkat, sehingga meningkatkan permintaan akan produk dan jasa yang dihasilkan oleh sektor ekonomi. Dengan demikian, sektor ekonomi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan ekonomi masyarakat. Namun, pertumbuhan sektor ekonomi tidaklah mudah. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor ekonomi, termasuk regulasi, kebijakan pemerintah, dan inovasi teknologi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penting bagi

pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama dan berinvestasi dalam infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan penelitian dan pengembangan teknologi.

Selain itu, sektor ekonomi juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi global. Seiring dengan meningkatnya perdagangan internasional dan investasi, sektor ekonomi menjadi semakin terintegrasi dalam ekonomi global. Sebagai hasilnya, sektor ekonomi dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi negara dan masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan ekspor dan impor, serta memperkuat posisi negara dalam pasar global. Namun, sektor ekonomi juga menghadapi berbagai tantangan dalam lingkungan global yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Beberapa tantangan tersebut meliputi ketidakpastian ekonomi global, persaingan global yang meningkat, dan masalah lingkungan seperti perubahan iklim. Oleh karena itu, penting bagi sektor ekonomi untuk mengadopsi pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan ini. (Purwana, 2013)

Dalam pembangunan ekonomi, konsep dan prinsip ekonomi Islam telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. Prinsip-prinsip ini menekankan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan berbagai kewajiban sosial dalam kegiatan ekonomi, serta keberlanjutan dan kesadaran lingkungan. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, sektor ekonomi Islam telah menjadi pusat perhatian dalam rangka menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam jurnal ini, kita akan membahas peran sektor ekonomi dalam pembangunan ekonomi Islam. Kita akan membahas berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ekonomi Islam, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sektor ini. Kita juga akan membahas tentang konsep dan prinsip ekonomi Islam yang harus diadopsi oleh sektor

ekonomi Islam dalam menciptakan sebuah sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pertama-tama, kita akan membahas tentang konsep dan prinsip ekonomi Islam yang harus diadopsi oleh sektor ekonomi Islam. Konsep dan prinsip ini meliputi pemikiran ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kewajiban sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara adil, seimbang, dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam juga mencakup adanya pengaturan yang ketat dalam hal distribusi kekayaan dan sumber daya, sehingga tidak ada kesenjangan yang besar antara individu atau kelompok sosial dalam masyarakat.

Namun, pertumbuhan sektor ekonomi Islam tidaklah mudah. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor ekonomi Islam, termasuk regulasi, kebijakan pemerintah, dan inovasi teknologi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama dan berinvestasi dalam infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan penelitian dan pengembangan teknologi.

Selain itu, sektor ekonomi Islam juga menghadapi berbagai tantangan dalam lingkungan global yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Beberapa tantangan tersebut meliputi ketidakpastian ekonomi global, persaingan global yang meningkat, dan masalah lingkungan seperti perubahan iklim. Oleh karena itu, penting bagi sektor ekonomi Islam untuk mengadopsi pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan ini. Dalam jurnal ini, kita akan membahas berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh sektor ekonomi Islam dalam menciptakan sebuah sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kita juga akan membahas berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini, termasuk

pengembangan keuangan syariah, pemberdayaan masyarakat. Sektor ekonomi memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi Islam. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, sektor ekonomi Islam harus memenuhi berbagai prinsip dan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kewajiban sosial. Dalam praktiknya, sektor ekonomi Islam harus berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sambil tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Mahri *et al.*, 2021)

8.2. Sejarah dan Perkembangan Ekonomi Islam

8.2.1. Sejarah Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki sejarah panjang dan perkembangan yang menarik. Berikut ini adalah sejarah dan perkembangan ekonomi Islam:

1. Zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin
Pada masa awal Islam, ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan spiritualitas, seperti keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan. Selama masa ini, ekonomi Islam berkembang melalui perdagangan, zakat, dan pemberdayaan ekonomi kaum miskin dan kaum perempuan
2. Zaman Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah
Pada masa ini, ekonomi Islam semakin berkembang melalui perdagangan, pertanian, dan kegiatan industri seperti pertambangan, perkebunan, dan pembuatan kain. Selain itu, penggunaan uang kertas pertama kali diperkenalkan oleh Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz pada abad ke-8.
3. Zaman Kesultanan Utsmaniya

Pada masa ini, ekonomi Islam berkembang melalui perdagangan internasional dan domestik, serta pengembangan industri manufaktur seperti pembuatan keramik, kain, dan senjata. Kesultanan Utsmaniyah juga mengembangkan sistem keuangan Islam seperti awqaf (wakaf) dan sukuk (obligasi syariah)

4. Zaman Penjajahan dan Kolonialisme

Pada masa ini, ekonomi Islam mengalami kemunduran akibat penjajahan dan kolonialisme oleh kekuatan Barat. Namun, pemikir-pemikir Muslim terus berupaya memperjuangkan pengembangan ekonomi Islam melalui gagasan-gagasan seperti bank Islam dan ekonomi berbasis wakaf.

5. Zaman Modern: Pada abad ke-20

Ekonomi Islam mengalami kebangkitan melalui upaya untuk mengembangkan model-model ekonomi Islam yang lebih kontemporer dan sesuai dengan tuntutan zaman. Beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain pengembangan perbankan Islam, investasi sosial dan wakaf, serta pengembangan industri halal.

Dalam perkembangan ekonomi Islam modern, beberapa negara seperti Malaysia dan Arab Saudi telah memainkan peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi Islam, termasuk pengembangan perbankan Islam dan industri halal. Selain itu, beberapa organisasi seperti Islamic Development Bank (IDB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) juga telah berperan dalam pengembangan ekonomi Islam.

8.2.2. Konsep Ekonomi Islam

Konsep ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan kewajiban sosial. Konsep ekonomi Islam menekankan pada penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk menciptakan keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Salah satu prinsip ekonomi Islam yang penting adalah prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya. Dalam ekonomi Islam, keadilan harus dipenuhi dalam segala aspek ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Prinsip keadilan ini tercermin dalam sistem zakat dan wakaf, di mana harta yang dimiliki oleh umat Muslim harus didistribusikan dengan cara yang adil dan merata.

Prinsip lain dalam ekonomi Islam adalah prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, kepentingan individu harus dipertimbangkan dalam konteks kepentingan sosial yang lebih besar. Konsep ini tercermin dalam praktek bisnis dan investasi yang halal dan menjauhi riba, gharar, dan maysir, yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, konsep ekonomi Islam juga menekankan pada pentingnya kemanfaatan dan kewajiban sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, penggunaan sumber daya harus dilakukan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Selain itu, umat Muslim juga memiliki kewajiban sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Secara keseluruhan, konsep ekonomi Islam menekankan pada prinsip-prinsip yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Konsep ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi sistem ekonomi yang berpusat pada keuntungan semata,

dan dapat membantu menciptakan keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. (Mth, 2003)

8.2.3. Prinsip ekonomi Islam

1. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Dalam ekonomi Islam, keadilan harus dipenuhi dalam segala aspek ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Keadilan harus merata bagi seluruh pihak, baik pengusaha, karyawan, konsumen, maupun masyarakat luas. Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pada kesetaraan dalam kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi ras, agama, atau jenis kelamin.

2. Prinsip Keseimbangan

Dalam sistem ekonomi Islam, kepentingan individu harus dipertimbangkan dalam konteks kepentingan sosial yang lebih besar. Konsep ini tercermin dalam praktek bisnis dan investasi yang halal dan menjauhi riba, gharar, dan maysir, yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip keseimbangan ini juga menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3. Prinsip Kemanfaatan dan Kewajiban Sosial

Dalam sistem ekonomi Islam, penggunaan sumber daya harus dilakukan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, umat Muslim juga memiliki kewajiban sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Prinsip kemanfaatan dan kewajiban sosial ini juga menekankan pada pentingnya pengembangan usaha dan investasi yang

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada keuntungan semata.

4. **Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas**
Dalam ekonomi Islam, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi. Hal ini tercermin dalam praktik bisnis yang jujur dan terbuka, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan. Selain itu, prinsip ini juga menekankan pada pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.
5. **Prinsip Kerjasama dan Solidaritas**
Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip kerjasama dan solidaritas antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi sangat penting. Hal ini tercermin dalam praktik kemitraan dan kolaborasi antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat, serta dalam praktek keuangan Islam seperti mudharabah dan musharakah.
6. **Prinsip Berkelanjutan**
Dalam ekonomi Islam, prinsip keberlanjutan sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini tercermin dalam praktik bisnis dan investasi yang berkelanjutan, termasuk dalam hal pengembangan produk dan jasa yang ramah lingkungan, serta dalam praktek pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan seperti hutan dan air.

8.2.4. Sektor Ekonomi Dalam Islam

Sektor ekonomi dalam Islam mencakup semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu, keluarga, dan masyarakat dalam kerangka prinsip-prinsip Islam. Pertanian merupakan sektor ekonomi yang penting dalam Islam karena memenuhi

kebutuhan pangan masyarakat. Pertanian dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu, praktik-praktik Islam seperti zakat dan infaq juga dapat diterapkan dalam pertanian untuk membantu kaum miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Selain itu juga, perdagangan juga merupakan sektor ekonomi penting dalam Islam karena memberikan akses kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, perdagangan harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Konsep jual beli dalam Islam juga mengikuti prinsip-prinsip seperti kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab.

Ekonomi merupakan hal yang identic dengan keuangan, oleh karena itu keuangan juga merupakan sektor ekonomi penting dalam Islam, terutama dalam konteks perbankan dan investasi. Dalam Islam, praktik-praktik seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) dianggap tidak etis dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam keuangan Islam, terdapat instrumen-instrumen seperti mudharabah (bagi hasil), musharakah (bersama), dan murabahah (jual beli dengan markup) yang digunakan untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak hanya itu, Industri halal adalah sektor ekonomi yang berkembang dalam Islam karena melibatkan aktivitas-aktivitas yang dianggap halal atau diperbolehkan dalam Islam, seperti makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. Industri halal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tidak mengandung bahan haram atau tercemar.

Dan yang terakhir, Sosial dan wakaf merupakan sektor ekonomi yang unik dalam Islam karena melibatkan praktik-praktik filantropi dan amal yang ditujukan untuk membantu kaum miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Praktik-praktik seperti zakat, infaq, dan wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek sosial dan kemanusiaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

8.2.5. Kontribusi Sektor Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam

Kontribusi sektor ekonomi dalam pembangunan ekonomi Islam sangat penting karena sektor ekonomi merupakan tulang punggung bagi pembangunan ekonomi yang sukses dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa kontribusi sektor ekonomi dalam pembangunan ekonomi Islam, diantaranya : (Fitria, 2016)

1. Menciptakan lapangan kerja
Sektor ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat pengangguran. Dalam Islam, penciptaan lapangan kerja dianggap sebagai amal yang pahalanya akan terus mengalir, terutama jika lapangan kerja tersebut membantu kaum miskin.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi
Sektor ekonomi yang sehat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pengusaha dan investor. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil sangat dihargai, karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3. Meningkatkan perdagangan

Sektor ekonomi dapat meningkatkan perdagangan, baik di tingkat lokal maupun internasional, dan membuka akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, perdagangan yang adil dan transparan sangat ditekankan, dan konsep jual beli yang baik dan etis merupakan landasan dari perdagangan yang sukses.

4. Mengembangkan industri halal

Sektor ekonomi dapat mengembangkan industri halal yang diperlukan oleh masyarakat Muslim, seperti makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. Pengembangan industri halal dapat membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Membangun infrastruktur

Sektor ekonomi dapat membantu membangun infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Dalam Islam, pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat dianggap sebagai amal yang bernilai tinggi.

6. Meningkatkan kesejahteraan sosial

Sektor ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan membantu kaum miskin dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil. Dalam Islam, praktik-praktik seperti zakat, infaq, dan wakaf dapat digunakan untuk membantu kaum miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Dengan demikian, sektor ekonomi memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Islam, baik dalam hal menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdagangan, mengembangkan industri halal, membangun infrastruktur, maupun meningkatkan kesejahteraan sosial. Semua kontribusi

ini memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan di bawah prinsip-prinsip Islam.

8.2.6. Pentingnya Sektor Ekonomi Islam

Beberapa alasan mengapa sektor ekonomi penting dalam pembangunan ekonomi Islam yaitu dengan adanya sektor ekonomi Islam maka akan menciptakan lapangan kerja. Sektor ekonomi Islam dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, kegiatan ekonomi harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, sektor ekonomi Islam dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, sektor ekonomi Islam juga akan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kewajiban sosial, sektor ekonomi Islam harus memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi dengan baik. Misalnya, sektor ekonomi Islam harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai ke makanan, air bersih, perumahan, dan layanan kesehatan.

Secara tidak langsung, sektor ekonomi Islam juga akan mengembangkan infrastruktur. Sebuah sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif membutuhkan infrastruktur yang baik dan berkualitas. Sektor ekonomi Islam dapat membantu dalam pembangunan infrastruktur baru yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Dengan demikian, sektor ekonomi Islam dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Tak terkecuali, sektor ekonomi Islam juga dapat meningkatkan inklusivitas. Sebuah

sistem ekonomi yang inklusif harus memperhatikan kepentingan semua orang, termasuk mereka yang tidak mampu secara finansial. Sektor ekonomi Islam dapat membantu meningkatkan inklusivitas dalam sistem ekonomi, dengan menyediakan berbagai layanan keuangan syariah seperti pembiayaan mikro dan zakat, serta mempromosikan koperasi dan wirausaha sosial.

Dan yang terakhir dengan adanya sektor ekonomi Islam maka akan mendorong pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi dan inovasi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sektor ekonomi Islam dapat membantu dalam pengembangan teknologi dan inovasi, dengan menyediakan pembiayaan untuk riset dan pengembangan teknologi, serta mendorong pengembangan sektor-sektor yang berbasis teknologi. Dengan demikian, sektor ekonomi Islam memegang peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui berbagai strategi dan inovasi yang diadopsi (Pendidikan and Konseling, 2022)

8.2.7. Tantangan dan Cara Mengatasinya Dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Islam

Pengembangan sektor ekonomi Islam masih menghadapi beberapa tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi sektor ekonomi Islam dan cara mengatasinya:

1. Kurangnya pemahaman tentang konsep ekonomi Islam
Pemahaman yang kurang tentang konsep ekonomi Islam dapat menghambat pengembangan sektor ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan

pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan cara mengimplementasikannya dalam praktik.

2. Ketergantungan pada ekonomi konvensional
Ketergantungan pada ekonomi konvensional dapat menghalangi pengembangan sektor ekonomi Islam. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk mengembangkan sektor ekonomi Islam secara mandiri dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan ekonomi Islam.
3. Tantangan regulasi
Beberapa negara masih memiliki regulasi yang kurang mendukung pengembangan sektor ekonomi Islam, seperti masalah perpajakan dan perizinan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari pemerintah dan badan-badan regulatori terkait.
4. Keterbatasan sumber daya
Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pengembangan sektor ekonomi Islam, seperti sumber daya manusia, teknologi, dan modal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan dalam ekonomi Islam, serta memfasilitasi pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pengusaha dan investor yang tertarik.
5. Kompetisi yang ketat
Sektor ekonomi Islam masih harus bersaing dengan sektor ekonomi konvensional yang lebih mapan dan terorganisir dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan menghasilkan produk dan layanan berkualitas yang lebih baik dan inovatif.

6. Masalah kesetaraan gender

Sebagian besar sektor ekonomi Islam masih didominasi oleh laki-laki, dan perempuan masih menghadapi kesulitan untuk memasuki sektor ini. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses perempuan ke pendidikan dan pelatihan ekonomi Islam, serta mempromosikan kesetaraan gender dalam bisnis dan industri.

Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, bisnis, masyarakat, dan organisasi-organisasi keagamaan. Dengan dukungan yang tepat, sektor ekonomi Islam dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

8.2.8. Perkembangan Sektor Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam Di Indonesia

Dalam beberapa dekade terakhir. Terdapat beberapa sektor ekonomi yang menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia, antara lain: (Irawan, Dianita and Salsabila Mulya, 2021)

1. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah menjadi sektor yang paling terkenal dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, perbankan syariah telah berkembang pesat dan saat ini terdapat lebih dari 15 bank syariah di Indonesia. Perbankan Syariah menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Industri Halal

Industri halal juga menjadi sektor yang semakin berkembang dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga permintaan produk halal sangat tinggi. Indonesia telah menjadi produsen produk halal terbesar di dunia, seperti makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi.

3. Investasi Syariah

Investasi syariah juga menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Terdapat berbagai produk investasi syariah yang ditawarkan, seperti reksa dana syariah, sukuk, dan investasi properti syariah. Semakin banyak investor yang memilih produk investasi syariah karena dianggap lebih etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Pariwisata Syariah

Pariwisata syariah juga menjadi sektor yang semakin berkembang dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Pariwisata syariah menawarkan berbagai fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti hotel dan restoran yang menyediakan makanan halal, serta tempat wisata yang tidak melanggar aturan agama.

Dalam keseluruhan, perkembangan sektor ekonomi dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia terus mengalami peningkatan pesat. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Islam di Indonesia semakin diterima dan diapresiasi oleh masyarakat. Pembangunan ekonomi Islam di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan yang berbasis syariah. Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi Islam

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi Islam dengan membentuk Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Badan Pengawas Pasar Modal Syariah (Bapepam-LK). Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung pengembangan sektor keuangan syariah, seperti pemberian insentif fiskal bagi lembaga keuangan syariah, peningkatan jumlah unit usaha syariah di bank konvensional, dan pengembangan produk-produk keuangan berbasis syariah.

Di samping itu, masyarakat Indonesia juga semakin banyak yang tertarik untuk menggunakan produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia, serta semakin banyaknya produk dan layanan keuangan berbasis syariah yang ditawarkan. Namun, meskipun sektor ekonomi Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang positif, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep ekonomi Islam. Selain itu, masih terbatasnya infrastruktur dan akses keuangan di beberapa daerah juga menjadi tantangan dalam pengembangan sektor ekonomi Islam di Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk terus mendukung pengembangan sektor ekonomi Islam di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan

meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep ekonomi Islam melalui program-program edukasi dan pelatihan. Selain itu, perlu juga adanya pengembangan infrastruktur dan akses keuangan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. (Supaijo, Iqbal and Mawaddah, 2017)

8.3. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor ekonomi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, sektor ekonomi didefinisikan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi.

Kontribusi sektor ekonomi dalam pembangunan ekonomi Islam sangatlah penting karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperbaiki kesejahteraan sosial. Melalui pengembangan sektor ekonomi Islam, masyarakat muslim dapat mengembangkan usaha yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan.

Dalam pembangunan ekonomi Islam, terdapat beberapa sektor ekonomi yang menjadi fokus, antara lain perbankan syariah, industri halal, investasi syariah, pariwisata syariah, pertanian, dan sumber daya alam. Pembangunan sektor-sektor ini mengalami peningkatan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia, menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Islam semakin diterima dan diapresiasi oleh masyarakat. Perkembangan sektor ekonomi dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor ekonomi dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Namun, pengembangan sektor ekonomi Islam masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep ekonomi Islam, ketergantungan pada ekonomi konvensional, tantangan regulasi, keterbatasan sumber daya, kompetisi yang ketat, dan masalah kesetaraan gender. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak.

Dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi, sektor ekonomi Islam dapat terus dikembangkan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berbasis nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholder untuk mengembangkan sektor ekonomi Islam yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baraba, A. (2003) 'PRINSIP DASAR OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH', *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 2(3). doi:10.21098/bemp.v2i3.271.
- Fitria, T.N. (2016) 'Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), pp. 29–40. doi:10.29040/jiei.v2i03.3.
- Irawan, H., Dianita, I. and Salsabila Mulya, A.D. (2021) 'PERAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL', *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2). doi:10.47435/asy-syarikah.v3i2.686.
- Mahri, J.W. *et al.* (2021) *Ekonomi pembangunan Islam*.
- Mth, A. (2003) 'Konsep Pembangunan Ekonomi Islam', *Al-Mawarid*, 10, pp. 128–151. doi:10.20885/almawarid.vol10.art9.
- Pendidikan, J. and Konseling, D. (2022) 'Peranan Umat Islam dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia', *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5).
- Purwana, A.E. (2013) 'Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Justicia Islamica*, 10(1). doi:10.21154/justicia.v10i1.140.
- Supaijo, Iqbal, M. and Mawaddah, H.F. (2017) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan , dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Salam:Islamic Economic Journal*, 1(1).

BAB 9

ZAKAT SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ISLAM

Oleh Banatul Hayati

9.1. Arti Penting Pembiayaan Pembangunan

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selain itu juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup serta memperluas distribusi kebutuhan pokok. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan modal bagi pembiayaan pembangunan. Modal merupakan faktor produksi yang dapat mendorong terjadinya perkembangan factor tenaga kerja maupun teknologi. Pengembangan kualitas modal manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan membutuhkan pembiayaan. Demikian juga pengembangan sektor-sektor ekonomi, seperti sektor pertanian maupun industri serta setor lainnya membutuhkan pembiayaan. Penguasaan dan pengembangan teknologi, pembangunan infrastruktur serta modernisasi juga membutuhkan pembiayaan pembangunan. Penanganan permasalahan makroekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan distribusi pendapatan juga membutuhkan pembiayaan pembangunan.

Usaha penerahan modal untuk pembiayaan pembangunan perlu diupayakan baik penerahan modal yang bersumber dari dalam negeri maupun pembiayaan dari luar negeri. Kekurangan modal yang berasal dari dalam negeri akan

membuat suatu negara dihadapkan pada pilihan kondisi anggaran belanja defisit yang membuat suatu negara dihadapkan pada situasi untuk mobilisasi dana atau mencari sumber pembiayaan dari negara lain, baik dalam bentuk hibah atau bantuan luar negeri, hutang atau pinjaman luar negeri maupun investasi asing langsung. Sebagian besar negara-negara Islam mencari alternatif pembiayaan pembangunan yang menghindarkan adanya riba dan bunga, yaitu pembiayaan pembangunan melalui zakat atau waka

9.2. Sumber Pembiayaan Pembangunan Konvensional

Berlandaskan pada persamaan yang menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G$ (11.1)

Kemudian persamaan 11.1. ditulis ulang menjadi $Y - C - G = I$...(11.2)

Persamaan 11.2 menunjukkan bahwa sumber pendanaan pembangunan berasal dari tabungan nasional (*Saving, S*) sebesar $Y - C - G$ yaitu besarnya pendapatan nasional setelah dikurangi pengeluaran konsumsi rumah tangga (*C*) dan pengeluaran pemerintah (*G*). Dalam model ini, identitas pendapatan nasional mengartikan bahwa tabungan sama dengan investasi. Dari persamaan pendapatan nasional tersebut tabungan nasional terbagi menjadi dua:

$$S = (Y - T - C) + (T - G) = I..... (11.3)$$

Persamaan 11.3 menunjukkan bahwa tabungan nasional (*Saving, S*) adalah jumlah dari tabungan swasta (*private saving*) sebesar pendapatan nasional setelah dikurangi konsumsi dan pajak sebesar $Y - T - C$ dan tabungan pemerintah (*public saving*) sebesar $T - G$. Persamaan 11.3 menunjukkan bahwa aliran dana ke pasar uang (tabungan) harus sama dengan aliran dana yang keluar dari pasar keuangan (investasi) dimana tingkat bunga (*r*) yang akan berperan menyeimbangkannya sehingga:

$$Y - C(Y - T) - G = I(r) \quad \dots\dots\dots (11.4)$$

Besarnya pengeluaran pemerintah (G) dan penerimaan pemerintah (T) dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah, sedangkan besarnya pendapatan nasional ditentukan oleh faktor produksi yang dimiliki suatu negara dan kemampuan memproduksi suatu negara. Sisi kanan persamaan memperlihatkan bahwa investasi ditentukan tingkat bunga. Jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak berarti pemerintah mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran dapat ditutup dengan melakukan dana peminjaman, baik yang bersumber dari bank dan lembaga keuangan dalam negeri maupun dari lembaga bank dan lembaga keuangan swasta dan pemerintah luar negeri (Mankiw Gregory, 2007).

Permasalahan yang dihadapi sebagian besar negara sedang berkembang adalah kesulitan dan kekurangan dalam mengerahkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari tabungan swasta, tabungan pemerintah maupun pajak yang akan digunakan untuk digunakan dalam pembangunan dan mencapai pertumbuhan ekonomi pada tingkat tertentu. Kekurangan ini didapatkan dan dipenuhi dari modal yang berasal dari sumber pembiayaan eksternal atau melakukan anggaran belanja defisit yang dibiayai dari mencetak uang atau meminjam dari Bank. Cara ini sering dihindari karena dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Modal yang berasal dari pembiayaan eksternal dapat berupa pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri, dan investasi asing langsung (*foreign direct investment*).

Mobilisasi dana pembangunan eksternal diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan modal untuk pembiayaan pembangunan, mendorong terjadinya transfer teknologi modern dari negara pemberi bantuan/pinjaman, transfer tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pembangunan serta mempercepat proses modernisasi di sektor modern yang menggunakan modal dari negara lain. Namun demikian, penggunaan modal dari negara lain sebagai pembiayaan pembangunan berkonsekuensi

munculnya masalah dalam bentuk beban ketergantungan dalam pembayaran kembali pinjaman atau *debt servicing problem*, yaitu menghadapi kesulitan bahkan mungkin ketidakmampuan membayar bunga dan membayar cicilan pokok pinjaman (Sukirno, 2012).

Fenomena *foreign exchange gap* dan *saving investment gap* yang terjadi pada negara yang kesulitan membiayai pembangunannya mendorong sejumlah negara melakukan pendanaan pembangunannya dengan mencari sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari bank dan lembaga keuangan internasional. Alasan penggunaan sumber pembiayaan pembangunan dari negara lain mengacu pada teori pemikiran Harrod dan Domar yang menjelaskan pinjaman luar negeri sebagai alternatif yang ditempuh bila investasi dan tabungan dalam negeri tidak mencukupi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kesuksesan program *Marshall Plan* dalam pemberian pinjaman untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa Barat dan Jepang (*debt led growth*) juga turut mendorong negara-negara sedang berkembang yang kesulitan modal melakukan pembiayaan pembangunannya dengan pendanaan yang bersumber dari negara lain. Dalam perkembangannya kecepatan peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri tidak dapat mengimbangi kecepatan pinjaman luar negeri sehingga terjadilah fenomena pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan peningkatan hutang luar negeri (*growth led debt*) bahkan menimbulkan terjadinya krisis hutang pada sejumlah negara sedang berkembang (Kuncoro, 2000)

9.3. Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Islam

Adopsi struktur pembiayaan Pembangunan konvensional yang dilakukan oleh sebagian besar negara sedang berkembang dan negara-negara Islam dalam menutup kesenjangan finansial melalui mobilisasi dana eksternal

menyebabkan sejumlah permasalahan bagi negara-negara peminjam. Negara-negarapeminjam tidak hanya menghadapi kesulitan dalam membayar bunga dan cicilan hutang tapi juga akhirnya terperangkap krisis hutang luar negeri. Mobilisasi dana melalui investasi asing langsung menunjukkan sejumlah persyaratan tertentu yang memberatkan negara tujuan investasi asing langsung sehingga dampak positif (*spread effect*) investasi asing langsung lebih banyak dinikmati negara pemilik modal. Sementara negara sedang berkembang yang menjadi tujuan investasi asing langsung lebih banyak mendapatkan *backwash effect*. Sedangkan program hibah/bantuan dari luar negeri yang menjanjikan adanya pinjaman lunak nyatanya tidak lebih baik dari pinjaman komersial. Beberapa hibah luar negeri tetap mensyaratkan adanya bunga dan biaya yang tidak lebih murah dari pinjaman komersial

Selain sebagai penghasil minyak, negara-negara muslim juga melakukan pinjaman luar negeri. Rasio utang luar negeri terhadap pendapatan nasional bruto cukup tinggi. Beberapa negara seperti Aljazair, Maroko, Turki, Indonesia, Somalia, dan Niger adalah contoh negara-negara yang mengalami beban layanan utang (*debt service ratio*) tinggi antara 33% hingga 69%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian negara-negara Islam akhirnya terjebak dalam praktek riba yang dilarang dalam pembiayaan publik Islam.

Secara historis zakat menjadi salah satu sumber pembiayaan semenjak masa pemerintahan Rasulullah dan khulafaur Rasyidin. Sebagai opsi pendanaan lain selain *khums* sejak tahun 2H, zakat diterapkan sebagai kewajiban pada tahun 9H. Zakat memiliki peran sentral dalam aspek keuangan negara dalam pandangan Islam, karena karakteristiknya sebagai kewajiban bagi umat Muslim, atau *obligatory zakat system*. Tanggung jawab pemerintah adalah berperan sebagai pelaksana dalam proses penghimpunan zakat. Pendapatan dari zakat didistribusikan ke penerima zakat/mustahik yang terbagi dalam 8 golongan seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Al-Quran telah secara detail menjelaskan dan mengatur persyaratan serta jenis-jenis harta yang dikenai kewajiban zakat beserta besaran tarifnya (Bank Indonesia, 2021).

Zakat dalam bahasa memiliki arti "pertumbuhan dan perkembangan" (*an-numa wa az-ziyadah*). Konsep zakat juga mencakup "pembersihan/suci" (*at-thaharah*) dan "berkah" (*al-barakah*). Suci merujuk pada zakat sebagai sarana untuk membersihkan diri, jiwa, dan harta seseorang. Seseorang dapat membersihkan jiwa dan batinnya dari sikap kikir melalui zakat. Berkah mengacu pada fakta bahwa harta wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi persyaratan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu juga memiliki potensi membawa keberkahan (memberikan manfaat positif bagi hidup dan kehidupan).

Zakat dapat menjadi instrument ekonomi dan kesejahteraan umat sehingga menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan Islam karena zakat menjadi salah satu pilar Islam yang berdimensi *ubudiyah* (bentuk ketaatan manusia pada Tuhan), *ijtimaiyyah* (*ibadah social*) dan *iqtishadiyyah* (bantuan kesejahteraan pada sesama manusia) yang dapat berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Bahri, 2016).

Dalam Islam zakat adalah kewajiban yang fundamental karena selain berkaitan dengan aspek ketuhanan, zakat juga berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, sosial dan ekonomi. Zakat berpotensi untuk mengembangkan kesadaran dan empati terhadap sesama manusia, yang pada akhirnya menghasilkan tingkat kepedulian sosial yang signifikan.

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam yang disejajarkan dengan salat pada rukun Islam. Persoalan yang berkaitan dengan zakat dibahas dalam 30 ayat di dalam Al-Quran. Salah satu surat yang menguraikan tanggung jawab berzakat adalah;

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. at-Taubah : 103).

Dari surat at-Taubah ini dapat diambil arti bahwa tumbuh dari arti zakat adalah mengeluarkan zakat karena tumbuh dan berkembangnya harta. Membayar zakat akan berdampak terhadap banyaknya pahala yang didapatkan. Makna suci adalah zakat akan membantu dalam membersihkan jiwa dari kebatilan, keburukan, dan mensucikan diri dari dosa.

Alquran, sunnah serta Ijma' juga telah menunjukkan barang siapa yang mengingkari kewajiban berzakat maka ia termasuk orang-orang yang zalim yang akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT.

9.3.1. Peran dan Esensi Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zakat dalam perspektif ekonomi Islam merupakan pengakuan akan kuasa Allah sebagai pemilik alam semesta yang berhak mengatur urusan terkait hak, kepemilikan, dan pembagian harta. Melalui zakat Allah mengatur penyaluran harta dari muzaki kepada mustahik dan perintah zakat merupakan pembersihan harta para muzaki menjadi bersih dan berkah. Secara filosofis sosial, zakat berkaitan dengan prinsip keadilan.

Selain dimensi ketuhanan, zakat juga merupakan ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial), yaitu ibadah yang berupa hubungan antara manusia dengan sesama yang manfaatnya dapat dirasakan melalui peran zakat dalam mengentaskan masalah kemiskinan karena zakat adalah sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara pemilik harta yang berlebih dengan mereka yang membutuhkan. Zakat juga merupakan pemberian harta untuk membantu seseorang dengan ekonomi yang lemah (dhu'afa) sehingga zakat bisa berperan dalam mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan.

Zakat juga bisa membuat mustahik menjadi lebih berdaya dengan program zakat produktif sehingga dapat mengubah kehidupan mustahik menjadi lebih baik. Dengan demikian zakat mampu menumbuhkan rasa kepedulian dan kesadaran terhadap kemanusiaan sehingga terbentuk rasa kepedulian sosial yang tinggi.

Secara mikro kewajiban berzakat mengatasi kemiskinan langsung ke akar permasalahannya, yaitu mengatasi keserakahan manusia yang kaya (muzaki) dari sifat tamak, serakah, iri, dan kikir. Jadi zakat dapat menghilangkan kemiskinan *ruhiyah* dari muzaki, setelah itu dampaknya akan menyebar ke objek pajak. Secara makro zakat dapat berfungsi sebagai penstabil perekonomian (*built in stability*) karena pengeluaran zakat dihitung secara proporsional dalam persentase dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Hal tersebut membuat perubahan harga menjadi lebih stabil. Secara teori eksistensi zakat juga dapat meningkatkan *agregat demand* karena pemberian zakat pada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik.

Dalam jangka pendek kenaikan permintaan akan mendorong naiknya harga yang kemudian akan meningkatkan *agregat supply* dan masuknya perusahaan baru yang masuk pasar sehingga harga akan terkoreksi. Meningkatnya penawaran juga terjadi karena perilaku mustahik. Apabila zakat dialokasikan untuk kegiatan produktif dalam bentuk pemberian modal usaha akan memberi peluang bagi mustahik untuk melakukan kegiatan produksi. Mustahik yang produktif dengan dana zakat maka dapat menawarkan barang dan jasa yang lebih banyak. Kenaikan permintaan dan penawaran agregat ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Nopiardo, 2015).

9.3.2. Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Zakat merupakan instrument kebijakan fiskal Islam sedangkan pajak adalah instrument kebijakan fiskal konvensional. Pajak dan zakat berbeda konsep. Pajak sebagai instrument kebijakan fiskal konvensional dapat digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Pemerintah bisa mempengaruhi besarnya penerimaan pajak dengan mengubah insentif dalam tarif pajak maupun besarnya *tax base*, sedangkan tarif zakat sudah ditentukan dalam Al-Quran yang tidak bisa dirubah oleh kebijakan pemerintah.

Zakat bukanlah sumber penerimaan biasa bagi negara muslim di dunia meskipun tidak dianggap sebagai pendanaan utama namun pemerintah bertanggungjawab dalam menghimpun, menggunakan, serta mendistribusikannya. Zakat harus digunakan dan didistribusikan untuk delapan golongan yang berhak menerimanya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai kepentingan umum. Oleh karena itu kebijakan pajak berbeda dengan zakat.

Menurut *fiqh*, zakat bertujuan untuk mempertemukan pihak muzaki yang memiliki kelebihan harta dengan mereka yang mengalami kekurangan harta, yaitu para mustahik. Secara filosofis zakat berkaitan dengan keadilan sosial dan dari perspektif kebijakan pembangunan, zakat berkaitan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Melalui zakat terjadi transfer konsumsi, kepemilikan sumber-sumber ekonomi serta memperluas kegiatan produktif dari muzaki pada mustahik (Amiruddin,2015)

9.3.3. Pendistribusian dan Regulasi Zakat

Zakat adalah kewajiban setiap muslim bagi yang memenuhi kriteria tertentu untuk wajib membayar zakat. Seorang muslim yang menunaikan zakat/*muzaki* disunahkan menyalurkan zakatnya melalui organisasi penyalur zakat (*amil*) yang kemudian *amil* zakat menyalurkannya kepada orang yang berhak menerima zakat/*mustahik*. Terdapat delapan golongan orang yang termasuk sebagai mustahik zakat (*asnaf*), yaitu:

1. *Fakir* adalah orang yang tidak memiliki harta sehingga tidak mampu untuk membiayai hidupnya
2. *Miskin* adalah seseorang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya
3. Pengurus (*Amil*) zakat, mereka yang bertugas untuk mengelola zakat dari mulai mengumpulkan sampai mendistribusikan dana zakat

4. *Mualaf* adalah mereka yang baru masuk Islam,
5. *Riqab*, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri
6. *Gharimin*, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam memperjuangkan jiwa dan izzahnya
7. *Fisabilillah* adalah mereka yang berjuang di jalan Allah melalui dakwah, jihad, dan sebagainya
8. *Ibnu sabil*, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah

Dalam prakteknya penyaluran/distribusi zakat secara umum meliputi dua bentuk, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif). Distribusi zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa diikuti pemberdayaan mustahik. Zakat konsumtif bertujuan untuk memenuhi konsumsi kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Distribusi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang diikuti dengan pemberdayaan mustahik. Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi maka zakat disalurkan secara produktif dalam bentuk modal usaha . Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan pada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan produksi agar mustahik memiliki modal untuk melakukan kegiatan produktif sehingga mustahik mampu memproduksi dan meningkatkan pendapatannya.

Tujuan zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat kegiatan ekonomi sehingga mustahik menjadi lebih berdaya dan lebih mampu memenuhi kebutuhannya serta meningkatkan taraf hidupnya sehingga di masa depan dapat mengangkatnya menjadi muzaki. Semakin banyak mustahik produktif maka perekonomian umat akan semakin berkembang (Saputra, 2022).

Aturan tentang pengelolaan zakat dimulai pada masa pemerintahan transisi (1999-2000) yang dipimpin oleh Presiden BJ.Habibi. Pada masa ini lahir dan disahkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat. Undang-Undang ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan pengelolaan zakat serta munculnya peraturan daerah (perda) di berbagai wilayah Indonesia. Undang-Undang ini berisi tentang kewajiban menunaikan zakat bagi WNI yang beragama Islam atau Badan yang dimiliki muslim yang telah mampu dan memenuhi persyaratan. UU ini juga menyatakan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan pada amil zakat, mustahiq, dan muzaki.

Pada era berikutnya, era pemerintahan reformasi pengelolaan zakat ditandai dengan penguatan institusi zakat nasional yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2011. Tujuan UU No. 23 tahun 2011 ialah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam mengelola zakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat zakat bagi kesejahteraan umat. Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 diatur dalam PP No. 14 Tahun 2014. UU No.23 tahun 2011 juga mengatur tentang pendayagunaan dan pendistribusian zakat produktif yang dijelaskan dalam Pasal 27, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 (Saputra, 2022).

Ada perbedaan aturan dalam pembentukan lembaga zakat dalam kedua uu zakat. Uu No. 38 Tahun 1999 mengatur mengenai pembentukan LAZ menjadi kekuasaan masyarakat secara penuh, tetapi dalam UU No. 23 Tahun 2011 pembentukan LAZ menjadi kekuasaan dari organisasi kemasyarakatan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011.

9.3.4. Model Pengelolaan Zakat di Berbagai Negara

Pengelolaan zakat pada umumnya dikelola oleh Lembaga, baik Lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Jika zakat dikelola oleh negara dalam suatu departemen maka pengumpulan dan pendistribusian zakat ditetapkan oleh kebijakan pemerintah sehingga mirip dengan pajak. Berarti zakat diwajibkan bagi masyarakat muslim dengan cara dipotong langsung dari

harta yang dimiliki. Model ini dijalankan pada masa pemerintahan Rasulullah dan khulafaur rasyidin. Sedangkan model yang kedua pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga non pemerintah, yaitu masyarakat sipil atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan pemerintah. Negara hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator. Berarti pengelolaan dan pengumpulan zakat dilakukan secara sukarela sehingga pendapatan zakat cenderung kecil.

Model ini banyak diterapkan di negara-negara Islam seperti Saudi Arabiyah, Pakistan, Kuwait, Yordania, Malaysia, dan Bahrain. Namun ada juga negara yang menerapkan model campuran, yaitu Indonesia termasuk negara yang menerapkan model campuran ini karena Indonesia bukanlah negara Islam namun sebagian besar penduduknya beragama Islam sehingga negara hanya sebagai fasilitator dan tidak boleh mencampuri terlalu jauh terkait urusan ibadah.

Dalam dunia Islam modern peran pemerintah dalam pengelolaan zakat diserahkan atau diwakili oleh Lembaga penghimpun zakat yang ditunjuk pemerintah dan di beberapa negara pemerintah juga memberikan kebebasan juga pada muzaki menyalurkan zakat dalam batas tertentu. Saudi Arabia lewat *Royal Court* (keputusan Raja) muzaki boleh menyalurkan zakatnya 50% dari kewajibannya. Zakat dikelola oleh Badan Jaminan social. Pengelolaan zakat di Pakistan pusatnya ada di Central Zakat Fund (CZF).empat *provincial zakat fund* (PZF di negara bagian, sampai tingkat unit pengumpulan zakat di daerah. Zakat wajib bagi setiap muslim warga negara Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab. Pengelolaan zakat di Malaysia dilakukan oleh Lembaga independen Pusat Pemungutan Pajak (PPZ) di wilayah Persekutuan di kuala Lumpur, 5 PPZ di lima negeri. 14 Wilayah bagian (*state*) di Malaysia pengelolaan zakat dilakukan secara federal (non nasional) oleh Baitul Mal (BM). (Amiruddin, 2015).

9.4. Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional dan Kendala Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang profil pembiayaan Pembangunan nasional menjelaskan pengertian pembiayaan Pembangunan nasional dalam pembiayaan. Peran Pemerintah dalam mengupayakan pembiayaan pembangunan tercermin dalam besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam APBN Pendapatan negara berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan Hibah. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yaitu sekitar 85%. PNBP menyumbang sekitar 14% dari total pendapatan. Sedangkan hibah kontribusinya masih sangat kecil. Dalam APBN juga dapat diketahui besarnya Belanja Negara yang terdiri dari belanja Pemerintah pusat (belanja pegawai, barang modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan social, dan lain-lain) dan transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD). Defisit dalam APBN terjadi karena belanja negara melebihi pendapatan negara.

Defisit anggaran ditutup dengan mengeluarkan pembiayaan yang berasal dari utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Inilah yang dimaksud dengan pembiayaan dalam arti sempit. Sedangkan pembiayaan dalam arti luas bahwa pemerintah berupaya menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya melalui sumber-sumber pendapatan, utang dan kekayaan yang bersifat konvensional maupun non konvensional. Hal ini berarti bahwa pemerintah menyadari bahwa sumber pembiayaan Pembangunan tidak cukup dari pembiayaan dari anggaran pemerintah konvensional yang bersumber dari anggaran pemerintah APBN/APBD, pajak dan retribusi saja. Perlu pembiayaan pembangunan non konvensional yang diperoleh dari gabungan dana pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu posisi zakat dalam sumber pembiayaan pembangunan nasional dapat

dikategorikan dalam sumber pembiayaan pembangunan non konvensional dari masyarakat.

Hasil penelitian BPPK juga menemukan bahwa keadaan APBN 5 tahun terakhir menunjukkan defisit anggaran yang terus meningkat dari Rp46,8 triliun di tahun 2010 menjadi Rp 241,5 triliun di tahun 2014. Keseimbangan primer tahun 2010 semula positif sebesar Rp 41,5 triliun telah berubah menjadi negatif Rp93,9 triliun pada tahun 2015. Keadaan tersebut membuat pemerintah harus membiayai defisit anggaran serta melunasi utang yang jatuh tempo sehingga pendanaan yang dibutuhkan adalah sebesar deficit anggaran ditambah utang yang jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan.

Keterbatasan anggaran untuk membiayai defisit anggaran dan biaya utang membutuhkan alternatif sumber pembiayaan Pembangunan. Pembiayaan campuran (*blended finance*) merupakan salah satu usaha untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan Pembangunan. Salah satu contoh pembiayaan campuran ialah dengan mencampurkan dana investasi komersial dengan dana filantropi. Pendanaan filantropi yang potensial untuk Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim yang tinggi dengan populasi muslim sebanyak 220 jiwa adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu bagian dalam filantropi Islam. Baznas memprediksi bahwa potensi zakat sebesar Rp217 triliun ,namun pengumpulan zakat baru mencapai mencapai Rp6,22 triliun pada tahun 2017 atau meningkat 30 persen dibandingkan tahun 2016. Sampai dengan tahun 2021 potensi zakat diperkirakan Rp 239 trilyun dan yang terealisasi sebesar Rp14,1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwabesarnya potensi zakat belum berbanding lurus dengan realisasi penerimaannya. Masih banyak potensi zakat yang belum dioptimalkan sehingga menjadi peluang bagi masyarakat dan pemerintah melalui

Lembaga amil zakat untuk peningkatan potensi zakat yang terabaikan.

9.4.1. Peluang Zakat sebagai Pendapatan Negara

Seperti pajak, zakat juga dihasilkan dari iuran masyarakat. Namun terdapat perbedaan diantara pajak dan zakat. Zakat dipungut sesuai ajaran Alquran. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Seorang muslim yang melalaikannya dianggap tidak sempurna keimanannya. Sedangkan pajak dipungut berdasarkan peraturan pemerintah. Dana zakat tidak digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, membangun infrastruktur jalan, bangunan gedung milik negara. Lain halnya dengan pajak yang memang dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam proyek dan program pembangunan atau melunasi utang negara. Dana zakat akan dialokasikan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan publik terutama golongan *fii-sabilillah*, tetapi tidak semua kemaslahatan umum dan kepentingan publik dapat didanai dari zakat. Pendapatan dari zakat sudah ditentukan oleh Alquran disalurkan kepada mereka yang berhak, yaitu delapan golongan mustahik/asnaf.

Oleh karena itu dana zakat tidak termasuk ke dalam kas negara sebagai APBN. Zakat tidak dicatat sebagai penerimaan negara ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diserahkan ke kas negara. Pengelolaan zakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan tidak masuk dalam neraca APBN kendati dikelola oleh Lembaga pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Upaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat perlu perubahan system intensif pajak seperti yang saat ini dijalankan di Malaysia.

Selama ini, zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ resmi bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Sementara di Malaysia zakat bisa mengurangi kewajiban pajak (Kementerian Agama,2019).

9.4.2. Potensi Zakat sebagai Alternatif Pembiayaan yang Terabaikan

Sumber pendapatan negara untuk membiayai Pembangunan negara dapat bersumber dari kekayaan alam. Pendanaan dari sumber daya alam terbatas jumlahnya karena seiring berjalannya waktu potensi tersebut bisa habis. Selain itu eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam bisa mengakibatkan terganggunya kelestarian alam dan rusaknya lingkungan. Sumber pendanaan lainnya pendapatan yang berasal dari iuran masyarakat dalam bentuk pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan andalan dan mendominasi pembiayaan. Dibandingkan pendanaan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Walaupun ada kecenderungan meningkat namun prosentase kenaikan PNBP relative lebih rendah daripada penerimaan pajak. Sebenarnya Indonesia berpotensi dalam menambah iuran masyarakat yang berasal dari zakat karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Namun sangat disayangkan potensi zakat ini terabaikan karena beberapa sebab.

Zakat merupakan amal ibadah yang tidak dapat diabaikan. Kekuatan perintah zakat sejajar dengan perintah sholat, puasa dan haji. Seharusnya maraknya umat Islam menjalankan sholat dan berhaji juga diikuti dengan maraknya pelaksanaan zakat. Namun kenyataannya tidak demikian. Rendahnya kesadaran berzakat bisa disebabkan karena kepercayaan

masyarakat terhadap amil zakat rendah sehingga muzaki lebih memilih menyalurkan sendiri zakatnya. Lembaga amil zakat, rumah zakat, Dompot dhuafa sudah banyak bermunculan tapi tetap masih ada keraguan umat Islam tentang bagaimana dan siapa yang melakukan pengawasan kinerja lembaga tersebut. Kondisi ini juga diperburuk dengan kurangnya sosialisasi dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya zakat, syarat zakat dan tata cara menunaikannya (Kementerian Keuangan. 2021).

Solusi terhadap pengoptimalan potensi zakat bisa didasarkan pada penyebab masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, yaitu:

1. Negara dan pemerintah sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat harus mampu menyediakan fasilitas berzakat sebagaimana pemerintah mampu memfasilitasi dan melakukan layanan dalam pelaksanaan ibadah haji.
2. Pemerintah mengupayakan peningkatan perannya sebagai fasilitator dan pengawas tugas dan fungsi lembaga pengelola zakat berjalan sebagaimana mestinya
3. Perlu ada edukasi dan sosialisasi dari kementrian dan lembaga zakat tentang peran penting zakat serta tata cara menunaikan zakat
4. Perlu peningkatan kesadaran tentang keberadaan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang diharapkan bisa mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang selama ini belum mampu diatasi oleh penerimaan pajak. Zakat memiliki konsep yang berbeda dengan pajak dalam masalah kemiskinan. Hal ini terlihat dari motivasi atau semangat pemungutannya. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sedangkan motivasi pemungutan zakat bukan untuk menyediakan fasilitas umum seperti halnya pajak. Pemungutan zakat dilakukan untuk membagi harta mereka yang mampu (muzaki) kepada mereka yang tidak mampu yang tergolong dalam 8 asnaf. Kaum fakir dan miskin menjadi prioritas dalam pendistribusian dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Andi S.2016. Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Eonomi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1, No. 2. Hal. 74 – 89.
- Bank Indonesia. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- K. Amiruddin. (2015). Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. *Jurnal AHKAM* Vol. 3, No. 1. Hal. 136-166. DOI: 10.21274/ahkam.2015.3.1.137-164
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Dana Zakat Tidak Masuk Dalam Sistem Keuangan Negara*. <https://www.kemenag.go.id/nasional/kemenag-dana-zakat-tidak-masuk-dalam-sistem-keuangan-negara>
- Kementerian Keuangan. (2021). *Zakat, Potensi yang Terabaikan*. [https://fiscal/kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Islamic public finance](https://fiscal/kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Islamic%20public%20finance)
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Mankiw, N.Gregory. (2007). *Makroekonomi (Fitria Liza, Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Nopiardo, Widi. (2015). "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam." *JURIS* , Vol. 14, No. 2 doi:[10.31958/juris.v14i2.309](https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.309).
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPPK. (2015). *Profil Pembiayaan Pembangunan*. <https://www.bppk.go.id/Puslitbangwas/konten/2587/15.110-Profil-Pembiayaan-Pembangunan>.
- Sadewo, Joko. (2018). *Negara Membidik Zakat untuk Pembiayaan Pembangunan*. [https://news Republika.co.id/berita /fpgdyz318/negara-membidik-zakat-untuk pembiayaan-pembangunan](https://news.Republika.co.id/berita/fpgdyz318/negara-membidik-zakat-untuk-pembiayaan-pembangunan).
- Saputra, Hendra. (2022). *Regulasi Zakat Produktif*. <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/regulasi-zakat-produktif>

BAB 10

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA ISLAM

Oleh Arif Pujiyono

10.1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi di setiap negara akan senantiasa berjalan, namun dalam permasalahan pembangunan ekonomi juga selalu mengiringinya. Mayoritas negara Islam merupakan negara berkembang, sehingga memiliki karakteristik permasalahan yang relatif sama. Proses mengidentifikasi permasalahan di negara Islam menjadi sangat penting, sehingga dapat mempermudah dalam menetapkan solusinya. Islam sebagai agama yang sempurna dan *rahmatan lil alamin* diharapkan mampu memberikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah pembangunan di negara-negara Islam

10.2. Definisi dan Karakteristik Negara Islam

Negara merupakan otoritas tertinggi dalam suatu wilayah, sehingga memiliki kewajiban untuk mengatur dan melindungi seluruh warganya agar dapat hidup secara adil, aman, dan sejahtera. Negara harus menetapkan cara dan metode untuk mengatur sesuai dengan batas kekuasaan politik yang dimilikinya agar semua elemen dapat berjalan beriringan dan bersinergi untuk mencapai tujuannya. Negara juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan aturan dan hukuman bagi setiap elemen yang melanggar aturan atau merusak tatanan sistem yang telah ditetapkan.

Budiarjo (2008) menjelaskan pendapat beberapa tokoh tentang fungsi negara. John Lokce membagi menjadi 3 fungsi: fungsi legislatif, yakni negara memiliki tugas untuk membuat

aturan; fungsi eksekutif, yakni negara memiliki tugas untuk melaksanakan aturan; dan fungsi federatif, yakni negara memiliki tugas untuk mengurus hal-hal urusan luar negeri, urusan perdamaian, atau peperangan. Montesquieu membagi fungsi negara menjadi 3: fungsi legislatif, yakni memiliki tugas untuk membuat undang-undang; fungsi eksekutif, yakni memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang; dan fungsi yudikatif, yakni memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua peraturan ditaati oleh warganya.

Selama ini masih terjadi perdebatan dalam konsep politik dan ketatanegaraan Islam. Definisi negara Islam masih menjadi arus diskusi utama dalam sistem ekonomi Islam. Negara Islam bukan antithesis negara dengan sistem liberal ataupun komunis. Perdebatan antar pemikir Islam sendiri berkisar pada mendudukkan Islam dengan negara. Pada satu sisi ada pendapat yang menamakan negara Islam, yang bermakna Islam sebagai suatu sistem dan konsep, pada sisi lain menamakan bernegara secara Islam yang bermakna sebagai Islam sebagai suatu nilai. Negara Islam tidak semata-mata didasarkan hanya berdasarkan sistem ketatanegaraan yang dianut.

Pada kenyataan banyak negara dengan berbagai sistem politik dan pemerintahan juga mewarnai perdebatan dalam mendefinisikan negara Islam (Karim, 2015 dan Akhyar dan Sudan, 2017). Hal ini ditunjukkan pada kenyataan bahwa banyak negara dengan jumlah penduduk muslim yang banyak (mayoritas), pada praktiknya menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda, seperti kerajaan, kesultanan, sampai demokrasi.

Dalam mendefinisikan negara Islam, maka sebelumnya harus mendefinisikan negara dan Islam secara terpisah. Kata negara dalam bahasa Arab berasal dari kata "*balad*" atau "*baldah*". Dalam Al-Qur'an kata "*balad*" disebutkan pada surat An-Nahl: 7 dan Surat Fatir: 9. Adapun kata kata "*baldah*"

disebutkan pada Surat Furqon: 49, Sa'ba: 15, Zuhurf : 11 dan Surat Qof : 11. Munawir (1997) menyebutkan "*balad*" secara leksikal bermakna dada dan "*baldah*" bermakna Al-Makkah Al Mukarromah.

Kata Islam secara bahasa (etimologi) berarti tunduk, patuh, atau berserah diri (Munawir, 1997). Islam secara syariat (terminologi) berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesakanNya, menaati dan patuh dengan penuh ketundukan dan kerendahan. Kesimpulannya, negara Islam adalah suatu negara yang dalam pelaksanaan ketatanegaraan dan pelaksanaan kehidupan masyarakatnya tunduk dan taat dengan aturan Islam.

Dalam sejarah Islam, konsep negara mengalami 5 tahapan (Mulia, 2001), yakni teokrasi, musyawarah mufakat, monarki absolut, monarki konstitusional, dan republik. Pada tahap pertama, teokrasi Islam terjadi di masa Rasulullah, di mana pelaksanaan ketatanegaraan berdasarkan wahyu Allah dan Rasulullah sebagai pengambil keputusan utama. Pada tahap kedua adalah musyawarah mufakat, saat wahyu sudah terputus dan Rasulullah sudah meninggal, di mana pemerintahan beralih kepada Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini sistem ketatanegaraan mulai diambil secara musyawarah mufakat, khususnya melalui orang-orang terpilih (*ahlul halli wal aqdi*). Para ulama menganggap bahwa sistem ketatanegaraan ini adalah yang paling ideal dalam sejarah pemerintahan Islam. Pada tahap ketiga adalah sistem monarki absolut, di mana negara lebih bersifat sentralistik dengan pemimpin mulai mendominasi dalam pengambilan keputusan.

Pemerintahan ini dimulai pada masa dinasti Muawiyah, dilanjutkan dinasti Abassiyah dan berakhir masa dinasti Turki Usmani. Pada tahap keempat adalah monarki konstitusional, di mana mulai diterapkan ketika pemikiran barat mulai masuk. Pada tahap ini mulai dibuat peraturan (konstitusi) yang

mengadopsi negara barat. Hal ini diawali penyusunan konstitusi di Tunisia tahun 1861 kemudian diikuti oleh Turki pada tahun 1876 sampai pertengahan abad 20 mulai banyak diterapkan di berbagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Pada tahap terakhir (kelima) adalah republik, di mana dimulai dengan pemerintahan Turki tahun 1924.

Turki menjadi negara republik murni pasca kejatuhan pemerintahan Turki Usmani dan dipimpin oleh Mustafa Kemal Attaturk. Selanjutnya sampai saat ini banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim di negara-negara Asia dan Afrika menganut sistem republik seperti Malaysia, Pakistan. Meskipun demikian masih banyak pula negara-negara di Timur Tengah yang menganut sistem monarki seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Qatar.

Berdasarkan definisi negara Islam dengan berbagai sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda dalam perjalanan negara mayoritas muslim, maka pada dasarnya tidak ada definisi baku dari negara Islam. Perdebatan dalam mendefinisikan negara Islam akan senantiasa terjadi. Perdebatan definisi ini lebih cenderung pada aspek sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, khususnya sistem kekuasaan politik dan penetapan pemimpinnya

Terlepas dari perdebatan atau perbedaan definisi negara Islam, satu hal yang juga penting adalah bagaimana karakteristik negara Islam itu sendiri. Karakteristik negara Islam merupakan salah satu metode yang lebih tepat dan mudah untuk sampai pada kesimpulan bahwa negara tersebut dikatakan negara Islam. Para ulama mazhab fikih sendiri telah lama menyebutkan karakteristik suatu negara dikatakan sebagai negara Islam (Kashim et al., 2012). Abu Hanifah menyatakan bahwa negara Islam memiliki karakteristik: dipimpin oleh seorang muslim, memiliki tanah yang dikuasai untuk tempat tinggal masyarakatnya, hukum syariat Islam diamalkan oleh penduduk

muslim, serta terjaminnya keamanan masyarakat. Mazhab Hambali seperti Ibnul Qoyyim menyebutkan karakteristik negara Islam yang paling utama adalah mayoritas penduduknya muslim, semua tuntunan syariah dan kewajiban dapat dijalankan oleh masyarakat muslim. Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh As-Sa'di memberikan karakteristik negara Islam adalah suatu negara yang penduduknya telah memeluk Islam seperti Madinah atau suatu negara yang telah dikuasai oleh umat Islam seperti Baghdad dan Basrah.

Selain itu mazhab Syafii memiliki pandangan yang senada dengan mazhab Hambali. Karakteristik-karakteristik dari mazhab-mazhab tersebut secara umum juga telah digunakan oleh ulama kontemporer seperti Az-Zuhailly dan Al-Qardhawi. Kesimpulannya, bahwa setiap negara yang memiliki karakteristik bahwa negara yang mayoritas penduduknya muslim, dipimpin oleh seorang muslim dan syariat Islam dapat ditegakkan/diamalkan oleh masyarakatnya secara bebas dan aman, maka negara tersebut didefinisikan negara Islam, meskipun sistem tatanegara, pemerintahan dan politiknya berbeda-beda.

Secara internasional, negara Islam sudah diakui oleh dunia, khususnya setelah dibentuk suatu organisasi negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam yaitu Organisasi Kerjasama Islam (OKI). OKI beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam di Asia dan Afrika. OKI dibentuk atas keprihatinan terhadap berbagai masalah di negara-negara Islam khususnya masalah politik di Palestina dan Timur Tengah. OKI kemudian berkembang tidak hanya aspek politik, tapi juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan (teknologi). Berbagai isu dan masalah di negara-negara Islam juga mulai menjadi prioritas, seperti pengangguran, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sains, teknologi dan inovasi.

OKI berperan penting dalam pembangunan di negara-negara Islam melalui berbagai organisasi dan kegiatan pertemuan rutin, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Konferensi Tingkat Menteri (KTM) baik menteri luar negeri atau sektoral seperti pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan tenaga kerja. OKI memiliki enam badan subsider, di antaranya Statistical, Economic, Social Research and Training Center for Islamic Countries (SESRIC), Islamic University of Technology, dan International Islamic Fiqh Academy. OKI juga telah membentuk badan-badan khusus yang keanggotaannya bersifat opsional, seperti Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization dan Islamic Organization for Food Security (Kemlu, 2022)

10.3. Permasalahan Ekonomi Pembangunan di Negara Islam

Teori pembangunan selama ini berkembang dari pemikiran ekonomi barat, sehingga tidak selalu terap di negara-negara berkembang. Banyak negara-negara Islam adalah negara berkembang, sehingga perlu adanya reevaluasi atau reformulasi ekonomi pembangunan. Pada dasarnya negara-negara Islam memiliki permasalahan yang relatif sama, yaitu sumberdaya alam dan pengelolaannya, sumberdaya manusia dalam kuantitas dan kualitasnya, sistem politik dan pemerintahan dalam pengelolaan negara, dan rendahnya produktifitas barang, tabungan dan investasi, sehingga banyak tergantung pada utang luar negeri. Seharusnya masalah-masalah pembangunan di negara-negara Islam diselesaikan dengan konsep dan metode ekonomi pembangunan Islam.

Permasalahan pertama adalah sumberdaya alam dan pengelolaannya. Masing-masing negara Islam memiliki potensi alam (*endowment*) yang berbeda-beda, tergantung pada wilayah negara masing masing. Potensi sumberdaya alam ini sifatnya karunia (*given*) dari Allah, di mana manusia tidak bisa membuatnya. Oleh sebab itu, kuncinya adalah pengelolaan

sumberdaya alam. Negara-negara di wilayah subsahara Timur Tengah memiliki sumberdaya mineral dan minyak yang sangat besar, namun pada kenyataannya tidak mampu mendukung akselerasi peningkatan sektor produktif lainnya. Pada sisi lain, tidak sedikit sumberdaya mineral dan minyak dikuasai oleh sebagian kecil orang dan kelompok tertentu atau bahkan swasta asing, sehingga yang mendapatkan manfaat hanya sebagian kecil kelompok orang dan lari ke negara luar yang telah berinvestasi.

Kalaupun dikelola oleh negara, hasil sumberdaya mineral dan minyak lebih banyak dimanfaatkan untuk sektor konsumsi dibandingkan untuk sektor investasi. Sementara itu, potensi sektor pertanian dan perkebunan pada negara-negara Afrika Barat dan Asia Tenggara belum mampu menjadi sektor utama untuk ekspor. Negara-negara ini belum memiliki peluang dan mampu untuk mengelola hasil pertanian dan perkebunan menjadi produk akhir yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan berdaya saing global.

Permasalahan kedua adalah sumberdaya manusia di negara-negara Islam yang jumlahnya besar dengan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang masih rendah. Banyaknya jumlah penduduk ini, pada akhirnya semakin memperparah masalah kependudukan dan pembangunan ekonomi. Masalah banyaknya penduduk dan kualitasnya semakin meningkatkan pengangguran, ketidakmerataan antarpendapatan (kemiskinan) dan antarwilayah (ketimpangan), kualitas kesehatan fisik dan mental, serta gangguan keamanan dan kriminalitas. Permasalahan sumberdaya ini sangat kompleks, karena menyangkut banyak aspek lain seperti sarana prasarana infrastruktur dan berbagai sistem regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara.

Permasalahan ketiga adalah sistem politik pemerintahan dan ketatanegaraan yang belum tertata dan stabil. Hal ini menjadikan negara-negara Islam belum mampu mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Banyak negara-negara Islam yang disibukkan dengan sistem pemerintahan dan perebutan kekuasaan. Hal ini sering terjadi ketika sistem pemerintahan lebih didominasi untuk kepentingan politik kelompok kekuasaan dibandingkan dengan pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Masalah politik ketatanegaraan di negara-negara Islam semakin parah ketika hegemoni kekuatan politik negara luar ikut campur baik secara langsung maupun tidak langsung. Campur tangan ini dapat melalui pengalihan kekuasaan atau bahkan melalui dukungan langsung dalam peperangan fisik melalui penyediaan persenjataan.

Permasalahan keempat adalah rendahnya tabungan dan investasi, sehingga ketergantungan terhadap utang luar negeri semakin besar dan berkelanjutan. Konsekuensi negara-negara Islam yang tidak mampu mengelola sumberdaya alam dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia adalah tingkat tabungan dalam negeri yang rendah. Kualitas masyarakat rendah mengakibatkan pendapatan masyarakat juga rendah dan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Sumberdaya alam di negara Islam masih banyak dikuasai secara perorangan atau perusahaan kapitalis dan luar negeri, sehingga keuntungan hanya terkumpul pada kelompok tertentu. Walaupun ditabung dan diinvestasikan, maka lebih banyak kembali atau dialirkan ke luar negeri asal. Investor asing menginginkan mendapatkan keuntungan lebih besar di luar negeri dan jaminan keamanan aset.

Sedikitnya tabungan dan investasi dari dalam negeri, sementara kebutuhan pembangunan ekonomi yang semakin besar, maka utang menjadi alternatif yang dianggap paling rasional dan relevan untuk menutup defisit anggaran. Permasalahannya, utang-utang tersebut bersumber dari negara-negara kapitalis dengan basis bunga dan menggunakan mata uang asing. Padahal bunga menjadikan utang semakin besar

hanya disebabkan oleh tambahan waktu. Sementara utang dalam mata uang asing juga bisa menambah utang ketika mata uang dalam negeri terdepresiasi. Belum lagi potensi pengambilalihan aset dan sumberdaya jika tidak mampu mengembalikan utang saat jatuh tempo

10.4 Solusi Ekonomi Islam dalam Mengatasi Permasalahan Ekonomi Pembangunan di Negara Islam

Permasalahan-permasalahan ekonomi pembangunan di negara-negara Islam sangat banyak dan kompleks. Hal ini tentunya harus dicarikan solusi yang mendasar dan berkesinambungan. Pada dasarnya Islam melalui sistem ekonominya memiliki alternatif solusi yang tepat dan komprehensif. Islam sebagai suatu sistem yang lengkap memberikan jalan keluar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sumber lain yang berkembang dalam pemikiran dan teori ekonomi pembangunan Islam. Hal ini sekaligus untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dengan pendekatan Islam dapat diterapkan dengan baik. Solusi Islam dalam menyelesaikan masalah ekonomi secara tersirat oleh Rasulullah melalui hadistnya

Apabila kalian melakukan perdagangan *'inah* (salah satu jenis perdagangan ribawi), sibuk bertani dan memegang ekor sapi (sibuk beternak), dan meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Dia (Allah) tidak akan melepaskannya sampai kalian kembali pada agama kalian. (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Pada hadits di atas mengisyaratkan bahwa masyarakat muslim dalam kondisi yang dihinakan (direndahkan) sebagaimana kondisi saat ini. Hal ini dibuktikan bahwa negara-negara Islam tidak dipandang dan tidak mampu berperan besar secara ekonomi dalam perekonomian global. Rasulullah sudah menjelaskan rendahnya kedudukan negara-negara Islam,

kemudian menjelaskan solusinya, yaitu kembali kepada agama Islam. Penyebab utama (meskipun bukan membatasi) rendahnya peran negara Islam adalah masalah ekonomi, yaitu telah terjebak (masuk) dalam jual beli riba (*inah*) dan terlalu sibuk dengan aktifitas ekonomi (pertanian dan perternakan). Meskipun demikian, hadist ini juga memberikan alternatif solusi, yaitu kembali dalam agama. Kembali dalam agama ini termasuk mengembalikannya dalam setiap aktifitas ekonomi sesuai dengan tuntunan Islam.

Islam telah memberikan pedoman baik secara umum maupun terperinci terkait dengan aktifitas ekonomi dan alternatif solusi mengatasi masalah ekonomi. Setiap orang termasuk masyarakat umum bahkan negara, pasti akan diuji. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Surat Al Anbiya ayat 35.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami." (QS. Al Anbiya: 35).

أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٣﴾

"Tiada suatu bencana yang menimpa di muka bumi dan (tidak pula) pada diri kalian sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauh mahfudz) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya

yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami menjelaskan yang demikian itu) supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri” (QS. Al Hadid: 22-23).

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمْرِ تٍ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."(Surat Al Baqarah: 155 – 157)

Pada ketiga ayat dalam Surat Al Anbiya, Al-Hadid dan Al-Baqarah ini memberikan informasi bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini akan mengalami berbagai ujian, ujian keburukan bahkan kebaikan juga sebagai ujian. Ujian keburukan bencana, kelaparan, kemiskinan, berupa kemiskinan mengharuskan bersabar. Sementara ujian kebaikan dapat berupa rizki dan kekayaan mengharuskan untuk bersyukur kemudian berbagi dengan lainnya yang kekurangan. Dalam hal ini negara melalui pemerintah harus mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Harmonisasi antara orang miskin dan

orang kaya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah Islam dalam proses pembangunan ekonomi.

Setiap masalah, termasuk ekonomi, pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Jalan keluar tersebut adalah dengan bertakwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah.

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ كُم يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١٦﴾
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿١٧﴾

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." (QS. Ath Thalaq : 2-3)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰءِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿١٦﴾

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pasti kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami). Maka

Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan” (QS. Al-A’raf: 96).

Pada Surat Ath Thalaq ayat 2-3 dan Al-A’raf ayat 96 ini Allah memerintahkan agar manusia beriman dan bertakwa, sehingga Allah memberikan solusi bahkan melimpahkan barakah di bumi. Barakah sendiri memiliki makna yang luas yaitu kenikmatan yang cukup dan tetap dalam waktu yang lama. Takwa ini memiliki makna yang luas, bahkan termasuk setiap amal perbuatan yang baik adalah termasuk bentuk takwa.

Permasalahan perbedaan sumberdaya alam pada satu sisi merupakan ketetapan Allah (*sunnatullah*), pada sisi lain menjadi ujian bagi negara yang memilikinya agar digunakan dengan tepat dan berkelanjutan (tidak cepat habis). Sementara negara yang tidak memiliki sumberdaya bisa melakukan berbagai alternatif inovasi penggantinya. Sumberdaya alam yang cepat habis dan mengalami kerusakan pada dasarnya disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Krisis energi, pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemanasan global merupakan permasalahan global terkhusus di negara-negara Islam. Oleh sebab itu, pengelolaan sumberdaya alam ini harus dilakukan efektif dan efisien. Tanda-tanda masalah global ini pada dasarnya sudah diisyaratkan dalam Al-Qur’an.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS ar-Ruum: 41).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ



“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. Al-A'raf [7]: 56).

Bin Kholdun (2001) menjelaskan keharusan untuk menjaga, memelihara dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungannya, sehingga akan berdampak terhadap keseimbangan dan keberlanjutan alam, serta kehidupan manusia di bumi. Cara memanfaatkan sumberdaya yang terbatas harus diperhatikan agar bisa tersedia semakin lama. Selain itu inovasi harus dilakukan sebagai alternatif untuk menggantikan sumberdaya yang terbatas tersebut. Penggunaan teknologi yang efisien sangat diperlukan untuk penghemat energi untuk memperpanjang umur energi minyak bumi. Alternatif energi terbarukan melalui alam juga penting untuk pembangunan ekonomi hijau ke depan, misalnya energi tenaga surya, air, angin bahkan hidrogen. Inovasi teknologi menjadi keniscayaan dalam menghadapi tantangan global, khususnya krisis energi.

Permasalahan krisis pangan juga menjadi perhatian penting bagi negara-negara Islam. Apalagi negara-negara Islam yang tidak memiliki sumber pangan, tapi memiliki jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 43 Allah telah menjelaskan masalah krisis pangan.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya) "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan tujuh butir lainnya yang kering, "Hai orang-orang yang terkemuka terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi"(QS. Yusuf: 43).

Pada ayat 43 Surat Yusuf, Mubarakfuri (2011) menjelaskan tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang mampu mena'birkan (menafsirkan) mimpi, sehingga beliau mampu menjelaskan maknanya dan termasuk memberikan solusi untuk mengatasinya. Solusi nabi Yusuf dijelaskan pada ayat 47-48.

"Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai (petik) hendaklah kamu biarkan bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari bibit gandum yang akan kamu simpan. "(QS. Yusuf: 47-48).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut bahwa akan terjadi masa subur dan panen selama tujuh tahun demikian pula peternakan untuk mengolah pertanian dan hasilnya. Setelah itu akan terjadi masa paceklik (krisis pangan) selama tujuh tahun pula. Dalam hal ini, Nabi Yusuf memberikan jalan keluar agar berhemat dalam berkonsumsi agar bisa bertahan selama paceklik. Nabi Yusuf

juga memberikan solusi dengan cara menyisakan biji-biji (bibit) agar awet untuk ditanam nantinya dalam upaya mengantisipasi masa paceklik.

Pada dasarnya Islam telah mengajarkan untuk melakukan antisipasi terhadap krisis pangan, apalagi *climate change* dan kerusakan lingkungan semakin masif dan sulit dikendalikan. Dalam level mikro ekonomi Islam telah mengajarkan prinsip agar hidup (berkonsumsi) secara hemat (secukupnya), tidak boros dan melakukan tindakan mubazir.

﴿يَبْنَىٰٓ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾


“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Al-A’raf: 31).

Pada Surat Al-A’raf ayat 31 ini terkandung makna bahwa manusia harus berhemat dan tidak berlebih-lebihan. Jika berkonsumsi, maka secukupnya dan sebatas untuk memenuhi standar badan cukup kuat dan sehat. Makan berlebihan juga dapat merusak badan dan menimbulkan berbagai penyakit seperti obesitas dan berbagai penyakit lainnya. Pada ayat ini juga tersirat bahwa manusia tidak boleh menyisakan makanan, karena termasuk menysia-nyiakan sumberdaya dan menambah sampah yang dapat merusak lingkungan.

Dalam praktik makro, penghematan dan mengantisipasi krisis pangan, negara-negara Islam dapat melakukan kebijakan lumbung pangan (*food estate*). Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur fisik semacam gudang pangan berserta sistem tata kelola pengumpulan dan pendistribusiannya. Hal ini penting

juga untuk pengendalian produk dan stabilisasi harga pangan. Hal ini sebagaimana dilakukan Indonesia melalui Bulog, meskipun sejak reformasi peranannya semakin berkurang. Dalam hal gudang pangan, Arab Saudi telah memiliki gudang yang sangat besar yang canggih untuk menyimpan makanan agar tetap awet baik secara kualitas dan kuantitas. Untuk kuantitas dan kualitas produk, negara-negara Islam dapat menggunakan sains dan teknologi rekayasa tanaman, sehingga meningkatkan jumlah produksi pangan sekaligus awet dan aman bagi kesehatan manusia. Hal ini dapat dilakukan bersama-sama dan saling membantu melalui level menteri dan organisasi pertanian dan pangan OKI.

Permasalahan kedua adalah sumberdaya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Negara-negara Islam pada dasarnya memiliki jumlah penduduk yang banyak. Jumlah penduduk yang banyak ini tentunya memerlukan infratraktur untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang banyak, khususnya pendidikan dan kesehatan. Kuantitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan pada akhirnya menghasilkan sumberdaya manusia yang kurang memiliki daya saing dalam dunia kerja, sehingga muncul masalah-masalah berikutnya seperti pengangguran, kemiskinan, kesehatan dan kriminalitas.

Sumberdaya manusia dalam pembangunan ekonomi Islam merupakan kunci yang pertama dan utama. Manusia merupakan makhluk sempurna, menjadi wakil Allah (*khalifah*) di bumi, pengemban amanat untuk memakmurkan bumi, dan mengetahui nama-nama benda yang bahkan malaikatpun tidak tahu.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Al-Baqarah: 30).

"Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-An'am: 165).

Surat Al_Baqarah ayat 30 dan Al-An'am ayat 165 mengisyaratkan bahwa manusia adalah makhluk pilihan yang diberikan amanah sebagai wakil (*khalifah*) Allah di bumi untuk memakmurkannya. Dalam rangka tugas memakmurkan bumi ini, manusia harus memiliki kemampuan (kompetensi) sesuai bidangnya agar terwujud kesejahteraan secara adil, merata dan berkesinambungan.

Pembangunan sumberdaya manusia tidak hanya bersifat *hard skill* (material) seperti IQ, tapi juga *soft skill* seperti EQ, bahkan spriritual seperti SQ (taat kepada Allah, amanah, jujur). Kemampuan sumberdaya yang bersifat *hard skill* ini dapat disediakan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan masyarakat di setiap sektor/bidang dan masa depan dalam era teknologi dan industri. Dalam upaya menghasilkan sumberdaya manusia secara kualitas dan kuantitas ini tidak mudah, karena keterbatasan infrastruktur di banyak negara Islam. Oleh sebab itu, kembali peran OKI dan lembaga pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) menjadi sangat penting, baik penyediaan infratraktur maupun beasiswa pendidikan dan ketrampilan. Beberapa negara Islam yang memiliki kemampuan infrastruktur dapat memberikan bantuan melalui pendidikan gratis bagi negara-negara Islam lainnya, seperti yang diberikan negara-negara Timur Tengah.

Islam sendiri pada dasarnya juga memiliki sumberdaya (*endowment*) yang sangat potensial untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia melalui instrumen keuangan sosial Islam, yakni wakaf. Wakaf merupakan *social endowment* yang sangat besar, tidak terbatas, tidak pernah habis dan berkelanjutan. Dalam sejarah negara Islam, Turki Usmani termasuk salah satu negara Islam yang telah berhasil mengembangkan wakaf sebagai instrumen pembangunan Islam, khususnya dalam pendidikan dan kesehatan. Dalam pembangunan ekonomi masa sekarang dan masa depan, wakaf menjadi solusi terbaik karena sumberdaya wakaf akan senantiasa ada dan berkelanjutan. Sistem kebijakan, pengelolaan manajemen dan sosialisasi bagi masyarakat harus ditingkatkan agar wakaf menjadi instrumen utama pembangunan ekonomi Islam.

Permasalahan ketiga adalah sistem politik dan pemerintahan belum mampu menciptakan stabilitas keamanan dan perekonomian. Banyak negara-negara Islam khususnya di Timur Tengah dan Afrika yang masih mengalami gejolak politik dan kepemimpinan, bahkan peperangan yang berkepanjangan. Hal ini justru terjadi pada negara-negara Islam yang mulai menerapkan sistem demokrasi dalam memilih pimpinan. Pada akhirnya banyak kelompok yang belum fokus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya secara menyeluruh. Hal menarik adalah justru pada sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang absolut berbentuk kerajaan dan semacamnya relatif tidak bergejolak.

Permasalahan di negara-negara Islam bukan semata-mata pada sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, karena dalam sistem politik Islam tidak secara spesifik menjelaskan bentuk sistem pemerintahan. Pada dasarnya sistem politik Islam telah menjelaskan agar seluruh komponen pemerintah dan masyarakat secara politik memahami dan melaksanakan tanggung jawab dan peran sesuai posisinya.

Secara umum pemerintah di negara-negara Islam memiliki tugas dan tanggung jawab terjaminnya tujuan syariah (*maqashid as-syariah*): menjaga agama (*din*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga akal (*aql*), menjaga keturunan (*nasl*), menjaga harta (*maal*). Menjaga agama bermakna bahwa pemerintah menjamin bahwa setiap warga negara bebas dan aman dalam menjalankan agama/syariah. Menjaga jiwa bermakna bahwa setiap jiwa/nyawa manusia harus aman dari gangguan dan risiko yang menghilangkan nyawa dan menyebabkan kematian seperti pembunuhan.

Menjaga akal bermakna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan adil agar akalnya terjaga baik melalui pendidikan dan kesehatan serta terjauhkan dari hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras dan perjudian. Menjaga keturunan bermakna bahwa negara harus menjamin keberlangsungan kehidupan warganya tetap berlanjut untuk kelestarian eksistensi umat Islam dan menjauhkan dari hal-hal yang merusak kehidupan manusia seperti zina, kumpul kebo, seks bebas. Hal ini juga penting untuk mengatasi krisis seksual (*free child*) yang mulai berkembang akhir-akhir ini. Hal inilah yang justru menghambat eksistensi dan potensi sumberdaya manusia ke depan. Menjaga harta bermakna bahwa negara menjamin eksistensi harta warganya dengan cara yang dibenarkan syariah dan menjauhkan dari perebutan harta melalui pencurian dan perampasan harta dengan berbagai metodenya.

Permasalahan keempat adalah utang luar negeri yang semakin besar. Dalam perspektif ekonomi Islam, hutang yang berbasis bunga termasuk riba yang terlarang. Hal ini akan membahayakan dan merugikan negara dan masyarakatnya, apalagi jika jumlahnya semakin besar. Masyarakat secara tidak langsung akan ikut menanggung beban utang akibat negara tidak mampu membayar utang beserta bunganya. Dampak utang yang semakin besar juga akan berpotensi ketergantungan pada

negara asal pemberi utang. Terlebih jika terdapat kesepakatan jaminan aset, maka potensi pengambilalihan aset tersebut atau dikuasai oleh negara pemberi utang.

Muhajirin (2017) menjelaskan pendapat ekonom kontemporer dalam menyikapai utang luar negeri. Mannan berpendapat bahwa utang luar negeri diperbolehkan jika tidak berbasis bunga. Chapra memandang utang luar negeri tidak efektif, karena akan menambah beban negara dan warganya pada masa yang akan datang. Zallum juga sependapat dengan Chapra, dengan memberikan solusi agar meningkatkan pendapatan dari umat Islam sendiri.

Negara-negara Islam harus lebih memperhatikan masalah utang agar tidak semakin memperparah proses pembangunan ekonomi. Islam memiliki solusi untuk mengurangi beban utang luar negeri. Pertama, negara-negara Islam harus memaksimalkan potensi keuangan publik/sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat memiliki karakteristik khusus untuk mengurangi kemiskinan (*operational expenditure*). Infak dan sedekah memiliki keluasaan dari sisi sumber dan peruntukannya, dan bisa melengkapi atau menambah bantuan untuk mengentaskan dan memberdayakan masyarakat miskin.

Wakaf memiliki potensi untuk membangun aset (*capital expenditure*) berbagai infrastruktur baik untuk pendidikan, kesehatan bahkan untuk bisnis. Bahkan potensi wakaf akan menjadi lebih besar jika pembangunan ekonomi memberdayakan wakaf uang.

Negara-negara Islam yang memiliki kelebihan sumberdaya alam harus mampu mengelola secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Sumberdaya alam tersebut harus dikelola secara mandiri, hasil produksi dapat menjadi sumber investasi yang besar bagi negara. Negara-negara Islam tidak boleh berpikiran pragmatis demi kepentingan jangka pendek dengan

hanya menjual bahan mentah yang memiliki nilai ekonomi rendah. Negara-negara Islam juga harus mempertimbangkan sistem investasi asing yang justru dalam jangka panjang akan merugikan, seperti larinya keuntungan ke negara asal bahkan beralihnya pengelolaan dan aset. Negara-negara Islam harus mengelola sumberdaya alam secara mandiri dan berkaulatan agar sumber daya menjadi produk akhir yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan menghasilkan devisa negara

10.5 Penutup

Pembangunan ekonomi di negara Islam selama ini masih menyisakan beberapa masalah. Selama ini terdapat 4 masalah utama yaitu sumberdaya alam dan pengelolaannya, sumberdaya manusia secara kuantitas dan kualitas, sistem politik ketatanegaraan yang belum stabil, dan utang luar negeri yang semakin besar. Islam telah memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi di negara-negara Islam. Negara Islam yang memiliki kekayaan sumberdaya alam lebih baik, maka harus mampu mengelola secara mandiri kemudian bersedia berbagi dan membantu negara Islam lain yang tidak memiliki potensi alam.

Sumberdaya manusia di negara-negara Islam harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang siap menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi ke depan. Negara Islam yang kaya harus berperan untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan negara Islam lain yang miskin melalui berbagai program beasiswa. Negara-negara Islam harus selalu bersatu dan bersinergi dalam membantu mengatasi berbagai konflik di negara Islam lainnya. Negara-negara Islam harus meningkatkan potensi sumberdaya keuangan publik dan sosial Islam untuk menjadikan negara lebih mandiri dalam membangun di negara-negara Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakami Hafizh bin Ahmad. (2012). *Ma'aarijul Qabuul*. Mesir: Darul Kutub al-'Ilmiyyah.
- Akhyar, M., & Sudan, M. (2017). *Polemik Negara Islam atau Islam Bernegara*. Program Kaderisasi Ulama UNIDA Gontor.
- Al-Mubarakfuri, S., & Al-Atsari, A. I. (2011). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*.
- bin Kholdun, M., & Abdurrahman, A. A. (2001). *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Pustaka Al Kautsar.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. cet. ke 4. PT. Gramedia Jakarta.
- Karim, K. A. (2015). *Kontroversi Negara Islam. Surabaya Dan Yogyakarta: Kerjasama Nusantara Press Dan INDeS*.
- Kashim, M. I. A. M., Jamsari, E. A., Ashari, M. Z. A. H., Samuri, M. al-A., & Yaacob, S. E. (2012). Penentuan Ciri Negara Islam Menurut Pemikiran Empat Mazhab Fiqah. *Jurnal Hadari*, 4(1), 89–106.
- Kemlu. (2022). *Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-Islam-oki
- Muhajirin, M. (2017). KONSEP HUTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Analisis Antara Konsep Anggaran Balance Budget dengan Defisit Budget). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 3(06).
- Mulia, M. (2001). *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*. Penerbit Paramadina.
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-3. Surabaya: Pustaka Progresif.

BIODATA PENULIS

BIODATA PENULIS



Rusydi Fauzan, SE, MM

Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Lubuk Aur tanggal 28 Mei 1986. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN SMDD Bukittinggi. Penulis sudah menulis sejak tahun 2010. Penulis menyukai kegiatan membaca, menulis, dan *traveling*. Seputar kegiatan penulis dapat di follow pada akun instagram @rusydifauzan

BIODATA PENULIS



Muhammad Zulkarnain, ME

Dosen Program Studi Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis adalah putra pertama (dari sembilan bersaudara) dari Bapak Abdul Halim (*Almarhum*) dan Ibu Asro yang dilahirkan di Asahan (Sumatera Utara) pada 10 Februari 1967. Setelah menamatkan pendidikan SD tahun 1980, SMP tahun 1983, dan SMA tahun 1986, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana (S₁) di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (*Agribisnis*) Fakultas Pertanian Institut Pertanian “STIPER” (INSTIPER) Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1994 dengan judul Tesis **Evaluasi Perkreditan Petani Plasma Kelapa Sawit di PIR Khusus I Sungei Tapung Riau.**

Pada tahun 1995-2000, penulis bekerja di Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. PSPI Surya Dumai Group Pekanbaru. Lalu berwiraswasta mulai tahun 2001, kemudian pada bulan Juli 2017, melanjutkan pendidikan S₂ pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dan lulus pada bulan Agustus 2019 dengan judul Tesis **Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi.**

Selanjutnya, sampai dengan sekarang penulis aktif sebagai Dosen mata kuliah Ekonomi Internasional, Ekonomi Mikro Syariah, Fiskal dan Moneter dalam Islam, Matematika Ekonomi, dan Statistik Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Email Penulis : muhammadzulkarnain1002@gmail.com

Biodata Penulis:



Yudhistira Ardana, M.E.K.

Dosen Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro

Penulis lahir di Purbalingga tanggal 02 Juni 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta dan melanjutkan S-2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Sebelum berkarir di IAIN Metro, penulis pernah mengajar pada beberapa perguruan tinggi seperti, IIB Darmajaya, STIT Pringsewu, STEBI Tanggamus, STMIK Pringsewu, UIN Raden Intan Lampung dan menjadi Tutor Online pada Universitas Terbuka hingga saat ini. Penulis beberapa periode dipercaya menjadi pengembang Mater Tutor Universitas terbuka tahun 2018 (Pengantar Akuntansi Syariah), 2019 (Bank dan Lembaga Keuangan Syariah), 2020 (Ekonomi Pembangunan Islam), 2021 (Teori Mikro Islam) dan 2022 (Kewirausahaan Syariah dan Teori Ekonomi Makro Islam). Selain itu penulis juga aktif dalam menghasilkan karya ilmiah dan menjadi anggota pada beberapa organisasi profesi Dosen. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

BIODATA PENULIS



Dr. Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

Penulis lahir di Pati pada tanggal 10 Pebruari 1966. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 pada Jurusan Ilmu Ekonomi.

BIODATA PENULIS



Ickhsanto Wahyudi

Profesional dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang akuntansi dan keuangan. Gelar Magister Akuntansi dari UP dan latar belakang Sarjana Akuntansi dari UI. Pengalaman sebagai Kepala Departemen Akuntansi di Esa Unggul University, Financial Advisor di Startup Job2Go, dan Accounting Manager di beberapa perusahaan. Juga memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi. Keahlian meliputi akuntansi, perpajakan, dan penggunaan software akuntansi & perpajakan. Aktif dalam mengikuti pelatihan dan workshop terkait akuntansi, audit, dan perpajakan. Terlibat dalam proyek audit, perancangan sistem akuntansi, pelaporan pajak, dan perancangan struktur perusahaan grup. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Perbankan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BIODATA PENULIS



Alamsyah Agit, SE., M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam DDI
Sidenreng Rappang

Penulis di Pangkajene, Sidenreng Rappang, pada tanggal 28 Juni 1996. Penulis menempuh pendidikan sarjana dan berhasil menyelesaikan studi S-1 di prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Parepare pada tahun 2018. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S-2 di prodi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Penulis memiliki keahlian di bidang ekonomi pembangunan terutama dalam sub bidang perencanaan pembangunan. Untuk memberikan kontribusi secara ilmiah penulis berkarir sebagai dosen, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain bidang ekonomi pembangunan, penulis juga berkolaborasi dengan dosen dan peneliti lain dalam bidang ekonomi dan bisnis serta *social sciences*, namun bidang yang sangat diminati oleh penulis adalah bidang ekonomi industri.

E-mail Penulis: alamsyahagit@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Annisa Ilmi Faried, S.Sos., M.SP

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Bekerja menjadi staf pengajar pada Fakultas Sosial Sains Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB)

Medan dari tahun 2012 sampai sekarang. Sebagai Staf Tenaga Ahli di BALITBANG Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai sekarang. Aktif memasukkan jurnal nasional maupun internasional serta menulis berbagai buku dengan judul buku baik sebagai penulis pertama maupun buku kolaborasi dengan berkontribusi bersama penulis-penulis di berbagai universitas. Semua buku sudah memiliki ISBN, E-ISBN dan HKI. Cita-cita yang belum kesampaian menulis cerita dan menjadi best seller serta *sold out* di seluruh outlet Indonesia. Mohon doa dan restunya pembaca.

BIODATA PENULIS



Ana Fitriyatul Bilgies, S.E., M.M.

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Penulis adalah dosen tetap pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan manajemen pada tahun 2011 dan S2 pada tahun 2014 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim.. Dan saat ini sedang lanjut studi S3 Doktoral Manajemen di Universitas di Surabaya. Kegiatan penulis selain menulis buku buku ajar, penulis juga mengajar ekonomi dan aktif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai daerah. Beberapa buku yang telah ditulis adalah Pengantar Manajemen Keuangan, Kewirausahaan, Bank dan Lembaga Keuangan, dan buku buku book chapter diantaranya : Sumber Daya Manusia, Anggaran Perusahaan, Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Akuntansi Manajemen, Etika Pengembangan Kepribadian. Pada tahun 2018 berhasil lulus penelitian dosen pemula yang dibiayai oleh Kemenristekdikti sebagai ketua peneliti. Bagi penulis, kegiatan menulis adalah hobi untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran tempat meningkatkan kreatifitas dan menjadikan hidup lebih produktif.

Email: anafitriyatulbilgies@unisda.ac.id

BIODATA PENULIS



Banatul Hayati SE.Msi

Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnisa Universitas Diponegoro

Penulis lahir di Cirebon tanggal 16 Maret 1968. Penulis adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan melanjutkan studi S2 pada program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP. Penulis menekuni penelitian bidang ekonomi makro dan ekonomi Pembangunan.

BIODATA PENULIS



Arif Pujiyono SE, MSi

Dosen Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro

Penulis lahir di Padang tanggal 22 Desember 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan melanjutkan S2 pada Pascasarjana PSKTTI Universitas Indonesia Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah.